

PEMIKIRAN ULAMA TENTANG AGAMA

BUKU DUMMY

Mendapat Bantuan Dana dari BOPTAN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2014

No. Kontrak No: Un.05/P1/TL.00.1/140-334/2014



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penulis

Didin Komarudin, M.Ag
ID. 201605760103168

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2014**

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat penting dalam pembangunan masyarakat desa. Tujuannya untuk mengetahui peranan pemikiran mereka dalam pembangunan masyarakat desa di kecamatan Cikancung kabupaten Bandung, dan pengaruh pandangannya mengenai pembangunan terhadap peranan mereka dalam pembangunan masyarakat desa. Populasi sasaran, ulama yang ada di kecamatan tersebut. Penentuan satuan sampel dilakukan dengan cara informant's rating dan penarikan sampel dengan acak sederhana. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pemikiran ulama cukup besar dan beragam, baik berupa pikiran, tenaga, maupun harta. Dilihat dari prinsip keterlibatan dalam proses pemikiran tentang agama, pada jalur bawah mereka terlibat secara lengkap (penuh), sedangkan pada jalur atas terlibat secara partial, karena kurang mendapat kesempatan. Cakupan keterlibatan mereka tidak terbatas dalam kegiatan pembangunan mental spiritual yang dilaksanakan di kecamatan mereka saja, tapi juga terlibat dalam pembangunan di luar kecamatannya terutama dalam pembangunan keagamaan.

Bagi ulama ajaran Islam merupakan psychological dynamics bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas Keduniawian yang bermakna, sumber aktivitas untuk berlangsungnya transformasi struktural, serta pemberi bentuk sistem perilaku yang berkaitan dengan fenomena pembangunan mental.

Karena itu pembangunan bagi mereka merupakan pengamalan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dijabarkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat secara utuh (kaffah). Pemikirannya itu berpengaruh kuat terhadap peranan mereka dalam pembangunan masyarakat kecamatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Swt, karena berkah rahmat dan karunia-Nya lah, proses penelitian dan laporannya dapat diselesaikan meski hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana ada kewajiban dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu dan bahan ajar.

Selain landasan hukum berupa tugas utama Dosen tersebut, faktor lain yang menjadi alasan mengapa penelitian ini sangat penting adalah fakta bahwa pengembangan ilmu di kalangan umat Islam tidak bersambungan secara estafet dengan baik.

Kajian dan penelitian tentang pemikiran ulama dari sudut pandang filosofis sangat lah kaya dan ragam. Sebagai objek material, pemikiran ulama di kalangan umat Islam utamanya memiliki sejumlah problem filosofis yang menarik dikaji dan diteliti.

Apalagi masih kuatnya pertarungan ideologis antara ulama satu dengan yang lainnya. Bagi sebagian kalangan, ulama hanya berpikir pada bidang agama saja yang tidak perlu terjun pada bidang umum. Bahkan ada yang mengharamkannya. Di sisi lain, fakta bahwa umat Islam mengalami ketertinggalan dari sisi pembangunan fisik sarana dan prasarana. Plus dilema aksiologi pemikiran dan fungsi ulama dalam dunia pembangunan dewasa ini.

Sebagai jawabannya, Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung kini mengembangkan paradigma wahyu memandu ilmu. Tentu saja, seluruh mata kuliah yang disajikan harus berdasarkan kepada paradigma wahyu memandu ilmu. Idealnya mata kuliah itu berbasis hasil riset. Disinilah pentingnya riset ini sebagai dasar awal, penyusunan pondasi kebijakan lebih lanjut. Dalam kesempatan ini tak lupa pula untuk menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. selaku rektor UIN Bandung, sebagai atasan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, sebagai atasan penulis;
3. Bapak Dr. Deden Effendi, M.Ag. Sebagai ketua lembaga penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberi arahan untuk kegiatan penelitian ini;
4. Bapak Dr. Deni Miharja, M.Ag dan dosen jurusan Aqidah Filsafat.

Akhirnya penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca sekalian untuk perbaikan hasil penelitian ini. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah penulis dalam rangka pengembangan ilmu ke depannya.

Billahitaufiq wal hidayah

Bandung, Oktober 2013
Penulis,

Didin Komarudin, M.Ag
NIP. 197605162005011003

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran | 9 |
| 1.6. Tinjauan Pustaka | 12 |
| 1.7. Metode penelitian | 13 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG ULAMA DAN AGAMA | 14 |
| 2.1. Konsep Ulama | 14 |
| 2.2. Peran dan Fungsi Ulama | 20 |
| 2.3. Konsep Agama..... | 26 |
| 2.4. Klasifikasi Agama | 34 |
| 2.5. Agama Islam Satu-Satunya Agama Samawi | 38 |
| | |
| BAB III KEADAAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG, | |

| | |
|---|-----|
| KABUPATEN BANDUNG | 41 |
| 3.1. Keadaan Wilayah Penelitian | 41 |
| 3.1.1. Letak Wilayah dan Keadaan Giografis | 41 |
| 3.1.2. Penduduk | 42 |
| 3.2. Kepemimpinan Masyarakat | 48 |
| 3.2.1. Satuan Sosial | 48 |
| 3.2.2. Jenis Kepemimpinan | 50 |
| 3.3. Kegiatan Pembangunan | 54 |
| 3.3.1 Bidang dan Sektor Pembangunan | 54 |
| 3.3.2. Jalur-jalur Pembangunan | 60 |
| 3.3.3. Dana Pembangunan | 64 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 67 |
| 4.1. Identitas Responden | 67 |
| 4.1.1 Usia, Pendidikan dan Pekerjaan | 67 |
| 4.1.2. Ulama Sebagai Pemimpin | 73 |
| 4.2. Pemikiran Ulama Mengenai Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Masyarakat Desa..... | 77 |
| 4.3. Peranan Pemikiran Ulama dalam Pembangunan | 93 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| 5.1. Kesimpulan | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu wacana intelektual yang cukup mengesankan di permulaan abad 21 ini adalah maraknya perbincangan mengenai dialog antaragama, bahkan juga dialog antariman. Gejala ini, sebagaimana lazimnya sebuah wacana, tentu saja tidak berdiri sendiri. Banyak faktor ikut mendorong kelahirannya. Dan salah satunya, walaupun bukan yang terpenting, ialah apa yang oleh Komaruddin Hidayat disebut sebagai krisis modernitas¹. Modernitas, meski telah banyak mendatangkan kemudahan bagi kehidupan manusia, namun ia juga melahirkan krisis kehidupan, mendatangkan ketidakpastian hidup, ketimpangan-ketimpangan sosial dan juga krisis serta konflik kepercayaan agama. Pengaruh negatif modernitas telah merasuk ke dalam kehidupan manusia dan melibas tradisi keagamaan yang hidup di sana.

Agama mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, tapi juga menentukan falsafah hidup dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama. Orang-orang yang memeluk agama dengan baik akan menghasilkan suatu kehidupan yang harmonis. Sebab, pada dasarnya agama berisi tuntunan-tuntunan yang jika dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata akan membawa pada suatu tatanan masyarakat yang saling menghormati dan bersatu dalam keragaman.

Tetapi, yang lebih berbahaya adalah ketika agama tidak dapat dijadikan sebagai alat pembentuk kedamaian dan keharmonisan, sebab, pada saat-saat tertentu, agama bisa tampil dengan sangat garang dan menakutkan akibat interpretasi yang dilakukan pemeluknya. Beberapa konflik dan pertentangan yang terjadi seperti peristiwa Cikeusik Pandeglang adalah contoh yang nyata bahwa agama terkadang dapat meruntuhkan tatanan hidup masyarakat yang sudah damai.

Banyak sekali peristiwa kekerasan yang dianggap disebabkan oleh faktor agama, seperti konflik dua kelompok yang berbeda keyakinan di Sampang, Madura. Konflik Islam Kristen di Bekasi, di Bandung, dan lain sebagainya. Karena itu, perlu dilakukan suatu upaya agar ketegangan

¹ Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus, (ed). *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (1998, hal pengantar)

antarumat beragama dapat dihindari dan kedamaian yang didambakan dapat diwujudkan kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda konflik memang sudah lama dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia yang menghuni muka bumi ini begitu heterogen terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, penganut agama, kultur, peradaban dan sebagainya. Dalam dunia baru, konflik-konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antarkelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi lainnya, melainkan konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Namun, selama berabad-abad, perbedaan entitas agama telah menimbulkan konflik yang paling keras dan paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam citranya yang negatif, agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, penindasan dan kekerasan. Agama telah menjadi tirani, di mana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, melakukan ketidakadilan dan pembunuhan.

Aksi Fundamentalisme

Dalam konteks kekinian, bentuk-bentuk konflik, kekerasan dan perang agama itu biasanya dihubungkan dengan bangkitnya fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama mengekspresikan cita-cita sosial-politiknya dalam bentuk ekstrimisme dan kekerasan sebagai reaksi terhadap kondisi kehidupan manusia yang dianggapnya tidak ideal. Fundamentalisme, sebagaimana dikatakan Karen Armstrong, merupakan salah satu fenomena paling mengejutkan di akhir abad 20. Ekspresi fundamentalisme ini terkadang cukup mengerikan. Para fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di masjid, membunuh dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh presiden, dan bahkan mampu menggulingkan pemerintahan yang kuat.²

Media Barat sering memberi kesan bahwa bentuk keagamaan yang saling bertentangan dan sekali-sekali diwarnai kekerasan yang dikenal sebagai “fundamentalisme” hanya ada pada fenomena Islam. Kesan itu kurang tepat. Fundamentalisme adalah fakta global dan muncul pada semua kepercayaan sebagai tanggapan pada masalah-masalah modernisasi. Ada Judaisme fundamentalis, Kristen fundamentalis, Hindu fundamentalis, Sikh fundamentalis, dan bahkan Konfusianisme fundamentalis. Karen Armstrong mengatakan bahwa gerakan fundamentalis tidak muncul begitu saja sebagai respons spontan terhadap datangnya modernisasi yang dianggap sudah keluar

²Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, Yahudi*, Penerjemah Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali, (Bandung: Mizan, 2001), hlm., ix

terlalu jauh.³ Semua orang religius berusaha mereformasi tradisi mereka dan memadukannya dengan budaya modern, seperti dilakukan pembaharu Muslim. Ketika cara-cara moderat dianggap tidak membantu, beberapa orang menggunakan metode yang lebih ekstrem, dan saat itulah gerakan fundamnetalis lahir. Gerakan fundamentalisme dalam konteks kekinian telah memberikan kontribusi dalam kasus-kasus kekerasan antar umat beragama.

Kekerasan dalam agama muncul karena ketiadaan kemampuan dalam menghadapi modernitas dan perubahan. Perlu digarisbawahi, fundamentalisme merupakan spirit gerakan dalam radikalisme agama. Menurut salah satu pendapat, aksi fundamentalisme ini merupakan mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam. Yaitu krisis keadaan yang akan menentukan eksistensi mereka. Karen Armstrong juga menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme yang berkembang pada masa kini mempunyai hubungan erat dengan modernitas.

Karena gerakan fundamentalisme itu muncul sebagai respon atas modernitas maka kita sebaiknya melihat hubungan antara agama dan modernitas secara obyektif. Dalam tubuh modernitas juga mengandung banyak ekses negatif. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pengaruh modernitas juga memberikan implikasi kerusakan bagi eksistensi kemanusiaan. Karena itu, modernitas perlu diantisipasi pula. Tapi, antisipasi yang dilakukan tidak menyebabkan “totalitas” penolakan atas dasar agama. Modernitas adalah sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga negatif.

Kekerasan bukanlah merupakan sebuah tawaran yang bijak untuk menyikapi polarisasi dunia akibat tamparan hebat modernitas. Agama memiliki banyak kerangka pemikiran untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Hanya saja, eksplorasi atas makna-makna perdamaian dalam agama telah dicemari oleh beberapa perilaku kekerasan oleh gerakan radikal. Tugas kaum agamawan adalah bagaimana menawarkan solusi atas kekerasan ini agar ada pernyataan bahwa kekerasan bukanlah ajaran agama.

Fakta beberapa oknum pelaku pengeboman atau terorisme yang dilakukan oleh kelompok agama memang bisa saja dibenarkan bahwa itu dilakukan oleh beberapa kelompok fundamentalis. Tapi, apakah penampilan Islam pasti seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh gerakan fundamentalis sudah mengandung kompleksitas kondisional. Artinya,

³Pada dasarnya, fundamentalisme lebih merupakan sebuah keyakinan untuk kembali pada fundamen-fundamen agama. Maknanya bisa positif atau negatif. Ekses negatif yang diakibatkan dari pandangan yang fundamentalis ini adalah sikap kekerasan. Penyandingan kekerasan dengan fundamentalisme disebabkan karena gejala dalam realitas sosial yang sering nampak. Kelompok fundamentalis sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka.

dengan tameng agama, apa yang mereka lakukan juga merupakan penyertaan pada sisi politis, ideologis, dan kepentingan non-agama yang melingkupi aksi mereka. Jadi, itu bukan *an sich* karena sisi penafsiran yang merupakan hasil pemaknaan agama yang sempit saja.

Hal ini muncul karena pemahaman agama yang cenderung tekstualis, sempit, dan hitam-putih. Pemahaman seperti ini akan dengan mudah menggiring sang pembaca pada sikap keberagamaan yang kaku. Pembacaan agama tidak bisa terlepas dari konteks historisnya. Pemahaman agama sangat dinamis. Untuk itulah, pembacaan yang terbuka akan menghindarkan kita dari sikap-sikap yang berbau kekerasan.

Konflik Agama

Indonesia adalah negara yang plural di mana banyak agama bisa tumbuh dan berkembang. Masing-masing agama memiliki pengaruh tersendiri dan mendapatkan tempat untuk beraktualisasi meskipun pada kenyataannya Islam mendapatkan prioritas utama, sementara yang lain berada pada posisi yang sekunder. Mungkin ini disebabkan karena mayoritas bangsa ini adalah orang Islam. Seakan-akan ini hanya ingin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis-pluralistik yang menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia.

Tetapi pada kenyataannya, agama selain Islam seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, bukan hanya dari negara juga dari masyarakat atau individu secara umum. Masih banyak kaum Kristen yang tidak bisa bebas menjalankan upacara keagamaannya. Gereja-gereja ditutup, entah itu karena dalih tidak memiliki izin operasional ataupun hal yang lainnya. Padahal, banyak mesjid dan mushola yang sampai sekarang ini ditemui banyak yang tidak memiliki legalitas pendirian.

Konflik antaragama dan keyakinan bukanlah fenomena baru. Ia telah ada sejak dulu. Keberadaannya tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini bukan terjadi hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai penjuru dunia, seperti di Iran dan Irak. Islam Sunni-Syiah sampai hari ini masih bersitegang. Sebuah ungkapan sinis sangat dikenal, jika hari ini mesjid Sunni yang dibakar, maka besoknya giliran mesjid Syiah yang dihancurkan.

Kalau kita menyadari, sesungguhnya penganutan agama adalah persoalan hak asasi manusia. Karena itu, semestinya setiap orang bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandanginya paling baik untuk dirinya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, dan pemaksaan agar orang memilih suatu agama yang satu-satunya mengandung kebenaran dan pada saat yang sama ia harus menolak agama yang lain. Pemaksaan yang demikian, meski memiliki tujuan yang luhur, tetapi telah mereduksi kebebasan beragama dan tergolong pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari kebebasan beragama yang telah diberikan, maka setiap orang juga bebas beribadah dan menjalankan

kehidupan agamanya sesuai dengan keyakinan imannya, sejauh pelaksanaan kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain, karena orang lain pun memiliki kebebasan yang sama. Jangan sampai karena terlalu bersemangat dalam menghayati dan mempraktekkan agama, kebebasan orang lain malah terganggu. Dengan demikian diharuskan, suatu komunitas agama mampu untuk mengurus diri sendiri sehubungan dengan doktrin, ritual ibadah dan organisasinya.

Nurcholish Madjid dalam beragam tulisannya menekankan adanya penghormatan dalam menjalankan agama bukan hanya di kalangan internal Islam sendiri, namun juga antar pemeluk agama lain. Orang Islam, kata Cak Nur, diperintahkan untuk menyadari bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepada-Nya. Bahkan biarpun sekiranya kita mengetahui dengan pasti bahwa seseorang lain menyembah suatu objek sesembahan yang tidak semestinya, kita tetap dilarang untuk berlaku tidak sopan terhadap mereka. Bagaimanapun kesadaran beragama tidak dapat dipaksakan, dan setiap orang, lepas dari agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.⁴

Toleransi Keagamaan

Membincang relasi antar agama sering terjadi kesalahpahaman dikarenakan pemahaman yang sangat terbatas, sehingga lagi-lagi orang saling membunuh hanya karena perbedaan agama. Hal ini sangat menyedihkan. Kita bicara masalah Tuhan (agama), dan atas nama Tuhan satu sama lain saling membunuh. Konflik ini tidak hanya terjadi antar agama, tetapi dalam agama Islam sendiripun terjadi konflik. Kita sering mendengar konflik-konflik muncul pada organisasi-organisasi yang baru. Ini disebabkan karena pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami agama dengan baik supaya tidak terjadi konflik yang semacam ini.

Agama-agama merupakan berbagai jalan yang bertemu pada satu titik yang sama yaitu Tuhan yang menjadi ajaran sentral semua agama. Demikian salah satu pandangan seorang ahli tradisional Frithjof Schuon dalam bukunya *Transcendent Unity of Religions*, dengan kata pengantar oleh Huston Smith dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Mencari Titik Temu Agama-Agama* menggambarkan bahwa semua agama menuju Tuhan Yang Maha Esa baik dalam tataran esoterik maupun eksoterik, sebagaimana ungkapan Seyyed Hosseini Nasr bahwa agama itu seperti berbagai jalan menuju ke satu puncak gunung.

Schuon berusaha untuk menganalisis hubungan antara agama. Menurut

⁴Nurcholish Madjid. *Islam, Agama Kemanusiaan, membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*. (Jakarta : Paramadina, 2003) hal 91-92

Schunon, setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan. Setiap agama adalah unik dengan perbedaannya dan satu dari segi kesamaannya. Bila tidak ada persamaan pada agama, kita tidak akan menyebutnya dengan nama yang sama; "agama". Bila tidak ada perbedaan diantaranya, kita pun tidak akan menyebutnya dengan kata majemuk, "agama-agama". Dimanakah akan di tarik garis antara kesatuan dan kemajemukan diantara keduanya.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mendalami masalah ini, maka, penelitian ini akan berusaha merumuskan masalah yang ada seputar topik yang bersangkutan. Lebih fokus lagi, penelitian ini tidak akan diarahkan secara khusus membahas tentang apa itu filsafat perennial, melainkan akan mencoba meneliti tentang relasi antar agama tetapi menggunakan kaca mata filsafat perennial. Penulis akan memfokuskan diri pada sebuah buku yang ditulis oleh tradisionalis Fritjhof Schunon yakni *the Transendent Unity of Religion* yakni Kesatuan Transenden Agama-Agama. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Mencari Titik Temu Agama-Agama. Buku ini tidak begitu dikenal di masyarakat. Banyak orang menghindari untuk mendiskusikan buku ini, sebab persoalan yang dibahasnya adalah persoalan yang cukup sensitif. Bahkan, dalam bukunya terjemahannya, satu bab terakhir sengaja dihilangkan oleh penerbit karena dianggap dapat memicu kontroversi.

Karena itulah, penulis merasa tertantang untuk meneliti buku ini. Rumusan masalah ini dibatasi pada pertanyaan yang sekiranya dapat membantu mempermudah penelitian ini:

1. Apa yang dimaksud dengan pemikiran agama menurut ulama?
2. Bagaimana konsep pemikiran ini dapat dijadikan dasar pemikiran dalam menyikapi relasi seagama dan penganut anatar umat beragama?
3. Bagaimana implementasi konsep pemikiran agama ini dalam konteks hubungan keberagamaan di Indonesia

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Memahami tentang konsep pemikiran Agama menurut Ulama.
2. Memahami konsep Pemikiran Agama ini sehingga dapat dijadikan dasar dasar dalam menyikapi relasi antar seagama penganut umat beragama?
3. Mengerti bagaimana implementasi konsep pemikiran agama ini dalam konteks hubungan keberagamaan di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada akademik terhadap ilmu pengetahuan filsafat khususnya dalam bidang pemikiran filsafat atau metafisika Islam di masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi ilmu filsafat atau tasawuf (metafisika) khususnya filsafat perennial dan kaitannya dengan relasi antar agama.

2. Manfaat Praktis

- a) Terutama sekali, hasil ini penelitian ini semoga dapat membantu memberikan pemahaman yang utuh bagi peneliti sendiri tentang realitas transendental atau pemikiran agama, sehingga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menyikapi relasi antaragama.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi para pemeluk agama dalam memandang agama sendiri maupun agama lain.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan secara khusus dapat dijadikan bahan untuk menyikapi konflik antar agama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Tampilnya agama sebagai produk ketuhanan tengah mewarnai kehidupan manusia sebagai salah satu fenomena yang memainkan peranan penting dalam eksistensi hidup manusia. Agama adalah semesta rujukan di mana manusia dapat menemukan makna dan inti kehidupan. Kenyataan lain telah mendesak manusia untuk senantiasa berusaha dalam melakukan pembaharuan dan penafsiran yang terus menerus terhadap agamanya, agar agama yang dalam catatan sejarah dianggap sebagai produk klasik dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kemanusiaan di dalam konteks masa kini.

Konflik-konflik antar agama yang terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh penafsiran yang fundamental dan radikal dalam pengertian tertentu terhadap teks suci keagamaan. Interpretasi inilah yang kemudian melahirkan sikap dan cara hidup yang ekstrem dalam kehidupan beragama. Kebenaran yang diperdebatkan tidak akan jauh-jauh dari ruang lingkup pemahaman teologis semata. Sebab, pemahaman teologis yang tidak utuh dengan sendirinya akan menegasikan kebenaran yang hadir di tempat lain. Pemahaman teologis yang tidak berlandaskan pada realitas metafisis tetap menimbulkan masalah dalam cara memandang agama yang lain.

Agama menyajikan realitas spiritual sebagai realitas yang unik. Untuk

proses mencapai pemahaman yang mendalam tentang realitas agama, maka diperlukan suatu kajian teoritis filosofis guna membantu memberi kesadaran kepada manusia bahwa setiap agama tentu memiliki unsur kebenaran. Kebenaran itu berlaku bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam eksistensi agama, entah agama apapun pasti memiliki aspek teologis dan metafisis, atau katakanlah sisi eksoteris dan esoteris. Kebenaran universal akan tampil dalam konteks esoterik. Dalam esoterisme, kebenaran selalu ada dan berlaku sepanjang masa. Ia bersifat abadi dan hadir dalam setiap jantung agama. Dalam studi filsafat, hal ini dikenal dengan filsafat perennial (*sophie perennis*).

Apa itu filsafat perennial? Sepintas, definisi teknisnya filsafat perennial adalah pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada dan bersifat abadi. Perennial sendiri berasal dari bahasa latin yakni *perennis*, yang berarti *kekal, selama-lamanya, atau abadi*. Dalam buku *the Perennial Philosophy* yang ditulis Aldous Huxley ia menyebutkan bahwa filsafat perennial adalah; pertama, metafisika yang memperlihatkan suatu hakikat kenyataan ilahi dalam segala sesuatu: Kehidupan dan Pikiran, kedua, suatu psikologi yang memperlihatkan adanya sesuatu dalam jiwa manusia yang identik dengan kenyataan Ilahi, dan ketiga, etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan – yang bersifat imanen atau transenden – mengenai seluruh keberadaan.

Istilah filsafat perennial biasanya muncul dalam ranah kajian filsafat agama dimana yang menjadi fokus perhatiannya adalah; pertama, tentang Tuhan, sebagai Wujud yang Absolut, yakni Tuhan bagi seluruh agama. Kedua, filsafat perennial ingin membahas fenomena pluralitas agama secara kritis dan kontemplatif, dan ketiga, filsafat perennial berusaha menelusuri akar-akar kesadaran religiusitas seseorang atau kelompok melalui simbol-simbol, ritus serta pengalaman keagamaan.

Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai filsafat perennial sudah ada sejak awal mula filsafat yang cenderung ke arah teologis dan metafisik yang bernuansa sakral. Filsafat perennial sebagai bentuk kearifan-kearifan memang tidak begitu familiar di dunia modern dan bahkan mengalami pergeseran signifikansi namun diyakini tetap ada disebabkan keberadaan agama dan kepercayaan mampu bertahan di tengah kemelut dunia kontemporer ini. Menurut Nasr, filsafat perennial mengandung arti sebagai kebenaran kekal di pusat semua tradisi yang berkaitan dengan *sanatana dharma* dalam agama Hindu, *al-Hikmah al-Khalidah* atau *al-Hikmah al-Laduniyyah* dalam agama Islam. Ia juga disebut sebagai *scientia sacra* atau seni sakral. Salah satu pengertian *Sanatana Dharma* dan *Sophie Perennis* berkaitan erat dengan konsep tentang “tradisi primordial” yaitu Asal eksistensi manusia. Namun pandangan ini tidak berarti merusak atau terpisah dari otentisitas ajaran-ajaran yang datang kemudian dalam berbagai

bentuk pewahyuan. Karena setiap yang datang dari yang Asal ia adalah yang Asal itu sendiri. Bentuk-bentuk pewahyuan tersebut sebagai bentuk perwujudan tradisi primordial dalam dimensi manusia, yaitu dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan lingkungan kontekstual tertentu dari manusia yang menjadi tujuan pewahyuan tersebut.⁵

Kekeliruan yang muncul selama ini adalah asumsi bahwa filsafat perennial menyamakan dan menyatukan semua agama secara umum. Padahal asumsi tersebut kurang begitu tepat. Sebaliknya, filsafat perennial mengakui setiap rincian dari suatu tradisi sakral sebagai sesuatu yang berasal dari surga dan karenanya harus dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Aliran ini sepenuhnya mengakui otentisitas spiritual tertentu dari setiap agama dengan segala keunikannya, dan menekankan bahwa keistimewaan-keistimewaan tersebut dilihatnya sebagai bukti bahwa ia memiliki sumber transendental, yaitu intelek ilahi.⁶

Titik persamaan agama-agama yang dibicarakan dalam tradisi perennial adalah persamaan transendental yang otentik yang melampaui setiap bentuk dan manifestasi lahiriah dan tidak akan pernah binasa dikarenakan oleh adanya perubahan ruang dan waktu. Di sinilah karakter pokok tradisi perennial bahwa ia tetap bentuk-bentuk dari agama apapun sebagai keistimewaan pertikular yang harus dihormati, dan oleh karenanya pluralitas agama dalam pengertian yang lebih tinggi harus ditegakkan sehingga konflik antar agama bisa dihindari dan kebebasan beragama menjadi terselamatkan.

Karena itu, agama sebenarnya datang untuk menyelamatkan manusia sebanyak mungkin, sebab Tuhan menyelamatkan setiap orang. Berarti Tuhan akan mengekspresikan Diri-Nya dalam berbagai bentuk, supaya jiwa yang beragam itu dapat terhubung dengan-Nya. Setiap jiwa manusia berbeda antara satu dengan lainnya, baik dari segi karakter maupun kapasitas. Karena itu, tali yang dilemparkan atau agama yang diturunkan untuk menyelamatkan manusia juga berbeda. Ada yang secara kolektif punya karakter yang sama, sesama Muslim misalnya, ada “tali” untuk Muslim. Ada tali untuk Kristen, untuk Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Titik pusat menyelamatkan semua orang. Inilah yang dinamakan Kesatuan Transenden.

Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk percaya pada ajaran agama yang dibawa para nabi sebelumnya, misalnya kita harus meyakini kitab yang empat, yaitu Zabur, Injil, Taurat dan Qur'an. Tetapi, terkadang betapa sulit kita percaya dan meyakini ajaran yang ada di dalam tiga kitab sebelumnya.

⁵Emanuel Wora. *Perennialisme, Kritik atas Modernisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta : Kanisius (2006)

⁶M. Wahyuni Nafis dan Komaruddin Hidayat. *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta : Paramadina. (1995. hal 11)

Berarti keimanan kita belum total dan utuh. Ibarat cerita kehidupan, jika al-Qur'an adalah Kitab atau Buku Agama yang terakhir, berarti yang awal dan tengah sangat penting, karena ia pasti menceritakan tentang kitab dan agama sebelumnya. Jika membaca hanya bab terakhir sebuah buku, tentu kita tidak akan mampu memahami isi buku secara keseluruhan. Begitupun dengan Kitab, jika hanya membaca al-Qur'an saja, maka kita tidak dapat memahami kebenaran secara utuh dan menyeluruh. Islam, adalah agama terakhir, berarti ia merangkum agama sebelumnya meskipun tidak sedetail sebagai sebenarnya. Berarti, ada kesinambungan ajaran sebelumnya dengan Islam yang sekarang. Para Nabi terdahulu menceritakan akan kedatangan Nabi Muhammad saw, dan beliau juga menceritakan pada Nabi yang sebelumnya, agar kita selalu terhubung dengan seluruh cerita kehidupan manusia baik antara yang lampau, sekarang maupun dengan yang akan datang.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka penelitian akan mencoba membedah sebuah buku Schuon yang berjudul *Transcendent Unity of Religions*. Selain itu, untuk membantu pemahaman terhadap topik ini, maka dilakukan pengamatan terhadap penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

- a) Fritjof Schuon tentang Islam dan Filsafat Perennial
- b) Seyyed Hossein Nasr tentang Knowledge and Sacred (pengetahuan dan Kesucian).
- c) Huston Smith tentang Agama-Agama Manusia
- d) Muhammad Wahyuni Nafis dan Komaruddin Hidayat tentang Agama Masa Depan perspektif filsafat perennial
- e) Emanuel Wora tentang Perennialisme, kritik terhadap modernisme dan post modernisme
- f) James Cutsinger, *Advice to the Serious Seeker*
- g) Irfan Hanida, Konsep Esoterisme dalam Pemikiran Fritjof Schuon (skripsi)

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan meneliti kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Dr. Anton Bakker yaitu metode deskriptif dan akan mencoba membaca dan menelaah buku utama penelitian ini dengan dibantu membaca dokumen atau tulisan lain yang mendukung penelitian ini, kemudian mendeskripsikan (*descriptive metode*) pemikiran yang bersangkutan terkait dengan religio cordis atau religio perennis serta bagaimana kesatuan transenden (esoteris) atau titik temu agama-agama itu bisa dimungkinkan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG ULAMA DAN AGAMA

2.1. Konsep Ulama

Ada dua kunci dasar mengenai konsep ulama . Pertama, konsep ulama menurut isyarat al-Qur'an, dan kedua konsep ulama menurut al-Hadis. Terma ulama' atau ulama dalam al-Qur'an dikemukakan dalam bentuk (shighat) ulama'u (orang-orang berilmu) ditemukan pada dua ayat yang berbeda yaitu, (1) ayat 28, surat al Faathir (Pencipta):

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama.⁷ Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.(Q.S. Al-fathir ayat 28)

(2) ayat 197, surat Asy Syu'araa (Para penyair):

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”. (Q.S. Ass-Syu'araa ayat 19)

Kedua ayat itu menunjuk (ma'rifat) kepada ulama yang berbeda (tertentu) yaitu (1) ulama hamba Allah, dan (2) ulama Bani Israil. Ulama hamba Allah menurut redaksi ayat itu (Faathir: 28) dimaksudkan sebagai orang-orang yang berilmu, yang mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah dan hanya takut kepadaNya. Sedangkan ulama Bani Israil, seperti tersurat dalam surat Asy Syu'raa, ayat 157 itu, dimaksudkan sebagai orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka tidak menerima al-Qur'an sebagai satu kebenaran (Thabathabai, 1983).

Dari isyarat al-Qur'an itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua tipe ulama yaitu; (1) ulama yang mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah (berilmu), serta takut kepadaNya; dan (2) ulama yang berilmu, tetapi tidak takut kepada Allah, bahkan tidak mau menerima al-Qur'an sebagai suatu kebenaran.

Terma ulama dalam al-Hadis dapat ditemukan, (1) pada hadis nabi yang diterima dari Abi Darda'i: "...dan sesungguhnya ulama itu pewaris nabi (warasat al-anbiya), dan para nabi itu tidak mewariskan sesuatu dalam bentuk harta benda (dinar atau dirham), yang mereka wariskan adalah ilmu (al-ilm)...” (riwayat Abu Daud dan Turmudzi, dalam Shalih, 1970: 757); (2) pada hadis yang diterima dari Abdillah Bin Amn Bin Al-Ash:

⁷ yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

“sesungguhnya Allah tidak mengambil (melenyapkan) ilmu dari manusia dengan seketika, melainkan dengan cara mematikan ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang yang berilmupemimpin; dalam saat yang sama, orang-orang bodoh ini dimintai fatwa dan mereka memberi fatwa dengan tanpa ilmu, orang-orang sesat dan menyesatkan”, (*muttafaq’alaih*) (Shalih, 1970: 758).

Dengan isyarat al-Qur’an dan al-Hadis itu isue terpenting yang terkait dengan ulama adalah ilmu.

Dari segi bahasa (*etimologi*) kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata *alim*, artinya orang yang berilmu. Kata alim itu berasal dari kata kerja (*fi’alima*) yang bentuk kata bedanya adalah ilm atau ilmu, sebagaimana yang digunakan dalam indonesia, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenaran yang berfungsi sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari (suriasumantri, 1984 : 69). Dari sini dapat diketahui bahwa ulama berarti orang-orang yang berilmu.

Kata atau lafazh ‘*ilm* atau *al’lim* atau ilmu dalam al-Qur’an terulang sebanyak ± 104 kali, yang tersebar di berbagai ayat. Mengandung arti atau makna khusus dan umum, artinya ada ilmu yang terkait dengan masalah-masalah ke tuhanan, metafisika (mughayabat), dan masalah yang empirik, seperti nama-nama benda sebagaimana diajarkan Allah kepada Adam,⁸ “dan yang lainnya. Dalam al-Hadist kata ilmu juga bisa bermakna khusus dan umum, hal itu bisa dilihat dari bentuk-bentuk kata (lafazh) ilmu yang ditemukan. Lafazh ilmu yang menggunakan *alif lam* berarti ilmu tertentu, sedangkan lafazh yang tidak menggunakan *alif lam* berarti bermakna umum.

Dalam dua hadis dan dua ayat yang telah dikemukakan dimuka, lafazh yang digunakan bermakna khusus, namun kekhususannya tidak dibatasi pada keragaman atau jenis ilmu, akan tetapi terletak pada aspek aksiologi, yaitu sejauhmana ilmu-ilmu tersebut membawa guna dan manfaat bagi manusia untuk bisa mengagungkan Allah dan takut kepada-Nya (Shalih, 1970: 758).

Para mufassir dalam memahami surat Faathir; 28, mengemukakan bahwa kata ulama dalam ayat itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-Nya, teguh hatinya dan tidak ada keraguan; terlihat dalam seluruh perbuatannya, sebagai bukti kebenarannya (Thabathaba’i, 1983: 43). Karena itu kadar khasyyat

⁸ Surat al-baqarah (sapi Betina) ayat 31: “dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda0 seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-ku benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”.

(takut) dalam ayat itu merupakan ukuran dari tingkat pengenalan (*ma'rifat*) dan pengetahuan (ilmu) ulama terhadap Allah. *Al-Khassyyat* (takut) dalam ayat tersebut tidak berkonotasi pada kekhawatiran akan siksa Allah, tetapi menunjukkan kondisi di dalam hati dan terasa bersifat khusyu, yang berubah ketika tergambar dan terasa oleh hati tersebut sifat keagungannya (al-Qasimy, dalam Shalih, 1970: 983).

Dari pendapat para ahli mengenai ilmu dalam kaitannya dengan identitas ulama sebagai pemilik ilmu itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu disini adalah ilmu dalam arti yang komprehensif dan umum, yang pada tingkat kegunaannya harus membawa pemiliknya kepada kerendahan diri dihadapan-Nya, ketaatan kepada-Nya serta mengagungkan-Nya. Kerendahan diri, ketaatan, dan pengagungan terhadap Allah dari seorang ulama merupakan bukti keilmuannya. Karenanya bagi ulama, ditingkat lapangan, ia akan menampilkan “kekuatan” ilmu dan segisegi lainnya. Dan ketaatan sebagai salah satunya, bisa dilihat dalam penekunan seluruh aturan Allah yang harus diberlakukan dalam kehidupan individual dan komunal seorang ulama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terma ulama atau keulamaan merupakan komulasi dari ilmu dan ketaatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perjalanan kehidupan umat islam, terma ulama sering dipakai untuk menunjuk kepada keahlian pada satu cabang ilmu agama saja, misalnya “Ulama Fiqih”, “Ulama Kalam”, “Ulma Hadis” dan sebagainya, dan “gelar” tersebut terutama diberikan oleh murid-murid dari masing-masing ulama.

Dalam kapasitasnya sebagai pemilik ilmu (‘alim) atau orang berilmu, ulama adalah guru atau bahkan pendidik. Al-Sunnat menuturkan bahwa jika seorang berilmu tidak mentransfer (ta’lim) ilmunya, ia diancam dengan sanksi yang tidak ringan. Seperti disebutkan dalam salah sat hadis; “Siapa saja orang berilmu tidak mentransfer (ta’lim) atau bahkan menyembunyikan ilmunya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka” (Hadis dari Abu daud dan Turmudzi). Karenanya ulama sering berkiprah sebagai guru atau “penyampai ajaran agama saja”. Dengan status itu diasumsikan ulama sudah menyandang gelar *warasat al-anbiya* (penyampai ajaran nabi). Akan tetapi dengan status itu tidak berarti ulama lepas interaksinya dari lingkungan-lingkungan yang mengitarinya, sebab keilmuannya, dengan kadarnya, mempunyai implikasi dalam berbagai segi kehidupan (Al-Mu;in dalam Shahih, 1970: 984). Apa yang dilakukan ulama itu merujuk kepada sabda nabi Muhammad SAW bahwa “seorang mukmin yang abik adalah dia yang terlibat aktif dalam kehidupan manusia, dan shabar terhadap berbagai problema yang muncul ditengah-tengah kehdupan itu”. (Hadis dari Abu Daud dan Turmudzi).

Dalam perspektip perkembangan sosial politik umat Islam, pada masa awal setelah wafat nabi Muhammad SAW, seorang *khalifah* adalah seorang

mujtahid. Seorang imam atau pemimpin harus memiliki kemampuan berijtihad atau sebagai ‘ulama. Pada perkembangan selanjutnya (menjelang kejatuhan Bagdad) seorang imam atau pemimpin (dengan berbagai sebutannya), tidak lagi harus seorang mujahid atau ulama. Dengan demikian terjadi pemisahan yang tajam antara ulama atau keulamaan disatu pihak dengan umaro atau imarat di pihak lain. Status masing-masing menjadi jelas, ulama pemegang otoritas keilmuan agama, dan umaro adalah ulil amri (yang punya urusan atau pemegang pemerintahan). Dari sini berkembang asumsi bahwa, jika ulama terlibat dalam bidang garapan umaro (“keluar” dari statusnya), maka ulama telah menampilkan aspek-aspek dinamisnya, kemudian sering dikatakan sebagai “peran ulama”. Karena kedudukannya itu, keberadaan ulama dilingkungan masyarakat (khususnya di Indonesia), dikenal sebagai pemimpin informal (*informal leaders*) (Riberu, 1976: 6), yang memiliki peluang untuk berperan serta aktif dalam pembangunan masyarakat desa.

Mengenai status dan peranan, dijelaskan oleh Ross (dalam Susanto, 1977: 94): Status adalah kedudukan seorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada seseorang yang menempati suatu kedudukan. Sedangkan peranan (*role*) merupakan dinamika dari status, atau penggunaan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dan peranan saling kait-mengkait, yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang. Lebih jauh dijelaskan oleh Cohen (1983: 77) bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Di pihak lain Horton dan Hunt (1987: 118) menandakan, bahwa setiap orang mukmin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan statusnya. Status atau kedudukan, adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai suatu status. Status dan peranan adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah perangkat hak dan kewajiban, peran adalah pameran dari hak dan kewajiban tersebut.

Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, “peran ulama” itu dimaksudkan sebagai aspek dinamis suatu institusi, atau seperti yang dikatakan Berger dan Luckman (1972: 92), peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu institusi (dalam hal ini ulama sebagai institusi). Semua peranan mewakili suatu institusi secara menyeluruh, tetapi ada beberapa di antaranya yang secara simbolis dapat dianggap mewakili institusi yang bersangkutan secara total. Peranan seperti ini mempunyai peranan strategis di dalam masyarakat, sebab peranan tersebut tidak saja mewakili institusinya sendiri melainkan juga merupakan faktor integratif

seluruh individu dari institusi tersebut (Berger dan Luckman, 1972: 93). Keterlibatan ulama secara penuh maupun sebagian dalam penetapan kebijakan umum dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat dianggap sebagai peranan strategis (Ndraha, 1986: 53). Peranan strategis itu disebut Cohen dan Uphoff (1977: 76) sebagai peranan dasar (*basic roles*). Peranan dasar atau peranan strategis yang menghasilkan wujud kebijakan umum itu, selanjutnya diperinci berupa program-program pembangunan yang dilaksanakan sebagai suatu kegiatan sosial. Perincian dan pelaksanaan peranan dasar itu oleh Cohen dan Uphoff (1977) dan Simpas (dalam Ndraha, 1986: 54) disebut sebagai peranan administratif (*administrative roles*), yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan sehubungan dengan fungsi-tugas seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peranan administratif itu dalam wujudnya berupa “kemampuan administratif”, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dan dengan dukungan sistem-sistem pendukung pembangunan (Katz, 1969: 112). Sistem-sistem tersebut adalah berupa pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dengan lingkungan (*environmental linkages*). Dengan perkataan lain, kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan lingkungan.

Dalam kemampuan itu termasuk kemampuan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan masukan-masukan dari lingkungan, dan menyiapkannya bagi sistem pelaksanaan tugas (Tjokroamidjojo, 1980). Antara ketiga sistem itu (pelaksanaan tugas, struktur, dan hubungan dengan lingkungan) ada kaitan yang timbal balik. Hubungan antara struktur (organisasi) dengan lingkungannya dapat diterangkan melalui kemampuannya menyesuaikan diri, struktur mendukung lingkungan. Sebaliknya melalui sumber daya yang ada padanya, lingkungan mendukung struktur. Bahkan permintaan (*demand*) dari lingkungan merupakan masukan bagi struktur. Hubungan timbal balik antara pelaksanaan tugas dengan lingkungan ialah pelaksanaan tugas menghasilkan keluaran bagi lingkungan, sementara lingkungan menyediakan dukungan bagi pelaksanaan tugas (Tjokroamidjojo, 1980).

Sehubungan dengan peranan administratif itu (*administrative roles*), hariri membagi konsep peranan ke dalam empat konsep: (1) *Role prescription*, rumusan peranan tertulis yang harus dilakukan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem sosialnya; (2) *Role perception*, pemikiran seseorang terhadap peranan yang harus dilakukan berdasarkan peranan yang telah dirumuskan dalam kedudukannya; (3) *Role performance*, peranan yang dapat diperagakan seseorang sehubungan dengan kedudukannya, yang didasari oleh persepsinya terhadap peranan yang telah

dirumuskan dan kemampuan melaksanakannya; (4) *Role exception*, peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya, yang diharapkan pihak lain dapat dilakukan untuk kepentingan mereka.

2.2. Peran dan Fungsi Ulama

Ulama mengemban tugas mulia menunaikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana para nabi. Mereka harus aktif menegakan tauhid dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 2 sebagai berikut:

*“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (As-Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.*⁹

Sabda nabi Muhammad SAW.

*“Ulama adalah penerang dunia, khalifah segenap para nabi, ahli waris (ajaranku) dan ahli waris seluruh nabi”.*¹⁰

Ulama merupakan pengalih fungsi kenabian. Setiap ulama harus mampu mengemban misi para nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Amanat menegakan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Menurut al-Qur'an, ulama harus menjadi hamba Allah yang berpikir dan berdzikir. Ia harus menjadi pengajar tauhid, pemberi penjelasan, pejuang kebenaran, dan sekaligus pemimpin umat yang mempopori *amar ma'ruf nahi munkar*.¹²

Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam disamping kesadaran pengamalan ajarannya.

Kemudian apabila dihubungkan dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat al-baqrah ayat 213, yang berkesimpulan bahwa, Tuhan mengutus para nabi dan memberikan putusan atau pemecahan terhadap apa-apa yang diperselisihkan atau dipersoalkan dalam masyarakat mereka. Berangkat dari rangkaian kedua ayat di atas juga diungkapkan para ulama adalah pewaris para nabi, dapat dipahami bahwa para ulama melalui

⁹ Lihat Qur'an Surat Al-Jumu'ah: 2.

¹⁰ Lihat Hadis Riwayat Ibnu Adi dari Ali.

¹¹ Badruddin Hsubky, Op. Cit., h.x 65.

¹² Hadis yang sama maksudnya, Lihat Shahih Bukhori, bab Ilmu, Juz 1, halaman 25, Darul Fikr, Beirut Libanon.

pemaparan-pemaparan kitab dan pengalamannya, bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat serta problem-problem sosial yang ada dan berkembang pada masyarakat.¹³

Peran dan fungsi ulama tidak hanya menyebarkan dakwah Islam saja tetapi juga berjuang melawan penjajah Belanda. Perjuangan ulama melawan penjajah Belanda di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama, periode perintis dihitung dari permulaan abad XVI, ketika bangsa asing mulai berkuasa di Indonesia. Sebagai contoh perjuangan Sultan Hasanudin Raja Goa XVI (1613-1670) walaupun bukan seorang ulama dalam artian khusus, tetapi jelas motivasi perlawanan yang beliau gerakan berdasarkan ajaran agama Islam yang menentang kedzaliman, kemudian Belanda memberikan julukan "De Jonge han van Oustan". Artinya ayam jantan dari Timur.¹⁴

Tengku Tjik Ditiro ulama terkenal dari serambi mekah, markas perlawanan beliau dipusatkan di kampung Tiro dekat kota Bakti (kota Pidie). Sesudah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh saudara-saudaranya. Zent Graap dalam bukunya aceh menyebutkan, satu keistimewaan ulama-ulama Tiro adalah semua menakhiri perjuangannya sebagai syahid (meninggal di medan pertempuran). Di wilayah Sumatera Barat, perang Paderi juga dipimpin oleh seorang ulama yaitu Tengku Imam Bonjol, beliau bukan saja pamong yang adil di samping panglima perang yang cakap, berani, cerdas dan arif. Pihak Belanda mengakui di pelbagai tanah air ini, Imam Bonjol ini termasuk musuh yang paling ulung.¹⁵ Semua perjuangan pada periode ini banyak dijiwai oleh semangat jihad Islam dan sebagian besar dipimpin oleh para ulama.

Kedua, periode perintis mulai abad XX, ketika kekuasaan Belanda semakin mencekap di Indonesia yang ditopang oleh kekuatan senjata, birokrasi pemerintah dan politik penjajahan sampai proklamasi kemerdekaan. Perjuangan pada awal abad ini dititik beratkan kepada kekuatan pikiran melawan klonial politik Belanda, dengan menggembeng semangat rakyat, menggalang kekuatan massa, mendidik generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan secara berkesinambungan dan usaha-usaha lainnya yang bersifat konsolidasi. Pada saat itulah tahun 1909 berdiri Serikat dagang Islam (SDI), yang dipimpin oleh Tiro Adisuryo, H. Samanhudi dan lain-lain, pada mulanya reaksi atau jawaban dari monopoli. Setelah SDI bertukar menjadi Serikat Islam (SI) dipimpin oleh H>O.S. Tjokroaminoto mulailah kelihatan pertukaran warna dan corak yang lebih berat kepada tujuan yang mengandung aspirasi ulama. Gerakan Serikat Islam

¹³ Quraish Shihab, membumikan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1997, h. 375.

¹⁴ AG. Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum, tp.: t.pn. h. 399.

¹⁵ Ibid, h. 444.

(SI), yang bangkit bersamaan dengan gerakan nasional Budi Utomo (BU), gerakan-gerakan pemuda seperti Young Java, Young Sumatra dan young Minahasa.

Lambat laun gerakan ini menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan penguasa Belanda. Kemajuan serikat Islam kemudian bertukar menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan penguasa Belanda. Kemajuan serikat Islam kemudian bertukar menjadi partai Serikat Islam Indonesia (PSII), mendapat sokongan semangat dengan bangkitnya pula gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh seorang ulama yaitu K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah (1912). Semangat gerakan yang digerakan Jamaludin al-afghani, Syeikh Muhammad Abduh, Rasyid ridha dan lain-lain dari Mesir. Bukan saja mengalir ke pulau Jawa tetapi ke pulau-pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Di Sumatera para ulama terjun ke dalam kancah perjuangan politik dengan gerakan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang dipimpin oleh K.H. Jalaluddin Taib, kemudian diperkuat dengan tenaga-tenaga pemuda keluaran Universitas al-Azhar seperti K.H. Muhtar Lutfi, K.H. Ya'qub dan lain-lain.

Dalam masa kurang lebih lima dasawarsa (40 tahun) pergerakan kemerdekaan ini, pada permulaan abad ke XIX peranan dan fungsi ulama dan intelegensia muslim tidak kecil, artinya berjuang bahu membahu dengan gerakan kaum nasional yang masuk dalam barisan perintis sampai kepada saat kemerdekaan, negara Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan periode ketiga, dinamakan periode pencetus adalah kalimat dari perjuangan Indonesia merdeka. Apabila ditelusuri peranan ulama dalam kancah revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, dapatlah disimpulkan bahwa pada umumnya, para ulama itu mendorong menggerakkan dan menjiwai perjuangan kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi suatu kenyataan.¹⁶

Menurut H.M. Nasution mengutip A. Yusuf Ali dari tafsir "The Holy Qur'an" merinci 5 peranan dan fungsi ulama sesuai dengan Qur'an Surat al-Ahzab ayat 45-46 sebagai berikut:

1. Sebagai saksi bagi semua umat manusia tentang kebenaran yang hakiki, perintis jalan dari kebodohan, kemusyrikan serta saling sengketa.
2. Pembawa kabar berita gembira (optimisme) tentang karunia Allah, walaupun sejauh manusia tersesat, tetapi berkat keimanannya dia selalu

¹⁶ H.M. Yunan Nasution, Peranan Ulama dalam Kancah Perjuangan Republik Indonesia, t.t.: Panji masyarakat N. 237, h. 30.

mempunyai pengharapan dan berusaha supaya dapat menempuh dan menghayati kehidupan yang lebih baik.

3. Memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan yang sekarang bukanlah kehidupan tetapi masih ada lagi kehidupan yang akan datang (future life) yang lebih penting.
4. Menjadi penyeru kepada jalan kebenaran serta menunjukkan jalan-jalan untuk memperoleh karunia ampunan illahi. Sebagai obor yang menerangi seluruh alam, sebab Islam yang dikembangkan adalah satu agama yang sifatnya universal serta memancarkan cahaya ke seluruh jagat raya.

Sebenarnya sejarah telah mengukir, bahwa sejak zaman Walisongo sampai masa-masa perjuangan kemerdekaan serta revolusi fisik Indonesia, para ulama telah memperlihatkan kiprahnya secara nyata dalam membimbing dan mengayomi umat. Mereka telah menampilkan diri mereka sebagai batu nisan yang sangat berarti dalam masyarakat, dengan bertindak sebagai pelopor, pemimpin dan penggerak hati nurani masyarakat dalam menegakkan kebenaran serta menumpas kebathilan.

Pada awal-awal kemerdekaan masih banyak ulama yang kukuh dalam pendiriannya, mereka tidak hanya tinggal di surau-surau, masjid-masjid, podok pesantren dan sejumlah institusi keagamaan yang semenjak kolonial Belanda disalah tafsirkan sebagai tempat-tempat yang berpandangan picik, keterbelakangan dan sebagainya. Pada masa itu, bahkan para ulama berkiprah di bidang politik.

Pada saat sekarang ini, perubahan sosial yang dihembuskan oleh proses modernisasi banyak menimbulkan perubahan nilai dari masyarakat, sementara itu tradisi yang ada di masyarakat belum bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat dari perubahan tadi. Oleh karena itu ulama dituntut untuk memberikan penafsiran-penafsiran baru. Dalam hal ini ada dua hal segi yang harus diperankan ulama dalam hal ini ada hal segi yang harus diperankan ulama dalam masyarakat. Pertama, membimbing masyarakat ke arah perubahan-perubahan baru supaya tidak melampaui batas-batas keagamaan. Kedua, ulama harus memodernisasikan masyarakat, fungsi agama dan tugas ulama dalam hal ini harus berada di depan di dalam menghadapi perubahan itu secara langsung karena agama adalah nilai panutan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Ada beberapa kewajiban ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:

A. Menegakan dakwah dan Membentuk Kader Ulama:

1. Menanamkan aqidah Islam dan membebaskan semua manusia dari segala macam kemusyrikan.
2. Mengatur dan melaksanakan dakwah islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku-suku terasing di seluruh pelosok pedesaan.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.
4. Membentuk kader-kader penerus ulama demi eksistensi perjuangan dakwah Islam.

B. Mengkaji dan Mengembangkan Islam:

1. Menggali nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas.
2. Mencari gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Melindungi Islam dan Umatnya;

1. Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.
2. Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan musuh Islam.
3. Memupuk rasa persatuan di antara umat Islam bila timbul perbedaan di antara mereka, apalagi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.¹⁷

Dengan demikian, hendaknya ulama giat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan dan kemusyrikan.

2.3. Konsep Agama

Sebelumnya lebih dahulu saya minta maaf jika kemungkinan kata-kata saya yang akan menyinggung perasaan saudara-saudara, karena sesungguhnya saya ingin berbicara secara obyektif. Akan tetapi dalam soal keagamaan sikap obyektif ini mustahil sebagai yang dikatakan oleh Prof. Tillich tiap-tiap manusia itu dalam keadaan Involed (terlibat). Karena saya orang Islam, maka saya involed dengan Islam.

Ucapan terkutp di atas diucapkan oleh Prof. Dr. H.M. Rasjidi, mantan

¹⁷ Badruddin Hsubkki, Op. Cit., h. 66.

Menteri Agama RI yang pertama sekali, dalam musyawarah antar agama di Jakarta tanggal 30 Nopember 1967 yang lalu, dan ditujukan kepada pengikut agama selain Islam, khususnya agama Katholik dan Protestan. Selanjutnya dikatakannya pula:

Di samping itu telah diakui pula oleh para sarjana bahwa agama adalah hal yang disebut sebagai “problem of ultimare concern”, suatu probem yang mengenai kepentingan mutlak, yang berarti jika seseorang membicarakan soal agamanya, maka ia tak dapat tawar menawar, apalagi berganti; agama bukan sebagai rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti, akan tetapi sekali kita memeluk keyakinan, tak dapatlah keyakinan itu pisah dari seseorang.¹⁸ Pernyataan Prof. Rasjidi termaksud di atas yang juga menjadi pendirian penulis sendiri sengaja penulis kutipkan mengawali uraian tentang agama ini dan dalam waktu yang sama merupakan pula semacam pengantar pembahasan hasil penelitian.

Barangkali tida ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari ‘agama’...”, demikian Prof. Dr. A. Mukti ali memulai ceramahnya berjudul “Agama, Universitas dan Pembangunan” di IKIP Bandung pada tanggal 4 Desember 1971. Selanjutnya dikatakannya:

Paling sedikit ada tiga alasan untuk hal ini. Pertama, karena pengalaman agama itu adalah soal bathini dan subyektif, juga sangat individualistis... Alasan kedua ialah, bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama... maka dalam membahas tentang arti agama selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti kalimat agama itu... Alasan ketiga ialah, bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu.¹⁹ Akan tetapi menghadapi kenyataan tersebut tidak usah diartikan, bahwa kita tidak usah berikhtiar mencoba untuk memahami dan merumuskan “agama” itu sejauh kemampuan kita.

Maulana Muhammad Ali menulis buku standard tentang Islam yang sangat baik bernama *The Religion of Islam*.²⁰ Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh seorang putera Indonesia, Soedewo, dengan judul *De Riligie van de Islam*.²¹ Buku tersebut agaknya

¹⁸ Dikutip dari M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, dihimpun oleh E. Saifuddin Anshari, Bandung, 1969, h. 227.

¹⁹ A. Mukti Ali, *Agama, Universitas dan pembnaganan*, Badan penerbit IKIP Bandung, 1971, h. 4.

²⁰ Maulana Muhammad Ali. *The Religion of Islam; A Comprehensive Discussion of its Sources, Principles and Ptectices*, The Ahmadiyah Ajunan Isha’at Islam, Lahore-Pakistan, 1950.

²¹ Maulana Muhammad Ali. *De Religie van de Islam*, (vartaald door Soedewo); Ahmadiyya beweging Indonesia, 1958.

telah diterjemahkan pulake dalam bahasa Arab dengan judul Ad-Dinu'l-Islam.²² Dalam pameran buku-buku Islam di Mesjid kebayoran Baru tahun enam-puluhan ada penulis lihat satu rencana omslag buku berjudul Agama Islam yang merupakan terjemahan Soedewo P.K. juga dari buku *The Religion of Islam* karya besar Maulana Muhammad Ali termaksud.

Dengan mengemukakan hal-hal termaksud di atas penulis hanya sekedar menyampaikan kesimpulan sederhana, yaitu bahwa dalam arti teknis: Religion (bahasa Inggris) = Religie (bahasa Belanda) = Din (bahasa Arab) = Agama (bahasa Indonesia).

Baik religion (bahasa Inggris) maupun religie (bahasa Belanda), keduanya berasal darai bahasa induk kedua bahasa termaksud, yaitu bahasa Latin: *relegere, to treat carefully* (Cicero, *De Nat, Deorum* ii, 28); *relegare, to bind together* (Lactantius, *Instif. Div.*, iv, 28) atau *religare, to recover* (Agustine, *De Civitate Dei*, x, 3).²³

Tida ada satu definisi tentang religion yang dapat diterima secara umum. Para failasuf, para sosiolog, para psikolog, dan para teolog dan lain-lainnya telah merumuskan definisi tentang religion menurut caranya masing-masing. Sebagian failasuf beranggapan bahwa religion itu adalah “*superstitious structure of incoherent metaphysical notions*”; sebagian ahli sosiologi lebih senang menyebut religion sebagai “*collective expression of human values*”; para pengikut Karl Marx mendefinisikan religion dengan “*the opiate of the people*”; sedangkan sementara psikolog menyimpulkan bahwa religion itu “*mistical complex surrounding a projected super-ego*”. Dari data empiris termaktub di atas, jelaslah bahwa tak ada batasan tegas mengenai religion, yang mencakup pelbagai fenomena religion itu.²⁴

Walaupun betapa mustahilnya memberikan sebuah definisi yang sempurna tentang religion, namun ada bentuk-bentuk yang mempunyai ciri-ciri khas daripada kepercayaan dan aktivitas manusia yang biasanya dikenal sebagai kepercayaan dan aktivitas religion, yaitu: kebaktian, pemisahan antara sakral dengan yang profane, kepercayaan terhadap jiwa, kepercayaan terhadap dewa-dewa atau Tuhan, penerimaan atas wahyu yang supra-natural dan pencarian keselamatan.²⁵

Dalam *Everyman's Encyclopaedia* kita menemukan rumusan tentang religion sebagai berikut: “Religion... may broadly be defined as acceptance

²²Shalahuddin Sanusi, *Dirasat Islamiyah*, PTDI Senat Uswatun Hasanah, Nagreg Cicalengka Bandung, tanpa tahun, h. 20.

²³E.F. Bozman (Editor). *Everymen's Encyclopaedia, Fourth Edition*, Volume Ten. J.M. Dent & Sons Lmt., London. 1958, h. 512.

²⁴ John R. Benner, “*Religion*” dalam *Encyclopaedia Americana*, Volume 29. Americana Corporation

²⁵ *Ibid.*

of obligation toward power higher than man himself”²⁶ (religion... dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai: penerimaan atas tata aturan daripada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri).

Sementara itu, Vergilius Ferm, seorang ahli ilmu pengetahuan keagamaan dan perbandingan agama, setelah mengajukan sepuluh macam keberatan-keberatan terhadap usaha mendefinisikan religion, namun pada akhirnya toh diajukannya juga rumusan sendiri sebagai berikut:

A religion is a set of meanings and behaviors having reference to the individuals who are or were or could be religious. Again, religion is generic term referring to all conceivable religions, formal or informal.²⁷

(Agama ialah seperangkat makna dan kelakuan yang berasal dari individu-individu yang religius. Lagi-lagi, agama ialah istilah yang umum menunjuk pada semua agama-agama yang dapat ditangkap, baik formal maupun informal). Di dalam Al-Munjid dapat kita temukan keterangan tentang arti Din sebagai berikut: Ad-Din (Jama’: Adyan): (1) Al-Jaza wa ‘I-Mukafaah; (2) Al-Qadha; (3) Al-malik/Al-Muluk wa ‘s-Sulthan; (4) At-Tadbir; (5) Al-Hisab.²⁸ (Artinya: (1) pahala, (2) ketentuan, (3) kekuasaan, (4) pengelolaan (5) perhitungan).

Ustadz H. Moenawar Chalil Mengatakan:

Kata , ‘dien’ itu mashdar dari kata kerja ‘daana’-‘yadienu’. Menurut lughat, kata ‘dien’ itu mempunyai arti bermacam-macam. Antara lain berarti: 1) Cara atau adat kebiasaan. 2) Peraturan. 3) Undang-undang. 4) Tha’at atau patuh. 5) Menunggalkan ketuhanan. 6) Pembalasan. 7) Perhitungan. 8) Hari Qiamat. 9) Nasehat. 10) Agama.²⁹

Selanjutnya Ustadz Moenawar Chalil menerangkan pula, bahwa:

Dalam kitab Qamus al-Muhieth, karangan Imam Al-Fairuzzabad (sebuah kitab kamus bahasa Arab yang terhitung besar) diterangkan bahwa ‘dien’ itu mempunyai arti bermacam-macam, antara lain seperti yang kami sebutkan tadi; dan juga berarti: kemenangan, kekuasaan, kerajaan, kerendahan, kemuliaan, perjalanan, paksaan dan peribadatan.³⁰

Al-Jurjani³¹ menerangkan persamaan dan perbedaan antara ad-Din pada satu pihak, dengan al-Millah dan al-Madzhah pada lain pihak. Menurut beliau baik ad-Din maupun al-Millah ataupun al-Madzhah bersamaan dalam materinya. Perbedaan terletak dalam kesannya: ad-Din dinisbahkan kepada Allah; al-Millah dinisbahkan kepada Nabi tertentu, misalnya Millatu Ibrahim

²⁶ E.F. Bozman, h. 512.

²⁷ Vergilius ferm, op. Cit., h. 647.

²⁸ Louis Ma’luf, al-Munjid: fi’l-lughah, al-Matba’ah al-Katsulikiyah, Beirut, t.t. h. 231: (1) Balasan dan... (2) ketentuan; (3) Kekuasaan; (4) Pengurusan; (5) Perhitungan.

²⁹ Moenawar Cholil, Definisi dan Sendi Agama, Bulan Bintang, Jakarta, h. 13.

³⁰ Ibid.

³¹ Al-Jurjani, al-Ta’rifat, tanpa tahun, h. 94-95.

(Millah Ibrahim, Din yang dibawakan oleh Ibrahim); al-Madzhabdinisbahkan kepada mujtahid tertentu, contohnya madzhab as-Syafi'i (Din menurut faham Imam Besar Syafi'i). Pendapat Al-Jurjani ini sepenuhnya disetujui dan diambil per oleh Maulana Muhammad Ali.³²

Di dalam al-Qur'an kata Din dipergunakan, baik untuk Islam maupun untuk selain Islam, termasuk juga untuk kepercayaan berhala yang sangat sederhana seperti kepercayaan orang Hijaz pada zaman awal risalah dan nubuwah Muhammad saw. Kita antara lain dapat membaca di dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran kesimpulan termaksud:

Katakanlah hai Muhammad. Hai orang-orang yang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu Din kamu dan bagiku Din-ku! (Q.S. al-kafirun 1-6).

Dialah yang telah mengutuskan Rasul-Nya dengan membawa al-Huda (Hidayat) dan Dinu 'l-haqq (Din kebenaran), buat mengunggulkannya atas din-din semuanya, walaupun kaum musyrikin membencinya. (Q.S. al-Shaf 9). Dengan demikian maka jelaslah tidak benarnya pendirian dan anggapan: bahwa din mesti Islam, selain daripada Islam tidak dapat dikatakan din.

Kerap kali kita membaca dan mendengar orang mencoba mencari dan menerangkan arti agama dari segi etimologi, bahwa agama itu berasal dari dua kata: a = tidak dan gama = kacau. Kuat sekali untuk diduga bahwa teori tersebut berasal dari Fachroeddin Al-Kahiri. Pada bulan september 1937, Fachroeddin Al-Kahiri telah mengadakan pidato radio di muka corong V.O.R.L. (radio di Bandung) dengan judul "Islam menoeroet Faham Filosofie". Ketika beliau berbicara tentang "Faham dan arti Agama" beliau antara lain berkata sebagai berikut:

Sepanjang hemat kita adalah perkataan agama itu kata majmu, bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua perkataan, yang pertama (a) dan kedua gama. A, artinya dalam bahasa Sangsekerta: tidak; gama, artinya kocar-kacir, berantakan, yang sama artinya dengan perkataan Griek: chaos. Jadi arti kata "agama" ialah tidak kocar-kacir, atau tidak berantakan. Lebih jelas lagi kata agama itu ialah teratur, beres. Jadi yang dimaksud di sini ialah satu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang ghaib, ataupun yang mengenai budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lainnya.³³

Teori Ustadz Fahroeddin ini sering kali dikutip dalam ceramah-ceramah dan dalam tulisan-tulisan, baik dalam brosur-brosur maupun buku-

³² Maulana Muhammad Ali, op. Cit., h. 1.

³³ Fachroeddin Al-Kahiri, Islam menoeroet Faham Filosofie, Choetbah di radio V.O.R.L. Bandoeng, Kemajoean Islam Djokdjakarta, 1938, h. 6.

buku.³⁴

Berbicara tentang mencari arti agama dari segi etimologi, adalah menarik sekali uraian H. Bahrum Rangkuti, seorang muslim cendekiawan dan sekaligus seorang linguist dan kini (1974) menjadi sekjen Departemen Agama. Dalam salah satu diktat ceramahnya antara lain kita membaca uraian yang menarik sebagai berikut:

Agama memang satu istilah yang telah menjadi milik bahasa Indonesia, tetapi untuk mengetahui intinya, baiklah kita tuliskan dahulu: aslinya bahasa Sangsekerta: a-ga-ma. Seringkali saya baca di buku-buku karangan tentang ‘agama’, mereka mengatakan bahwa agama ini artinya dari: a = tidak, gama = kacau, jadi: agama = tidak kacau. Ini sebenarnya tidak ilmiah, oleh karena mungkin yang menerangkan itu belum mengetahui bahasa Sangsekerta. Memang a dalam bahasa kita = tidak, yaitu: aneka. A = tidak, eka = satu, aneka = tidak satu; aneka = serba, bagai, gevarried, geschijnd. Tapi kalau a panjang a-gama, artinya a = cara, jalan, the way; gama, mulanya gam adalah bahasa Indo Germania = bahasa Inggris to go = jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keredhaan Tuhan.³⁵

Sutan Mohammad Zain dalam kamus-nya menerangkan tentang arti agama sebagai berikut: “agama (Skr) kepercayaan kepada kesaktian, ruh nenek moyang, dewa, Tuhan; ...”³⁶

Sedangkan W.J.S. Poerwadarmita dalam kamus-nya menerangkan: “agama” segenap kepercayaan (kpd. Tuhan, Dewa dsb.) serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.³⁷

Dalam Ensiklopedia Indonesia kita mendapatkan uraian tentang agama sebagai berikut:

Agama (umum), manusia mengakui dalam agama adanya Yang Suci: manusia itu insaf, bahwa ada suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau Khalik segala yang ada. Tentang kekuasaan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada manusia, demikian pula caramembayangkannya. Demikianlah Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga gaib di seluruh dunia dan dalam unsur-unsurnya atau sebagai Khalik rohani. Tenaga gaib ini dapat menjelma a.l. dalam alam (animisme), dalam buku suci (Torat) atau

³⁴ Lihat umpamanya Haji Zainal Arifin Abbas, Perkembangan Fikiran terhadap Agama, Firm “Islamiyah”, Medan, 1961, h. 19.

³⁵ H. Bahrum Rangkuti, Jalan kepada al-Qur’an & Bahasa Arab, diktat ceramah, No. 2 Th. 1, Kebayoran Baru, 10-6-68.

³⁶ Sutan Mohammad zain, Kamus Modern bahasa Indonesia, Penerbit Grafika, Jakarta, tanpa tahun, h. 17.

³⁷ W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia: bagian pertama: Huruf A s.d. O., cetakan keempat, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1966, h. 21.

dalam manusia (Kristus).³⁸

H. Zainal Arifin Abbas dalam bukunya *Perkembangan Fikiran terhadap Agama* dengan panjang lebar menguraikan definisi agama. Antara lain beliau menulis tentang religion dan agama sebagai berikut:

Selain perkataan 'agama' dalam bahasa Latin yaitu 'religion'. Dalam bahasa-bahasa Barat sekarang bisa disebut 'Religion' dan 'religious'... dalam bahasa Arab disebut 'Din' dengan memanjangkan huruf 'i'. Atau sempurna disebut "al-Dien"... Sesungguhnya demikian, ada perbedaan yang pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kalimat 'agama' dalam bahasa Sangsekerta dengan kalimat 'religio' bahasa Latin dan kalimat 'El-Din' dalam bahasa Arab...³⁹ Baik uraian beliau tentang definisi agama, maupun tentang religion, din dan agama, kedua-duanya tidak meyakinkan.

Menurut kesimpulan penulis, sesuai dengan uraiannya yang terdahulu, baik religion (religi), maupun din, ataupun agama masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri. Namun dalam arti terminologis dan teknis ketiga istilah itu berinti, mana yang sama. Tegasnya religion (bahasa Inggris) = religie (bahasa Belanda) = din (bahasa Arab) = agama (bahasa Indonesia).

Demikian pula pendirian bahwa "Din" itu khusus digunakan untuk Islam saja, ataupun khas untuk Wahyu Ilahyun saja, tidak dapat dipertanggung-jawabkan baik secara diniyah (qur'aniyah) maupun secara ilmiah. Perhatikan umpamanya yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an: (a) Surah 109: al-Kafirun ayat 6 dan (b) Surah 61: as-Shaf ayat 9. Perhatikan pula, bahwa Perbandingan Agama (Comparative Religions) dalam (dunia ilmu pengetahuan) bahasa Arab disebut "Maqaranatu 'I-adyan". Adyan adalah bentuk jama' daripada Din. Dalam Muqaratu 'I-Adyan tentunya yang dibahas bukan hanya Dinu I-Islam, melainkan juga adyan (din-din) lainnya, seperti Hinduisme, Buddhisme, Shintoisme, Yudaisme, Zoroastrianisme, Taoisme, Confusianisme, dan lain sebagainya.

Di dalam bukunya yang sama H. Zainal Arifin Abbas juga menulis:

Adapun dalam al-Qur'an kalimat Al-Din (pakai awalan "al") hanya ditujukan kepada Islam saja, lain tidak, seperti firman Tuhan Yang Maha Esa dalam al-Qur'an surat 3 ayat 19 di mana Tuhan hanya mengakui Islam saja yang sah.⁴⁰

Bahwa menurut surah 3: Ali Imran ayat 3 "Agama yang diakui benar pada sisi Allah hanyalah al-Islam", itu memang benar. Namun

³⁸ T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidung, *Ensiklopedia Indonesia*, A-E, N.V. Penerbitan w. Van Hoeve Bandung, 's-Gravenhage, tanpa tahun, h. 31.

³⁹ H. Zainal Arifin Abbas, h. 29.

⁴⁰ Ibid.

berkesimpulan bahwa ad-Din (al-Din) (memakai definite article “al”) khusus tertentu kepada Islam tidak dapat dibenarkan. Di dalam al-Qur’an kata Din (baik dengan maupun tanpa definite article “al”) dipergunakan baik untuk Islam, maupun untuk din pada umumnya. Di dalam al-Qur’an surat 61: as-Shaf ayat 9 kita baca:

Huwa ‘l-ladzi arsala Rasula-Hu bi ‘l-Huda wa Dini ‘l-Haqqi li yuzh-hira-Hu ‘ala ‘d-Dini kullihi wa lau kariha ‘l-Musyrikun.

Perhatikan susunan kata: li-yuzh-hira-Hu ‘ala ‘d-Dini (!!!-penulis) kullihi. Kata Din dalam susunan termaksud di atas jelas memakai “al”, akan tetapi ditujukan pada selain daripada Islam.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam al-Qur’an kata din (baik dengan maupun tanpa “al”) digunakan baik untuk Islam maupun untuk din pada umumnya. Pada hemat penulis yang memastikan bahwa yang dimaksud din itu adalah Islam bukan definite article “al”, melainkan kata yang menyertai kata din itu sendiri. Umpamanya kata al-Haqq (pada Dinu ‘-Haqqi), kata al-Qayyim (pada Dinu ‘l-Qayyim) dan kata Allah (pada Dinu ‘i-Lah); di samping bisa dilihat juga dari konteks kalimatnya sendiri.

Untuk jelas dan tegasnya, baiklah kita kutipkan sekedarnya ayat-ayat al-Qur’an yang mendukung konsep teoritis penulis termaksud di atas.

Dinu ‘l-Haqqi antara lain terdapat dalam al-Qur’an Surah 61: as-Shaf ayat 9 (terkutif di atas): Huwa ‘l-ladzi arsala Rasula-Hu bi ‘l-Huda wa Dini ‘l-Haqqi.⁴¹

Dinu al-Qayyim anantara lain terdapat dalam al-Qur’an Surat 30: ar-Rum ayat 30: Dzalika Ad-Dinu ‘l-Qayyim. Ad-Dinu ‘l-Khalish terdapat dalam al-Qur’an Surat 39: az-Zumar ayat 3: Ala li ‘l-Lahi ad-Dinu ‘l-Khalish. Dinu ‘l-Lah terdapat dalam al-Qur’an Surat 3: Ali Imran ayat 83: Afa-ghairu Dini ‘l-Lahi yabghun.

2.4. Klasifikasi Agama

Ada pelbagai klasifikasi yang dibuat para ahli tentang agama⁴² Ahmad Abdullah Al-Masdoosi di dalam bukunya *Living Religions of the world* menulis: Religion can also be classified on the following grounds:

- (1) Revealed and non-revealed;
- (2) Missionary and non-missionary;

⁴¹ Lihat pula al-Qur’an Surat 9: at-Taubah ayat 33 dan Surat 48: Al-fatah ayat 28.

⁴² Lihat A. Moechtar Sjoftan, *Ilmu Perbandingan Agama*, Diktat Kuliah, Bab IV Klasifikasi Agama, tanpa tahun, h. 11-16.

(3) Geographical-racial and universal.⁴³

2.4.1. Revealed and non Revealed Religions

Adapun yang dimaksud dengan “revealed religions” (agama wahyu) ialah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para Rasul-rasul-Nya dan kepada kitab-kitab-Nya serta pesannya untuk disebarakan kepada segenap umat manusia. Sedangkan sebaliknya “non-revealed religions” agama yang tidak memandang essensial penyerahan manusia kepada tata-aturan Ilahi. Yang dimaksud revealed religion, menurut Al-Masdoosi, ialah Yudaisme, Kristen dan Islam. Selebihnya termasuk pada non-revealed religion. Agama-agama wahyu bersangkutan dengan rasa semitik. Sedangkan agama-agama bukan wahyu tidak ada sangkuatan apa-apa dengan ras Semitik.

Di bawah ini dikemukakan perbedaan agama-agama wahyu dengan agama-agama bukan wahyu, menurut Al-Madoosi:

Pertama, agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan sedangkan agama bukan wahyu tidak harus demikian;

Kedua, agama wahyu beriman kepada Nabi, sedangkan agama bukan wahyu tidak;

Ketiga, bagi agama wahyu maka sumber utama tuntunan dan ukuran bagi baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan bagi agama bukan wahyu kitab suci yang diwahyukan tidak essensial;

Keempat, semua agama wahyu lahir di timur tengah, sedangkan agama bukan wahyu, kecuali paganisme, lahir di luar area termaksud;

Kelima, agama wahyu timbul di daerah-daerah yang historis di bawah pengaruh ras Semitik, walaupun kemudian agama termaksud berhasil menyebar ke luar area pengaruh Semitik. Sebaliknya, agama bukan wahyu di luar area Semitik termasuk;

Keenam, sesuai dengan ajaran dan/atau historisnya maka agama wahyu adalah agama missionary. Agama bukan wahyu bukanlah agama missionary;

Ketujuh, ajaran agama wahyu tegas dan jelas. Agama bukan wahyu adalah kabur dan sangat elastik;

Kedelapan, ajaran agama wahyu memberikan arah dan jalanyang lengkap kepada para pemeluknya. Para pemeluknya berpegang, baik kepada aspek duniawi (the worldly) maupun aspek spiritual daripada hidup ini. Tidaklah demikian halnya dengan agama bukan wahyu. Taoisme menitik

⁴³ Ahmad Abdullah Al-Masdoosi, *Living Religions of the World; A Socio Political Study*, English Rendering by Zafar Ishaq Ansari, Begum Aisha Bawany Wakf, Karachi, 1962, h. 11.

beratkan kepada aspek hidup spiritual, sementara itu pada confusianisme lebih menekankan pada aspek duniawi.⁴⁴

2.4.2. Agama Missionary dan Agama non-Missionary

Sir Thomas Arnold dalam bukunya *The Preaching of Islam* antara lain menulis:

Ever since Profesor Max Muller delivered his lecture in Westminster Abbey, on the day of intercession for mission, in December 1873, it has been a literary common place, that the six great religions of the world may be divided into missionary and non missionary.⁴⁵

Sir T.W. Arnold memasukan Buddhisme, Kristen dan Islam pada golongan agama missionary. Sedangkan Yudaisme, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan pada golongan non missionary.

Sehubungan dengan masalah termaksud, Al-masdoosi antara lain memberi catatan, bahwa menurut pendapatnya: baik agama nasrani maupun Buddhisme, ditinjau dari segi ajarannya yang asli, bukanlah tergolong agama missionary, sebagaimana agama-agama lainnya (selain Islam). Jadi menurut kesimpulan Al-Masdoosi hanya Islam sajalah ajarannya yang asli merupakan agama missionary. Namun dalam perkembangan ternyata kemudian bahwa baik agama nasrani maupun Buddhisme menjadi agama missionary.

2.4.3. Klasifikasi Rasial Geografikal

Ditinjau dari segi rasial dan geografikal agama-agama di dunia ini dapat dibagi atas:

- (1) Semitik;
- (2) Arya; dan
- (3) Monggolian.

Yang termasuk agama semitik ialah: agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Sedangkan yang tergolong agama bukan Semitik, Arya ialah: Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroasterianisme. Sedangkan yang tergolong non Semitik Monggolian ialah: Confusianisme, Taoisme dan shintoisme. “adapun Buddhisme”, menurut Al-Masdoosi, “tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam golongan agama non Semitik Arya, tetapi merupakan campuran antara Arya dan Monggolian.”⁴⁶

⁴⁴ Ibid, h. 11-12.

⁴⁵ Ibid, h. 16.

⁴⁶ Ibid, h. 19.

2.4.3. Agama Samawi dan Agama bukan Samawi

Dari uraian-uraian dalam fasal-fasal yang terdahulu antara lain dapat kita simpulkan, bahwa: Pertama, agama adalah satu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kedua, di samping itu agama adalah juga satu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu. Ketiga, di samping merupakan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas.

Ditinjau dari segi sumbernya, maka agama (tata keimanan, tata peribadatan dan tata aturan) itu dapat dibeda-bedakan atas dua bagian: Pertama, agama Samawi (agama langit, agama wahyu, agama profetis, revealed religion, Din-as-Samawi). Kedua, agama budaya (agama bumi, agama filsafat, agama ra'yu, non-revealed religion, natural religion, Din-at-Thabi'l, Din al-Ardhi). Yang termasuk agama Samawi hanyalah Islam.⁴⁷ Sedangkan selebihnya, kecuali agama Nasrani dan agama Yahudi, termasuk agama budaya.

2.5. Agama Islam Satu-Satunya Agama Samawi

Di dalam konsep teoritis sebelumnya, dalam membicarakan "klasifikasi Agama" telah disinggung, bahwa Islam adalah satu-satunya agama Samawi.

Bagaimana dengan halnya agama Nasrani dan agama Yahudi dalam bentuknya yang murni? Kedua agama tersebut dalam bentuknya yang asli tentu saja adalah agama murni samawi. Dan oleh karena itu, kedua agama termaksud dalam bentuknya yang murni menurut isi kandungan al-Qur'an adalah Islam. Bahkan menurut al-Qur'an agama yang dianut oleh semua Nabi-nabi Allah SWT. Itu seluruhnya adalah agama Islam.⁴⁸

Allah SWT. Berkenan bersabda kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya". (Q.S. Al-Baqarah ayat 136).

⁴⁷ Lihat umpamanya O. Hashem, Pembahasan Ilmiah tentang Keesaan Tuhan, Penerbit Japi, Surabaya, 1964.

⁴⁸ Abdullah Draz, "Asal-Usul Islam" dalam Kenneth W. Morgan, Islam Jalan Mutlak, jilid I, terjemahan Abusalamah dan Chaidir Anwar, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1963, h. 1-39.

Nabi Nuh A.S. berkata:

(Q.S. Yunus ayat 72). "Jika kamu berpaling (dari peringatanku), Aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan Aku disuruh supaya Aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)".

Di dalam Al-Qur'an tercatat mengenai Nabi Ibrahim A.S. sebagai berikut:

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami Telah memilihnya,⁴⁹ di dunia dan Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. Al-baqarah ayat 130).

"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".(Q.S. Al-Baqarah ayat 131)

Nabi Yusuf berkata kepada Rabbnya!

"Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau Telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan Telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah Aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah Aku dengan orang-orang yang saleh.(Q.S. Yusuf ayat 101).

Nabi Musa A.S. berkata kepada kaumnya:

"Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, Maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." (Q.S. Yunus ayat 84).

Tentang pri-keadaan Nabi Isa A.S. Al-Qur'an antara lain mencatat:

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri". (Q.S. Ali Imran ayat 52).

Selanjutnya Allah SWT. Berkenan mengutus Rasul-Nya, menutup para Rasul Allah yang terdahulu itu. Allah SWT. Berkenan bersabda kepada Muhammad Rasul Allah itu:

"Sesungguhnya kami Telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami Telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami Telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun

⁴⁹di antaranya menjadi; Imam, rasul, banyak keturunannya yang menjadi nabi, diberi gelar khalilullah.

dan Sulaiman. dan kami berikan Zabur kepada Daud”. (Q.S. An-Nisa ayat 163).

“Dan (Kami Telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh Telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah Telah berbicara kepada Musa dengan langsung.⁵⁰ (q.S. An-Nisa ayat 164).

“(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa ayat 165).

Dari rangkaian ayat-ayat termaktub dan termaksud di atas maka jelas dan tegaslah sudah, bahwa menurut al-Qur’an Islam adalah satu-satunya agama murni Samawi, sepanjang masa dan setiap persada.⁵¹

⁵⁰ Allah berbicara langsung dengan nabi Musa a.s. merupakan keistimewaan nabi Musa a.s., dan karena nabi Musa a.s. disebut: Kalimullah sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. dalam pada itu nabi Muhammad s.a.w. pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu Mi'raj.

⁵¹ Afif Abdu 'L-Fatah Thabarah, Ruhul 'd-Dini 'l-Islami, at-Thab'atu 's-Sabi'ah, Damascus, 1376 H. (1966 M.) h. 17-18.

BAB III

KEADAAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG

3.1. Keadaan Wilayah Penelitian

3.1.1 Letak Wilayah dan Keadaan Geografis

Kecamatan Cikancung merupakan salah satu dari 37 kecamatan yang ada dibawah pemerintahan kabupaten DT. II Bandung. Secara geografis terletak diantara 7° LS – $7^{\circ} 46'30''$ LS dan $0^{\circ} 30'$ BT- $1^{\circ} 20'$ BT (Busur $0^{\circ} 0'0''$ adalah ibu kota negara, Jakarta). Secara fisik ibukota ini memanjang dari arah Barat ke Timur seperti bentuk kepala anak panah, landai, sesuai dengan keadaan alamnya yang berada dikaki gunung. Bentuk wilayah kecamatan ini 25% datar sampai berombak, 75% berombak sampai berbukit (Monografi Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, 2013). Secara umum Kecamatan Cikancung beriklim sedang, dengan suhu rata-rata antara 18° C- 23° dan curah hujan rata-rata 2.676 mm/tahun.

Luas wilayah Kecamatan Cikancung adalah 7.997.081 ha, terdiri atas 2.645 ha tanah pesawahan, 3.515 ha tanah kering, 82.081 ha tanah basah, 1.472 ha tanah hutan, 62 ha tanah keperluan fasilitas umum, dan 276 ha tanah tandus dan tanah pasir (Monografi Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, 2013). Tanah pesawahan meliputi 931 ha irigasi teknis, 45 ha irigasi setengah teknis, dan 1.669 ha irigasi sederhana. Tanah kering meliputi 461 ha pemukiman penduduk dan pekarangan, dan 5.054 ha tegal dan kebun rakyat. Sedangkan tanah basah seluruhnya 823 ha berupa kolam dan empang rakyat. Ketinggian kecamatan itu berkisar antara 900-1000 meter di atas permukaan laut. Topografinya yang landai, dari Barat ke Timur dan tersedianya sumber air yang memadai, memungkinkan para petani mengerjakan sawah yang dapat ditanami sepanjang tahun. Disamping itu para petani bisa mengembangkan usaha perikanan darat, baik di kolam yang tersedia maupun pesawahan yang pada umumnya dikerjakan pada saat sesudah musim tanam menjelang pada berisi (pare reuneuh). Wilayah Kecamatan Cikancung di sebuah utara berbatasan dengan Kecamatan Rancaekek. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cicalengka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paseh. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten DT II Bandung. Pusat pemerintahan kecamatan berada di sebelah Timur pada jarak 39 km dari ibu kota kabupaten. Dilewati jalan raya beraspal yang menghubungkan kecamatan Nagreg dan kecamatan Cicalengka dengan ibukota kabupaten. Kecamatan Cikancung meliputi 9 desa yang terdiri dari 20 lingkungan atau Dusun, 76 Rukun Warga (RW), dan 229 Rukun Tetangga (RT). Dari 9 Desa itu 5 desa berstatus Desa Swasembada dan 1 desa berstatus Desa Swakarsa. Desa yang terjauh berjarak 9 km dari ibukota kecamatan. Walaupun medan

wilayah kecamatan Cikancung 75% berombak dan berbukit, namun sarana transportasi seperti jalan dan jembatan cukup baik dan terpelihara, bahkan dari seluruh jalan yang ada ((81 km) sekitar 60% telah diaspal dan diperkeras, sehingga hubungan antar ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan di antara desa dengan desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikancung sudah cukup lancar. Sarana umum yang digunakan disamping kendaraan beroda empat, juga digunakan sepeda motor (ojek) dan delman.

3.1.2 Penduduk

1) Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung pada tahun 2013 seluruhnya berjumlah 20.595 Kepala Keluarga (KK), meliputi 84.553 orang, terdiri dari 40.150 (47, 49%) laki-laki dan 44.403 (52,51%) perempuan. Hal ini menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kecamatan Cikancung adalah $40.150/44.403 \times 100 = 90,42$, dan tiap umpi rata-rata dihuni oleh 4,11 orang. Penyebaran penduduk tergolong merata, yang tampak dari perbandingan jumlah penduduk antara desa yang terdapat penduduknya yaitu desa Cikancung dengan desa yang paling sedikit penduduknya yaitu desa Mandalasari yakni 5.588: 2.816 orang kepadatan Kecamatan Cikancung cukup tinggi, yaitu 1.150 orang setiap kilometer persegi. Angka itu lebih tinggi dari kepadatan penduduk Kabupaten Daerah TK II Bandung dan Pulau Jawa, yang pada tahun 2011 sebanyak 565 orang dan 814 orang tiap kilometer persegi 9Biro Statistik Kabupaten daerah Tingkat II Bandung, 2013.

Adapun komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung, Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2012/2013

| No. | Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 0 – 4 | 6.678 | 6.986 | 13.664 |
| 2 | 5 – 9 | 7.200 | 7.240 | 14.440 |
| 3 | 10 – 14 | 6.198 | 6.252 | 12.450 |
| 4 | 15 -19 | 3.150 | 3.699 | 6.849 |
| 5 | 20 – 24 | 2.854 | 3.499 | 6.353 |
| 6 | 25 – 29 | 2.577 | 3.033 | 5.610 |
| 7 | 30 – 34 | 2.368 | 2.872 | 5.240 |
| 8 | 35 – 39 | 2.242 | 2.703 | 4.945 |
| 9 | 40 – 44 | 2.031 | 2.372 | 4.403 |
| 10 | 45 – 49 | 1.721 | 2.023 | 3.753 |
| 11 | 50 – 54 | 1.365 | 1.612 | 2.987 |
| 12 | 55 – 59 | 834 | 1.007 | 1.841 |
| 13 | 60 – 64 | 506 | 593 | 1.099 |
| 14 | 65 | 424 | 502 | 926 |
| Jumlah | | 40.150 | 44.403 | 84.553 |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2013

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa rasio beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kecamatan Cikancung adalah $41.480/43.080 \times 100 = 96,29$. Penduduk usia 5-9 tahun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia 0-4 tahun, hal ini berarti bahwa di Kecamatan Cikancung pada tahun 2013 telah terjadi penurunan tingkat kelahiran cukup besar yang diikuti tingkat kematian cukup rendah. Hal ini dimungkinkan, mengingat masyarakat sudah melaksanakan program keluarga berencana, disamping sudah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pemeliharaan kesehatan serta adanya peningkatan pengetahuan masyarakat pada umumnya.

2) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk yang pokok di bidang pertanian. Sesuai dengan keadaan alamnya yang landai dan pada umumnya bergelombang serta berbukit, usaha pertanian terutama dilakukan di tanah pertanian kering (3.515 ha) dengan tanaman utama sayur mayur, dan lain-lain, sedangkan usaha pertanian sawah menempati urutan kedua (2.645 ha) (Monografi Kecamatan Cikancung, 2012). Dari jumlah petani sebanyak 29.330 orang, petani pemilik tanah berjumlah 4.270 orang dengan rata-rata memiliki tanah hanya 0,4 ha, sedangkan sisanya 8.560 orang merupakan petani penggarap, dan 16.500 orang atau 56,27% dari seluruh petani yang ada di kecamatan ini merupakan buruh tani. Usaha perternakan sebagai mata pencaharian, menempati urutan ke tiga dengan jumlah peternak sebanyak 7.664 orang. Perternakan domba pada umumnya dilakukan turunturun, dan perternakan

ayam merupakan usaha peternakan paling banyak dilakukan. Dari jumlah peternak sebanyak 7.664 orang itu, sebanyak 6.472 orang atau 84,44% merupakan peternak domba dan ayam. Disamping itu, sebanyak 5.260 orang bermata pencaharian sebagai pedagang, terutama pedagang hasil bumi, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. (Monografi Kecamatan Cikancung, 2012). Selain itu, jasa angkutan, pengrajin, buruh (baik sebagai buruh industri, bangunan, pertambangan maupun perkebunan), Pegawai Negeri Sipil dan Swasta, dan TNI/POLRI merupakan mata pencaharian lain disamping pertanian, peternakan dan perdagangan. Jumlah mereka seluruhnya meliputi 2.870 orang. Untuk lebih jelasnya, komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Menurut Mata Pencaharian, Tahun 2012/2013

| No. | Mata Pencaharian | Banyaknya (Orang) | Persentase |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Petani | 29.330 | 64,62 |
| 2 | Peternak | 7.664 | 16,88 |
| 3 | Pedagang | 5.260 | 11,59 |
| 4 | Buruh (Di luar Pertanian) | 1.181 | 2,60 |
| 5 | Pengrajin/Industri Kecil | 553 | 1,22 |
| 6 | Jasa Angkutan | 369 | 0,81 |
| 7 | PNS/Swasta | 732 | 1,61 |
| 8 | TNI/POLRI | 35 | 0,08 |
| 9 | Pensiunan | 267 | 0,59 |
| Jumlah | | 45.391 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2013

3) Pendidikan

Lembaga pendidikan yang tersedia di Kecamatan Cikancung yang ada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) maupun Kementerian Agama (Kemendiknas), termasuk kategori lengkap untuk ukuran sebuah kecamatan. Di kecamatan itu tersedia Taman kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), juga tersedia *Raudatul Athfal* (RA), Madrasah Diniyah (MD), Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Rincian keadaan lembaga pendidikan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Disamping lembaga pendidikan tersebut terdapat pula 31 pesantren tersebar di 8 desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Cikancung dengan jumlah santri sebanyak 3.668 orang, dan 385 *Majlis Ta'lim* yang menyelenggarakan pengajian rutin. Pengajian ini pada umumnya

diselenggarakan sesudah sholat Zhuhur (antara jam 13.00 – 15.00) dan shalat Isya (antara jam 19.00 – 21.00). Tersebarinya pelbagai lembaga pendidikan agama itu antara lain berpengaruh terhadap kecenderungan pemilihan jenis sekolah, yang biasanya “hampir” seimbang antara mereka yang memilih sekoalh umum dengan sekolah agama. Keadaan itu menunjukkan betapa kuatnya agama di lingkungan masyarakat kecamatan itu.

Tabel 3: Komposisi Lembaga Pendidikan (Dibawah Kemdiknas) Kecamatan Cikancung, Bandung, Tahun 2011/R: Kantor Kemdinas Kecamatan Cikancung, Bandung, 2013.

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Bangunan | Banyaknya | |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Murid | Persentase |
| 1 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 3 | 75 | 0,45 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 64 | 15.420 | 92,51 |
| 3 | SMTP: Negeri | 1 | 780 | 4,68 |
| | Swasta | 2 | 333 | 1,20 |
| 4 | SMA swasta | 1 | 40 | 0,24 |
| Jumlah | | 71 | 16.668 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2013

Tabel 4: Komposisi Lembaga pendidikan (Di Bawah Kemenag) Kecamatan Cikancung, Bandung, Tahun 2012/2013

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Bangunan | Banyaknya | |
|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Murid | Persentase |
| 1 | Raudathul Athfal (RA) | 1 | 30 | 0,27 |
| 2 | Madrasah Diniyah (MD) | 97 | 9.992 | 88,54 |
| 3 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 4 | 675 | 5,98 |
| 4 | Madrasah Tsanawiyah | 3 | 402 | 3,56 |
| 5 | Madrasah Aliyah | 2 | 186 | 1,65 |
| Jumlah | | 71 | 11.285 | 100,00 |

Sumber: Kantor Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cikancung, Bandung, 2013

Adapun tingkat pendidikan yang dicapai oleh rata-rata penduduk Kecamatan Cikancung tertera pada tabel 5 berikut.

Tabel 5: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung, Bandung Menurut Pendidikan, Tahun 2012/2013

| No. | Jenis Pendidikan | Banyaknya | | Jumlah | Persentase |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | Belum Sekolah | 9.984 | 10.013 | 19.441 | 35,70 |
| 2 | Tidak Tamat Sekolah | 1.475 | 978 | 2.453 | 4,50 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 12.930 | 10.685 | 23.615 | 43,36 |
| 4 | Tamat SLTP/Sederajat | 3.408 | 1.947 | 5.355 | 9,83 |
| 5 | Tamat SLTA/Sederajat | 1.605 | 1.301 | 2.906 | 5,33 |
| 6 | Tamat | 51 | 18 | 69 | 0,13 |
| 7 | Akademik/Sederajat | 53 | 13 | 66 | 0,12 |
| 8 | Tamat Perguruan Tinggi Program PLS | - | - | - | - |
| Jumlah | | 29.506 | 24.955 | 54.461 | 100,00 |

Sumber: Kantor kecamatan Cikancung, Bandung, 2013

Merka yang tidak tamat sekolah (putus sekolah) masih cukup tinggi (4,50%) namun kalau dibandingkan dengan sebelum tahun 2011/2012 cenderung ada penurunan cukup tajam. Penduduk yang buta huruf (latin) tercatat ada 1012 orang, rata-rata berumur di atas 50 tahun, sedangkan jumlah pencari kerja tetap tercatat sebanyak 12.080 orang, terdiri dari 9.748 laki-laki dan 2.332 perempuan atau sebanyak 22,18% dari jumlah penduduk Kecamatan Cikancung.

4) Agama

Penduduk kecamatan Cikancung adalah suku sunda yang umumnya beragama Islam. Data monografi kecamatan menunjukkan bahwa mereka yang beragama Islam sebanyak 84.225 orang (99,61%), sedangkan sisanya sebanyak 328 orang (0,39%) tercatat sebagai penganut aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Monografi kecamatan Cikancung, 2013). Mereka terdiri dari satu keluarga pensiunan polisi kecamatan, satu keluarga sopir angkutan umum, satu keluarga pedagang, dan yang lainnya merupakan keluarga petani penggarap dan buruh tani.

Kegiatan keagamaan umumnya dipusatkan di mesjid, langgar ataupun musholla. Di kecamatan Cikancung tercatat ada 549 sarana peribadatan, terdiri dari 224 mesjid jami dan 324 langgar atau musholla (Kantor KUA Kecamatan Cikancung, 2013).

3.2. Kepemimpinan Masyarakat

3.2.1 Satuan Sosial

Di wilayah kecamatan Cikancung, terdapat dua tipe satuan sosial yang mempunyai ciri tersendiri, tetapi dalam pelbagai hal memiliki kesamaan. Satuan sosial yang pertama didasarkan atas prinsip teritorial atau kesamaan tempat tinggal yang dibatasi oleh satuan wilayah tertentu. Satuan wilayah itu tersusun secara hirarki mulai dari kecamatan, desa, lingkungan (dusun), Rukun warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Kesatuan wilayah itu merupakan wilayah administratif (penyelenggara pemerintahan) yang dipimpin seorang camat sebagai kepala wilayah.

Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya untuk mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan). Kedua, satuan jama'ah yang terbentuk atas dasar afiliasi dan kegiatan keagamaan, yaitu jama'ah masjid dan jama'ah musholla atau jama'ah surau (langgar). Satuan jama'ah itu dapat dikategorikan sebagai sebagai satuan sosial yang didasarkan atas prinsip kepentingan dan kegiatan khusus. Krech (1962: 105); Cohen dan Uphoff, (dalam Ndraha 1986: 5.20) mengemukakan bahwa tipe satuan sosial ini merupakan organisasi lokal (local organization). Menurut Esman (1982: IX), organisasi lokal sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah (grassroots organization) dapat: (1) membantu mengembangkan komunikasi timbal balik antar berbagai pihak; (2) dijadikan sarana untuk menggerakkan dan mendorong perubahan perilaku; dan (3) memudahkan pemberian fasilitas dan pelayanan administratif kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan kedua tipe satuan sosial itu berhubungan erat dengan kepemimpinan masyarakat, peranan, dan cakupan pembangunan.

Pembangunan wilayah Desa, Lingkungan (dusun), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di kecamatan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk atau jumlah umpi (kepala keluarga) dalam suatu lokasi pemukiman, dan keadaan lingkungan fisiknya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tiap RT maksimal terdiri atas 30 umpi dan tiap RW maksimal terdiri dari lima RT. Karena itu dalam pembagian wilayah tersebut sering terjadi penggabungan satuan sosial "leumbur" yang terlalu kecil, atau pemecahan satuan sosial "leumbur" yang dianggap terlalu besar. Pembagian itu tidak didasarkan atas aspek identitas hubungan sosial, tetapi lebih mengutamakan aspek kuantitas satuan masyarakat.

Pembagian wilayah itu, diikuti dengan pengangkatan kepala wilayah yang merupakan penyelenggara dan penanggung jawab dibidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Karena itu satuan wilayah dapat dipandang sebagai satuan administratif yang menjadi wahana penyampaian informasi dan intruksi pemerintah dalam kegiatan pembangunan jalur atas. Sebaliknya dapat juga dijadikan wahana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalur bawah. Kepala wilayah mempunyai posisi ganda yang strategis yaitu sebagai pemimpin dan bagian integral dari masyarakatnya, dan sebagai nagian dari pemerintah. Namun demikian pada kenyataannya sering tidak dapat berjalan, karena pemimpin wilayah itu tidak memiliki tenaga dan media yang memadai untuk melaksanakan fungsinya.

Satuan jama'ah diikat oleh ajaran agama Islam yang diwujudkan dalam kegiatan upacara peribadatan sosial keagamaan. Satuan jama'ah itu tidak memiliki batasan sosial jelas, walaupun identik dengan satuan wilayah tertentu, misalnya, satuan jama'ah musholla disebut jama'ah musholla Rt tertentu. Ketidakjelasan "batas fisik" satuan jama'ah itu, karena pada dasarnya satuan tersebut adalah "komunitas spiritual" yang anti struktur.

Dalam pembentukan dan pengembangan satuan jama'ah itu mesjid menempati posisi pusat kegiatan keagamaan bagi anggotanya di kampung tempat mesjid berada dan kampung-kampung sekitarnya, sedangkan musholla sebagai subordinasi pusat kegiatan itu. Pengorganisasian kegiatan keagamaan pada masing-masing mesjid ditangani oleh Dewan Keluarga mesjid (DKM), sedangkan di lingkungan musholla ditangani oleh panitia tetap yang dibentuk secara sederhana. Di dalam DKM duduk tokoh-tokoh pelbagai golongan masyarakat, seperti ajengan, tokoh pemuda, aparat pemerintahan desa, orng kaya dan tokoh wanita.

Dewan Keluarga mesjid dan pengurus tetap musholla menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin, memelihara mesjid sebagai tempat ibadah dan juga mengadakan hubungan antar jama'ah dalam kegiatan tertentu. Disamping itu mereka melakukan pembangunan fisik dan atau merehabilisasi komplek mesjid atau musholla secara bertahap, dan menyelenggarakan kegiatan rintisan. Dengan demikian satuan jama'ah mesjid dan musholla dapat dilihat sebagai satuan pembangunan, yaitu khas pembangunan jalur bawah yang terletak pada cakupan jama'ah.

Dua tipe satuan sosial, satuan wilayah dan jama'ah itu mempunyai ciri yang berbeda, yang pada kenyataannya saling melengkapi dan menunjang. Kegiatan yang dilakukan dalam satuan wilayah itu membutuhkan dukungan pemimpin dan fasilitas yang dimiliki satuan jama'ah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam satuan jama'ah biasanya memanfaatkan wewenang kepala satuan wilayah; misalnya ketua RK atau RT biasanya menjadi salah satu unsur pelaksana dalam kegiatan yang dikordinasi pengurus Dewan keluarga mesjid.

3.2.2. Jenis pemimpin Masyarakat

Ada dua jenis kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat, dalam arti orang yang mampu mempengaruhi aktifitas kelompok, yaitu (1) pemimpin formal, yaitu pemimpin yang tampil atas penunjukkan atau pengangkatan atasan dalam suatu hirarki birokrasi (pemegang kekuasaan) untuk jangka waktu tertentu; (2) pemimpin informal, yaitu pemimpin yang tumbuh dan lahir dari anggota masyarakat sendiri. Perbedaan keduanya antara lain kepemimpinan informal didasarkan atas pengakuan masyarakat, cakupan pengaruhnya tidak dibatasi wilayah administratif dan jangka waktu tertentu. Tipe pemimpin tersebut ditemukan di setiap desa yang ada di wilayah kecamatan Cikancung. Perbedaan lain antara pemimpin formal dan informal adalah terletak pada jalur komunikasinya. Pemimpin formal mempunyai jalur vertikal, sedangkan jalur horisontal hampir-hampir tidak ada walaupun dalam konsepsi yang lazim, dikatakan bahwa desa adalah kelompok primer. Di lihat dari sudut komunikasinya, kelompok primer mempunyai hubungan timbal balik (Sastrodihardjo, 1987; 57).

Pemimpin formal terdiri dari aparat pemerintahan kecamatan, desa, dan pemimpin satuan kerja tertentu (instansi vertikal dan dinas daerah). Aparatur pemerintahan kecamatan terdiri atas Camat sebagai kepala wilayah, Sekwilmat, Mantri Polisi Kecamatan, dan Kepala-kepala Urusan. Sedangkan aparaturnya terdiri atas perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun), ketua Rukun Warga (RW), dan ketua Rukun Tetangga (RT). Kepala desa dan perangkatnya sebagai aparaturnya, ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung; sedangkan Ketua RW dan RT dipilih oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh masing-masing kepala desa.

Camat yang mewakili pemerintahan selaku kepala wilayah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan di wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Jadi camat selaku administrator (penguasa tunggal) sangat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayahnya, karena perencanaan dan pengendalian pembangunan desa ada dibawah pimpinannya.

Dalam posisinya sebagai penanggung jawab administrasi pemerintahan desa, kepala desa mempunyai fungsi ganda, diastu pihak sebagai alat pemerintah dan pihak lain mewakili masyarakat. Dengan komunikasi yang semakin intensif dengan dunia luar, fungsi ganda kepala desa atau lurah berkembang menjadi inter mediator yang berperan penting. Saluran kepemimpinannya selain melalui satuan pemerintahan desa, juga mulai organisasi yang dibentuk pada tingkat desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan melalui satuan-satuan wilayah dibawah desa

yaitu lingkungan (Dusun), RW, dan RT. Melalui aluran kepemimpinan itu interaksi dengan masyarakat dilakukan dalam kegiatan rutin pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan, baik pada jalur bawah maupun jalur atas.

Kepala lingkungan (Dusun), Ketua RW dan RT, seperti Kepala Desa, secara ideal berfungsi ganda. Di satu pihak mereka adalah aparat pemerintahan desa yang menuanikan tugas pemerintahan di wilayah kerja masing-masing, di lain pihak mereka adalah pemimpin masyarakat di wilayahnya, yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipimpinya. Fungsi pertama lebih menonjol daripada fungsi kedua, terutama dalam kegiatan pembangunan jalur atas, seperti pembinaan generasi muda melalui Karang Taruna dan pembinaan Keluarga Berencana. Hala itu berlangsung karena pengambil prakarsa untuk menyelenggarakan pembangunan adalah pemerintah (sesuai dengan surat Kemendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, 9 September 1983 No. 414.3/2814 bahwa perencanaan dan pengendalian pembangunan desa berada di bawah pimpinan Camat). Karena itu, dalam banyak hal mereka lebih menonjol sebagai “perpanjangan tangan pemerintah” atau sebagai saluran untuk bertindak (*line of action*) dari pada sebagai pemimpin masyarakat setempat.

Pemimpin informal, yang lebih dikenal sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, di kecamatan Cikancung cukup beragam. Di antara mereka, yang cukup menonjol pengaruh dan paling banyak jumlahnya, adalah pemimpin agama. Mereka adalah ulama yang di kecamatan itu lebih dikenal dengan *ajengan*. Mereka memiliki saluran kepemimpinan yang jelas dan mapan, yaitu melalui saluran jama'ah (mesjid, musholla dan majlis ta'lim), pesantren, dan madrasah. Di samping itu, media selamatan terutama yang berhubungan dengan peristiwa penting dalam daur hidup manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian juga adalah saluran yang boleh dikatakan menjadi “hak monopoli” mereka. Kepemimpinan ulama dalam satuan jama'ah itu tidak melalui proses pengangkatan, tetapi muncul melalui “proses penyaringan” secara terbuka tanpa mengalami hambatan struktural, seperti faktor keturunan, kekayaan, dan atau karir jabatan (formal). Kepemimpinan itu lahir karena di dukung oleh wibawa, karakteristik pribadi dan proses interaksi yang kontinu dan mendalam. Karakteristik pribadi mereka yang menonjol antara lain, adalah: (1) dominan dan menguasai ilmu agama yang memadai; (2) mampu mengamalkan ilmunya dalam memimpin pelbagai kegiatan keagamaan; dan (3) memiliki kepekaan yang tinggi serta bertingkah laku yang dapat dicontoh oleh masyarakat banyak. Interaksi mereka dengan para pengikut dilakukan melalui kegiatan jama'ah, mesjid, pesantren, dan pelbagai upacara (seperti dalam satuan keluarga) yang selalu diwarnai unsur-unsur keagamaan. Karena itu cakupan kepemimpinan mereka, di lingkungan kecamatan atau desa berbeda. Ada ajengan “tingkat”

musholla, ada ajengan “tingkat” mesjid, dan seterusnya. Dari kenyataan itu dapat diketahui pula siapa *ajengan* yang jangkauan pengaruhnya lebih luas dan menempati posisi yang penting di kalangan mereka, ataupun masyarakat.

Saluran kepemimpinan informal lainnya tidak begitu spesifik. Di kecamatan itu, tidak ditemukan satuan sosial atau pranata kemasyarakatan (diluar keluarga) yang cukup mapan dan memiliki daya ikat yang cukup kuat. Satuan ekonomi seperti arisan kurang terlihat, sedangkan usaha simpan pinjam (fasilitas perkereditan) walaupun ada, seperti Bimas, Inmas atau Insus tidak meluas. Di seluruh kecamatan hanya 141 orang saja yang memanfaatkannya, sedangkan kelompok tani seperti “kelompecapir” nampak kurang berkembang dan bergairah walaupun dikatakan mengalami kemacetan. Hal itu berhubungan dengan “pemikiran” bahwa kegiatan ekonomi, terutama kegiatan pertanian merupakan “kewajiban perseorangan”, karena itu tidak mendapatkan prioritas sebagai usaha bersama, hal itu tampaknya berhubungan pula dengan pola pemilikan lahan pertanian yang makin fragmentaris, sehingga para petani “bebas” menentukan masa tanam dan jenis tanaman yang dikehendaknya. Di dalam kegiatan pertanian ini, ditemukan hubungan “*dunungan pangebbon*” di kalangan petani kaya yang menyewa tanah kehutanan untuk menanam sayur mayur seperti kentang, juga hubungan “*dunungan panyawah*”, meskipun cenderung berkurang karena lahan pertanian semakin menyempit sedangkan pemilikinya makin bertambah dan beragam. Saluran lainnya, seperti organisasi politik, sebagai akibat kebijaksanaan massa mengambang (*floating mass*) (berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya), tidak tampak, karena organisasi politik terjun ke pedesaan hanya dalam masa kegiatan kampanye menjelang pemilihan umum saja. Hal itu terjadi karena kepemimpinan organisasi politik hanya sampai di ibu kota Daerah Tingkat II.

Saluran kepemimpinan informal itu dilakukan melalui interaksi dalam pelbagai kegiatan ketetanggaan, kekerabatan, keagamaan, dan hubungan kerja secara permanen. Karena itu satuan jama’ah juga menjadi saluran kepemimpinan informal, misalnya bagi tokoh-tokoh wanita yang aktif dalam “Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB” (UPPKA) yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif, untuk menambah (meningkatkan) pendapatan keluarga diantara para akseptor KB dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini khususnya untuk menumbuhkan dinamika kelompok diantara para peserta KB agar memantapkan kesertaannya dalam ber-KB. Namun pada kenyataannya kegiatan itu tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan, karena para akseptor KB yang terlibat di dalam kegiatan itu tampaknya “kurang siap” dan “kurang berkemampuan” dalam mekanisme kerja kelompok di dalam kegiatan usaha bersama sebagai sasaran.

3.3. Kegiatan Pembangunan

3.3.1 Bidang dan Sektor Pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan, pembangunan itu merupakan perwujudan interaksi sosial dalam bentuk kerja sama. Secara operasional pembangunan itu merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat dalam berbagai satuan sosial yang ada di dalam masyarakat, dilakukan secara dinamik dan berkelanjutan, berhubungan, serta terpadu dengan siklus kegiatan di dalam masyarakat. Secara konkrit pembangunan itu berupa proyek atau peristiwa pembangunan.

Kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan Kecamatan (UDKPK)⁵² untuk tahun anggaran 2011/2012 seperti tertuang Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) mencakup bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan yang terdiri dari bermacam-macam program pembangunan, meliputi 1.284 proyek (peristiwa) pembangunan. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu merupakan usaha penyediaan berbagai sarana kehidupan masyarakat, baik yang berupa pembangunan fisik maupun yang berupa pengorganisasian masyarakat. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai segi, sebagaimana tercermin dalam program pembangunan pada tabel Disamping itu ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dituangkan dalam RPTK, yaitu penyelenggaraan Zakat Fitrah, penyelenggaraan Qurban Hewan, penyantunan Anak Yatim, dan pembinaan Mental Keagamaan yang diselenggarakan oleh 31 pesantren dan 385 Majelis Ta'lim yang tersebar di seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan Cikancung.

⁵² Pada awalnya, cara pembangunan yang kini dikenal sebagai UDKP, disebut Daerah Kerja (DK) PMD (UU.85 Tahun 1958). Dalam DK PMD, gagasan PMD mengenai pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama, dicobakan. Dalam Pelita I, DK PMD diubah menjadi unit DK PMD (UDK PMD) dengan fungsi utama sebagai percontohan, dan titik beratnya masih pada PMD. Dalam Pelita II, UDK PMD diubah menjadi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDK P) dengan fungsi utama sebagai sistem akselerasi pencapaian Desa swasembada di bawah koordinasi Camat (UU.5 Tahun 1974). Sebutan PMD tidak digunakan lagi. Dalam Pelita III, nama UDKP tetap digunakan, tetapi fungsinya berubah menjadi sistem pembangunan wilayah (kecamatan) terpadu. (Mubyarto, 1984: 58). Jadi tekanan diletakkan pada wilayah kecamatan, bukan pada masing-masing desa. Dalam Pelita IV, UDKP diubah lagi menjadi UDKP kecamatan (UDKPK) dimana perencanaan dan pengendalian pembangunan desa berada di bawah pimpinan Camat (Surat Kemendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, Tanggal 9 september 1983 No. 414.3/2814).

Tabel 6: Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung Tahun Anggaran 2012/2013

| No. | Program Pembangunan | Banyaknya Peristiwa |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Intensifikasi Padi, Palawija, dan Sayuran (IPPS) | 24 |
| 2 | Demplot Padi sawah (DPS) | 2 |
| 3 | Penyuluhan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian (PPKP) | 4 |
| 4 | Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit (PPHP) | 24 |
| 5 | Sengonisasi Desa (SD) | 24 |
| 6 | Pembangunan Sarana Pengairan (PSP) | 24 |
| 7 | Kursus Tani bagi Pondok Pesantren (KTPP) | 4 |
| 8 | Pembangunan dam Air (PDA) | 10 |
| 9 | Intensifikasi Kolam dan Sawah Perikanan (IKSP) | 5 |
| 10 | Intensifikasi Kolam Desa Pembenihan (IKDP) | 3 |
| 11 | Intensifikasi Produksi Susu Sapi (IPSS) | 7 |
| 12 | Pengembangan Ternak Domba (PTD) | 4 |
| 13 | Demplot Rumput Ternak (DRT) | 4 |
| 14 | Tambahan Lokal Gedung SD | 7 |
| 15 | Rehabilitasi Gedung SD | 31 |
| 16 | Pembangunan Perumahan SD | 9 |
| 17 | Pembangunan Masjid Jami | 19 |
| 18 | Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah | 2 |
| 19 | Penyelenggaraan Zakat Fitrah | 416 |
| 20 | Penyelenggaraan Qurban Hewan | 205 |
| 21 | Pembinaan Mental Keagamaan | 416 |
| 22 | Penyantunan Anak Yatim | 2 |
| 23 | Pembangunan Gedung SLTP | 2 |
| 24 | Pembangunan Gedung SLTA | 1 |
| 25 | Pembangunan Jaringan Telepon | 1 |
| 26 | Penetrasi Jalan Pemulihan | 1 |
| 27 | Pengerasan Jalan Desa | 7 |
| 28 | Perluasan Terminal Angkutan Kecamatan | 1 |
| 29 | Pembangunan Jembatan | 1 |
| 30 | Rehabilitasi Pasar Kecamatan | 3 |
| 31 | Pengembangan Koprasi Unit Desa | 24 |
| 32 | Penyelenggaraan Kader kesehatan | 3 |
| 33 | Pembinaan Karang Taruna | 2 |
| 34 | Pembangunan Saluran Air Bersih | 1 |
| 35 | Pembangunan Pipa Air Bersih | 11 |
| 36 | Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu | 1 |
| 37 | Pembangunan Jamban Keluarga | 2 |
| 38 | Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah | 3 |
| 39 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu | 1 |
| 40 | Pembangunan Listrik Masuk Desa | 1 |
| 41 | Pembangunan Gedung kemantren | 1 |
| 42 | Pembinaan Pertahanan Sipil Desa | 24 |
| 43 | Pembangunan Kantor Desa | 4 |
| 44 | Dana Usaha Kesehatan masyarakat dan Dana Kematian | 22 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Jumlah Peristiwa Pembangunan | 1.384 |
|-------------------------------------|--------------|

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2013

Program-program pembangunan itu, dapat di kelompokkan ke dalam bidang dan sektor seperti terlihat pada tabel 7. Dari tabel itu dapat diketahui bahwa frekuensi pembangunan bidang ekonomi sebanyak 177 peristiwa, bidang sosial budaya sebanyak 1.178 peristiwa, bidang politik sebanyak 5 peristiwa dan bidang pertahanan keamanan sebanyak 24 peristiwa. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan di kecamatan itu adalah bidang sosial budaya terutama sektor keagamaan (76,59%) sedangkan pembangunan ekonomi menempati urutan kedelapan (12,79%).

Tabel 7: Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Cikancung, Pada masing-masing Bidang dan Sektor Pembangunan Tahun 2012/2013

| Bidang | Sektor | Program | Proyek/Peristiwa | |
|--|---|---|------------------|---------------|
| | | | Frekwensi | % |
| Ekonomi | Pertanian | IPPS, DPS, PPKP, PPHP, SD, PSP, KTPP, PDA | 116 | 8,38 |
| | | IKSP, IKDP | 8 | 0,58 |
| | Perikanan Perternakan Perhubungan | IPSS, PDG, DRT | 15 | 1,08 |
| | | PJT, PJP, PJD, PPJAK, PJ. | 13 | 0,94 |
| Sosial Budaya | Perdagangan Pendidikan | RPK, PKUD | 25 | 1,81 |
| | | TLGSD, RGSD, PPSD, PGS LTP, PGS LTA | 50 | 3,61 |
| | Keagamaan | PMJ, RGMI, PJF, PQH, PA Y, PMK. | 1.060 | 76,59 |
| | | PKK/KB, PJK, SPAL, RPP, DUKM, KM. | 51 | 3,68 |
| | Kesejahteraan Sosial | PKT, PPAB, PSAB, PLMD, P2LDT. | 17 | 22 |
| | | | | |
| Politik Pertahanan/Keamanan | Pemerintahan Keamanan | PGGK, PKD. | 5 | 0,36 |
| | | PPSD. | 24 | 1,73 |
| Jumlah Proyek/Peristiwa Pembangunan | | | 1.384 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2013

Pembangunan di bidang ekonomi tampak cukup beragam, baik yang

berbentuk pembangunan fisik maupun pengorganisasian masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi, Khususnya dengan usaha-usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang cukup menarik di bidang ekonomi ini (khusus di bidang peternakan) adalah pengembangan “Domba Rakyat”. Sebelum ini “Domba Rakyat” sebagai domba ras unggul, khususnya yang jantan, dikenal sebagai “Domba Adu” yang gagah dan mampu bertanding dengan baik dikembangkan dan dipelihara secara tradisional. Pada saat sekarang atas anjuran salah seorang ulama yang cukup terkenal di kecamatan Cikancung, pengembangan “Domba Adu” lebih diarahkan untuk kebutuhan pangsa pasar sebagai domba sayur khususnya untuk kebutuhan qurban pada setiap Hari raya Qurban (Idul Adha). Dengan dorongan itu, para peternak tampak bergairah untuk mengembangkannya, mengingat setiap menjelang Idul Adha harga domba jantan cukup tinggi. Saat ini di kecamatan Cikancung ada 2.219 peternak dengan bibit unggul ada sebanyak 9.098 ekor.

Dengan dilakukannya penetrasi dan pengerasan jalan di 7 desa sepanjang 16.200 KM, telah memperlancar kegiatan perekonomian dan hubungan antar desa dengan desa lainnya, serta antara desa dengan ibu kota kecamatan. Penetrasi dan pengerasan jalan itu hampir seluruhnya dilakukan dan dibiayai masyarakat secara swadaya, sisanya disamping subsidi dari pemerintah, untuk beberapa proyek mendapat bantuan dari pihak swasta dan TNI pada saat melakukan kegiatan “Bakti TNI” dan “TNI Masuk Desa” (TMD).

Sama halnya dengan pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya di kecamatan itu juga cukup beragam, baik yang berbentuk pembangunan fisik maupun pengorganisasian masyarakat. Dalam bidang sosial budaya itu, bahkan dalam pembangunan masyarakat pada umumnya, pembangunan sektor keagamaan, baik fisik maupun pembiayaannya, menempati posisi yang paling sentral. Perhatian, kesungguhan, dan kesediaan masyarakat untuk melakukan pembangunan keagamaan tampaknya erat hubungannya dengan pemikiran mereka, bahwa kegiatan itu merupakan kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Menurut mereka, beramal untuk agama akan mendapat pahala di akhirat nanti. Secara khas pemikiran yang memiliki makna (nilai) eskatologis itu, sering dikemukakan dalam percakapan sehari-hari dengan ungkapan “*itung-itung nyengcelengan, keur sampeureun jaga*”.

Sektor lain yang cukup berhasil dalam pembangunan bidang sosial-budaya, padahal pada tahun-tahun sebelumnya sulit untuk berkembang, adalah sektor kesehatan dan Keluarga Berencana. Jumlah akseptor yang terdaftar pada saat penelitian sebanyak 1.064 orang atau 78,55% dari sebanyak 13.067 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Walaupun masih ada 2.803 PUS (21,45%) yang belum terdaftar sebagai peserta keluarga

berencana, kecamatan Cikancung pada saat ini menempati urutan ke 13 dari 37 kecamatan yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Padahal pada tahun sebelumnya 2010/2011 masih menempati urutan ke 22. Menurut Camat selaku kepala wilayah, meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana karena ulama bersikap tidak menentang, bahkan pada langkah-langkah tertentu ikut terlibat dan memberikan kontribusinya untuk keberhasilan keluarga berencana, antara lain terlibat dalam setiap Rakor (Rapat Koordinasi) KB kecamatan dan dalam kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara teratur. Pendapat Camat itu menunjukkan bahwa ulama mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan masyarakat. Karena itu “restu” mereka yang mengacu pada norma-norma agama, mempengaruhi kesetaraan masyarakat dalam program keluarga berencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Cikancung masih bercorak “tradisional agamis”, karena itu peran pemikiran ulama di masyarakat sangat berpengaruh.

Pembangunan di bidang politik merupakan usaha untuk memperlancar jalannya pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu peranan pemerintah kecamatan yang mewakili tata institusional suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) memegang peranan sentral. Karena itu dengan makin bertambah jumlah penduduk dan makin kompleksnya usaha pembangunan, kecamatan Cikancung telah diputuskan untuk dipecah menjadi dua satuan wilayah administrasi yaitu kecamatan Cikancung dan kecamatan Cijapati. Berkaitan dengan itu, kegiatan pembangunan di bidang politik yang dilakukan (pada saat penelitian dilakukan) antara lain pembangunan gedung Kemantren Cijapati di atas tanah carik desa srirahayu seluas 90 M², atas prakarsa ulama setempat secara swadaya. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh “Badan Pelaksana Pembangunan Kemantren Cijapati” yang diketua kepala desa setempat. Gedung kemantren itu berada di pegunungan lingkungan wisata Cijapati, berjarak 14 KM arah selatan ibu kota kecamatan Cikancung. Selain pembangunan gedung kemantren, juga dilakukan pembangunan satu kantor desa baru yaitu kantor desa Cijapati. Di samping alasan keadaan penduduk yang makin bertambah serta makin kompleksnya usaha pembangunan, pemecahan (pemekaran) wilayah kecamatan Cikancung dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan alam dan keseimbangan antara organisasi dengan luas wilayah dan pelayanan.

Pembangunan di bidang keamanan adalah pembinaan pertahanan sipil desa. Kegiatan ini merupakan usaha lanjutan dari usaha penyediaan sarana fisik keamanan, sesuai dengan petunjuk dari “atas”. Pembinaan itu lebih menekankan kepada usaha peningkatan kawaspadan agar keamanan dan

kestabilan yang telah tercapai di desa-desa di seluruh wilayah kecamatan Cikancung dapat dipelihara dan dipertahankan.

3.3.2 Jalur-jalur Pembangunan

Prakarsa pembangunan bisa datang dari pemerintah, dari atas ke bawah (*top down*), juga bisa datang dari masyarakat, dari bawah ke atas (*bottom up*). Dengan demikian menurut jalurnya, pembangunan masyarakat desa bisa dikatakan terdiri atas pembangunan jalur atas dan pembangunan jalur bawah. Pada masing-masing jalur itu terdapat dua “model” pembangunan dengan karakteristik yang berbeda (lihat tabel 8).

Kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung 2011/2012 menunjukkan bahwa keempat model pembangunan itu dapat dibedakan dari unsur pemrakarsa, pengelola, dan pembiayaannya. Model pertama adalah pembangunan jalur atas yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai pemerintah, terdiri atas: Pembangunan Dam Air (PDA), Pembangunan Jembatan (PJ), Perluasan Terminal Angkutan Kecamatan (PTAK), Pembangunan Jaringan Telpn (PJT), Rehabilitasi Pasar Kecamatan (RPK), Rehabilitasi Gedung SD (RGSD), Pembangunan Perumahan SD (PPSD), Pembangunan Gedung SLTP dan SLTA (PGSLTP dan SLTA), dan Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah (RGMI). Model kedua, adalah pembangunan jalur atas yang diprakarsai pemerintah (atas dasar “usulan” masyarakat), dikelola pemerintah, dibiayai pemerintah, ditunjang oleh masyarakat.

Tabel 8: Frekwensi kegiatan pembangunan di Kecamatan Cikancung Menurut Jalur/Model dan Bidang/Sektor Pembangunan Tahun 2012/2013

| Jalur /Model Pembangunan | Atas | | Bawah | | Jumlah |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|--------|
| | Model | | Model | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ekonomi: | | | | | |
| (1) Pertanian | 10 | 28 | 48 | 30 | 116 |
| (2) Perikanan | - | - | 8 | - | 8 |
| (3) Peternakan | - | - | 7 | 8 | 15 |
| (4) Perhubungan | 2 | 4 | 7 | - | 13 |
| (5) Perdagangan | 1 | - | - | 24 | 25 |
| Sosial Budaya: | | | | | |
| (6) Pendidikan | | | | | |
| (7) Keagamaan | 50 | - | - | - | 50 |
| (8) Kesehatan/KB | - | 2 | 141 | 1.017 | 1.060 |
| (9) Kesejahteraan Sosial | 1 | 2 | 2 | 46 | 51 |
| | 1 | 12 | 5 | - | 17 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Politik: (10) Pemerintahan | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Pertahana Keamanan: (11) Keamanan | 65 | - | - | 24 | 24 |
| Jumlah | 65 | 51 | 119 | 1.149 | 1.384 |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2013

Kegiatan pembangunan “model” kedua, pada umumnya merupakan proyek inpres yang “dibantu” masyarakat, terdiri dari: Penyuluhan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian (PPKP), Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit (PPHP), Penetrasi Jalan Pemulihan (PJP), Pembangunan Pipa Air Bersih (PPAB), dan Pembangunan Kantor Desa (PKD). “Model” ketiga, adalah pembangunan jalur bawah yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai oleh masyarakat dengan mendapat bantuan dari pemerintah berupa subsidi atau biaya “rangsangan”. Pembangunan “model” tiga itu terdiri atas: Intensifikasi Padi, Palawija dan sayuran (IPPS), Intensifikasi kolam dan Sawah Perikanan (IKSP), Intensifikasi Kolam Desa Pembenihan (IKDP), Intensifikasi Susu Sapi (ISS), Pengerjaan Jalan Desa (PJD), Pembangunan mesjid Jami (PMJ), Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (PSPAL), Pembangunan Saluran Air Bersih (PSAB), Pembinaan Karang Taruna (PKT), Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), dan Pembangunan Kemantren Cijapati (PKC). “Model” keempat adalah pembangunan jalur bawah yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai oleh masyarakat (swadaya murni) terdiri dari: Demplot Padi sawah (DPS), Pengembangan Domba Rakyat (PDR), Demplot Rumput Ternak (DRT), Pengembangan Koperasi Unit Desa (PKUD), Pengembangan Zakat Fitrah (PZF), Penyelenggaraan Qurban Hewan (PQH), Pembinaan mental Keagamaan (PMK), dan Penyantunan Anak Yatim (PAY). Perincian kegiatan pembangunan pada empat “model” pembangunan itu secara lengkap (lihat tabel 8) menunjukkan bahwa dari 177 proyek pembangunan di bidang ekonomi (12,79% dari seluruh kegiatan pembangunan), 132 proyek (74,58%) merupakan prakarsa masyarakat (jalur bawah), 70 proyek (53,03%) diantaranya mendapat bantuan (subsidi) dari pemerintah. Sisanya sebanyak 45 proyek (25,42%) merupakan program yang diprakarsai oleh pemerintah (jalur atas), terdiri dari proyek pembangunan fisik sebanyak 13 proyek (28,89%) dan 32 proyek (71,11%) berupa pengorganisasian masyarakat (non- fisik).

Pembangunan bidang sosial-budaya menempati proporsi terbesar, meliputi 1.178 proyek (85,12%) dari seluruh kegiatan pembangunan. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan bidang sosial-budaya baik pada jalur atas maupun jalur bawah mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan

bidang lainnya. Dari 1.178 proyek itu, 1.060 proyek (89,98%) merupakan proyek sektor keagamaan, terutama pada jalur bawah tampaknya mendapat perhatian (prioritas) utama dibandingkan sektor lainnya.

Pembangunan di bidang politik dan pertahanan keamanan mendapat proporsi yang rendah, hanya meliputi 29 kegiatan atau 2,9% dari seluruh proyek, terdiri dari 5 (27,24%) proyek fisik dan 24 (80,76%) proyek non fisik berupa pengorganisasian masyarakat. Menurut Camat selaku kepala wilayah, hal ini terjadi mengingat pembangunan di bidang politik dan pertahanan keamanan secara vertikal sepenuhnya merupakan kebijakan dari atas (pusat).

Pengelolaan pembangunan yang mencakup pelbagai bidang pada kedua jalur itu dilakukan oleh beragam satuan pengelola pembangunan, yang sekaligus menjadi penanggungjawab atau pelaksana pembangunan. Satuan pengelola pembangunan itu ada dari pemerintah atau instansi tingkat kabupaten dan pemerintah desa, ada dari Majelis Ulama, pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM), pengurus majlis ta'lim, pimpinan pesantren dan madrasah serta kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan setempat. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa disamping pemerintah, di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi satuan pengelola pembangunan. Yang menarik adalah begitu menonjolnya organisasi-organisasi keagamaan terlibat dalam pelbagai kegiatan pembangunan, walaupun begitu pembangunan sektor keagamaan tampaknya tetap menempati posisi sentral dalam kegiatan pembangunan. Hal itu merupakan suatu indikator bahwa masyarakat kecamatan Cikancung memiliki animo yang cukup besar terhadap kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan sektor keagamaan, dan ini jelas merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang "masih" bercorak tradisional-agamis.

3.3.3 Dana Pembangunan

Dana pembangunan yang digunakan untuk setiap proyek pembangunan cukup beragam. Dana pembangunan fisik umumnya relatif cukup besar, sedangkan dana pembangunan non-fisik, yaitu pengorganisasian masyarakat, relatif kecil. Bahkan ada beberapa kegiatan pembangunan non-fisik yang tidak dapat diketahui berapa besar pendanaannya, seperti pembangunan mental keagamaan dan pembinaan pertahanan sipil desa.

Sumber pendanaan pembangunan berasal dari dua sumber, yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah berupa bantuan dari APBN, APBD I, APBD II, dan INPRES, sedangkan dari masyarakat berupa swadaya baik dalam bentuk uang, sumbangan natura berupa tanah atau barang lainnya seperti kayu, batu, semen dan lain-lain, serta bentuk tenaga, hususnya bagi mereka yang tidak mampu menyumbang dalam bentuk uang atau barang.

Pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan yang dikelola pemerintah setempat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pemungutan uang tunai sesuai dengan hasil musyawarah bersama pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dengan kegiatan pembangunan; keputusan pemungutan uang tunai itu, dilakukan pada forum koordinasi rapat mingguan kecamatan yang dilaksanakan pada setiap hari senin yang dihadiri kepala Desa atau Kelurahan dan Dinas yang ada di Kecamatan Cikancung; (2) Pengumpulan sumbangan natura dari warga masyarakat setempat berupa tanah, batu, pasir dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pengumpulan dana untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat sendiri lebih beragam jika dibandingkan dengan cara yang ditempuh untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sedikitnya ada lima cara, sebagai berikut: Pertama, pemungutan uang yang ditentukan jumlahnya untuk tiap satuan RT atau RW dengan memperhatikan umpi yang kaya dan miskin, dikumpulkan oleh para RT atau RW, atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. Cara yang pertama itu disebut “urunan desa”, besarnya ditentukan dalam musyawarah BPD. Sebagai anggota BPD, ulama terlibat langsung dalam penentuan “urunan desa” ini. Kedua, berupa dana keagamaan yang telah ditentukan bagiannya, seperti dari zakat fitrah dan zakat harta (mal). Ketiga, pemungutan infaq rutin melalui kenceng pangaosan di setiap majlis ta’lim yang menyelenggarakan pengajian, kenceng jum’atan disetiap mesjid yang menyelenggarakan sholat jum’at, dan jempitan (beas perelek) di setiap majlis ta’lim kaum wanita, serta gerakan pembinaan keluarga sejahtera. Keempat, diperoleh dari sumbangan “jariah” atau “titipan” dari mereka yang keadaan sosila ekonominya cukup baik. Baik yang tinggal di wilayah kecamatan Cikancung maupun di luar kecamatan Cikancung. Kelima, sumbangan dari warga masyarakat asal kecamatan Cikancung yang tinggal atau mencari nafkah di kota-kota besar dan cukup berhasil seperti di Jakarta atau bahkan di luar Negeri.

Pada cara pengumpulan dana jenis kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti cara pertama, ulama terlibat langsung, baik sebagai ketua Satgas Amilin Zakat, sebagai penyelenggara pengajian dan jum’atan, sebagai orang yang dipercaya para penyumbang “jariah”, maupun sebagai penanggung jawab sumbangan pembangunan dari para donatur warga kecamatan Cikancung yang tinggal atau mencari nafkah di kota-kota besar.

Gambaran rinci mengenai besarnya dana pembangunan pada setiap bidang dan sektor dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9: Frekwensi Peristiwa, Sumber dan Alokasi dana pada Masing-Masing Bidang/Sektor Pembangunan di Wilayah Kecamatan Cikancung tahun 2011/2012

| Dana Bidang/ Sektor Pembangunan | Proyek | | Pemerintah | | Masyarakat | | Ket. |
|--|--------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-------|--|
| | F | % | Rp. (Dalam Ratusan Ribu) | % | Rp. (Dalam Ratusan Ribu) | % | |
| Ekonomi: | | | | | | | |
| (1) Pertanian | 116 | 8,38 | 250,000 | 31,9 | 184,500 | 35,44 | *) Dana Pem bang unan tidak diket ahuai |
| (2) Perikanan | 8 | 0,58 | *) | - | 18,500 | 3,55 | |
| (3) Peternakan | 15 | 1,08 | *) | - | 17,000 | 3,27 | |
| (4) Perhubungan | 13 | 0,94 | 20,800 | 2,66 | 64,500 | 12,39 | |
| (5) Perdagangan/Koperasi | 25 | 1,81 | *) | - | 8,000 | 1,54 | |
| Sosial Budaya | | | | | | | |
| (6) Pendidikan | 50 | 3,61 | 449,112 | 57,4 | *) | - | |
| (7) Keagamaan | 1.060 | 76,59 | 27,500 | 3,51 | 176,385 | 33,88 | |
| (8) Kesehatan/KB | 51 | 3,68 | 1,400 | 0,18 | 12,290 | 2,48 | |
| (9) Kesejahteraan Sosial | 17 | 1,22 | 20,800 | 2,66 | 19,813 | 3,81 | |
| Politik | | | | | | | |
| (10) Pemerintahan | 5 | 0,36 | 13,000 | 1,66 | 19,000 | 3,65 | |
| Pertahanan Keamanan | | | | | | | |
| (11) Keamanan | 25 | 1,73 | *) | - | *) | - | |
| Jumlah | 1.384 | 100 | 782,612 | 100 | 520,618 | 100 | |

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2013

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden

4.1.1 Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan

1) Usia

Usia responden berkisar antara 30 sampai dengan 74 tahun, secara rinci responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10: Distribusi responden Menurut Usia

| Nomor | Usia | F | % |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 25 - 29 | - | - |
| 2 | 30 - 34 | 3 | 6 |
| 3 | 35 - 39 | 5 | 10 |
| 4 | 40 - 44 | 6 | 12 |
| 5 | 45 - 49 | 5 | 10 |
| 6 | 50 - 54 | 17 | 34 |
| 7 | 55 - 59 | 8 | 16 |
| 8 | 60 - 64 | 4 | 8 |
| 9 | 65 - 69 | 1 | 2 |
| 10 | 70 - 74 | 1 | 2 |
| 11 | 75 + | - | - |
| Jumlah | | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Sensus Lapangan, 2013

Dari latar belakang usia responden dapat diketahui bahwa penyebaran frekwensi responden relatif merata, walaupun responden yang berusia 50-54 tahun lebih banyak dibandingkan dengan tingkat usia responden di atas maupun di bawahnya. Hasil itu menunjukkan kecenderungan, bahwa mereka

memiliki wawasan dan bekal pengalaman yang relatif lebih banyak dalam melakukan interaksi dengan situasi masyarakat dan lingkungannya. Semua itu akan berpengaruh pula terhadap pembentukan “kepribadian” dan “kekuatan sosial”nya sebagai pemimpin. Dalam hal ini, French dan Raven (dalam Hadipranata, 1982) memberikan arti bahwa “kekuatan sosial” sebagai suatu pengaruh kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Sedangkan “kepribadian” menurut Allport (dalam Sumadi, 1982) adalah organisasi dinamik sistem psikofisik dalam individu yang memberikan corak yang khas dalam caranya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Faktor “kepribadian” seorang yang senantiasa mempengaruhi dan mengendalikan ini, sesuai dengan situasi, akan menambah keanggunan pemimpin, dan menambah kepercayaan para anggotanya (masyarakatnya).

2) Tingkat Pendidikan

Secara profesional, latar belakang responden hampir semuanya pernah mengikuti pendidikan di sekolah atau madrasah. Hanya seorang responden yang tak pernah mengecap pendidikan pesantren lebih dari 10 tahun. Sebagian besar dari mereka umumnya melanjutkan pendidikan lanjutan di madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah), dan Pendidikan Guru Agama (PGA 6 tahun). Tiga orang diantara mereka pernah mengikuti pendidikan agama sampai program sarjana, yang merupakan pendidikan formal tertinggi di kalangan mereka (responden). Mereka menempuh pendidikan formal agama rata-rata 11 tahun, melebihi rata-rata pendidikan pemimpin masyarakat desa lainnya di kecamatan Cikancung. Secara rinci keadaan pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 11.

Pendidikan dasar mereka proleh di desa mereka masing-masing, empat puluh responden di desa-desa wilayah kecamatan Cikancung, dan sembilan responden di desa-desa luar kecamatan Cikancung karena berasal dari luar kecamatan Cikancung. Sedangkan pendidikan menengah (tsanawiyah/SLTP, Aliyah/SLTA, dan PGA 6 tahun) umumnya diperoleh di ibu kota Kabupaten Bandung. Responden yang mengikuti pendidikan tinggi, dua orang lulusan Universitas Islam Negeri Bandung, satu orang lulusan Universitas Islam negeri Yogyakarta, sedangkan satu orang yang tidak tamat juga merupakan atau pernah mengikuti kuliah sampai tahun kedua di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Kabupaten Bandung.

Tabel 11: Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | F | % |
|-----|-----------------------------|----|----|
| 1 | Ibtidaiyah/SD Tidak Tamat | - | - |
| 2 | Ibtidaiyah/SD Tamat | 16 | 32 |
| 3 | Tsanawiyah/SLTP Tidak Tamat | 2 | 4 |

| | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| 4 | Tsanawiyah/SLTP Tamat | 7 | 14 |
| 5 | Aliyah/SLTA Tidak Tamat | 5 | 10 |
| 6 | Aliyah/SLTA Tamat | 2 | 4 |
| 7 | PGA 6 Tahun Tidak Tamat | 3 | 6 |
| 8 | PGA 6 Tahun Tamat | 10 | 20 |
| 9 | PT Agama Tidak Tamat | 1 | 2 |
| 10 | PT Agama Tamat | 3 | 6 |
| 11 | Pesantren | 1 | 2 |
| Jumlah | | 50 | 100 |

Sumber: Hasil Sensus Lapangan, 2013

Hampir seluruh responden pernah menempuh pendidikan pesantren, umumnya di pesantren di wilayah Kecamatan Cikancung. Mereka menempuh pendidikan pesantren rata-rata kurang lebih 6 (enam) tahun, terendah selama dua tahun dan tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun. Mereka yang menempuh pendidikan madrasah dan juga pesantren merupakan bagian terbesar (98%) dari seluruh responden.

Latar belakang pendidikan responden seperti itu sudah tentu merupakan modal utama yang mereka miliki untuk berbuat sesuai dengan peranannya dalam pelbagai kegiatan di masyarakat. Bobot pendidikan yang mereka dapatkan akan membentuk “kepribadian” mereka menjadi individu-individu yang senantiasa mampu mengendalikan kelompok sosialnya sesuai dengan situasi, sehingga akan menambah keanggunan dirinya sebagai pemimpin sebab “pengarahannya” akan menjadi lebih relevan dan menambah kepercayaan anggotanya (Levinger, 1972, dalam Hadipranata, 1982). Bobot pendidikan mereka itu, juga telah menjadikan norma-norma sebagai standar kelompok yang dipergunakan sebagai pegangan untuk bertindak dalam pelbagai kegiatan masyarakat (pembangunan), sehingga norma-norma agama itu memasyarakat menjadi “norma sosial” (harapan masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertindak) dan “nilai-nilai” (keteguhan pendirian tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan memperjuangkan cita-cita atau tujuannya) bagi masyarakat luas (Rokeach, 1973, dalam Hadipranata, 1982).

Yang cukup menarik dari mereka adalah kehausan akan informasi ilmu (agama) dan usaha untuk menjaga agar ilmu tetap segar dan aktual. Keadaan seperti itu tampak pada usaha mereka yang selalu berusaha menambah ilmu dengan menyelenggarakan pengajian khusus bagi lingkungan mereka, dengan mendatangkan ulama-ulama senior (ajengan yang dipandang sebagai “sesepuh” dan “guru” mereka). Ulama yang sering didatangkan antara lain: Ajengan pengasuh pondok pesantren “Sukahurip” dan “Al-falah” Cicalengka Bandung. Dari kecamatan Cikancung yang rutin diundang adalah ajengan pesantren Al-Jawami karena sebagian besar ajengan yang ada di kecamatan

Cikancung adalah alumnus pesantren ini. Mereka juga selalu mengikuti pengajian Kamisan yang diselenggarakan lembaga pendidikan “Asyahidiyah” Cicalengka yang selalu menampilkan K.H. Ahmad Syahid sebagai pembicara, yang menurut salah seorang responden merupakan ulama besar dan mempunyai pengaruh serta kharisma yang luas, unggul secara normal maupun sebagai seorang alim yang patut menjadi panutan.

Kegiatan yang dilakukan mereka itu menunjukkan beberapa ciri yang melekat pada diri mereka, antara lain (1) mereka memiliki kesadaran yang begitu tinggi untuk tetap menuntut ilmu sebagai upaya meningkatkan kemahiran mereka dalam memahami ajaran agama yang pernah dipelajari baik di madrasah, pesantren, maupun lembaga pendidikan lainnya. Kesadaran itu didasarkan atas suatu pemikiran, yang menurut mereka dirujuk dari salah satu hadis nabi yang sangat dikenal, bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang berakhir pada saat ajal tiba (sampai liang lahat). Pemikiran itu, bagi mereka menjadi salah satu dasar dalam usaha melanjutkan tradisi intelektual Islam yang diwariskan secara terus menerus melalui saluran madrasah, pesantren, dan kelompok-kelompok pengajian; (2) mata rantai intelektual antara guru dengan murid tetap terpelihara (Dhofier, 1982). Hal itu didasarkan pada suatu pemikiran, sebagai norma menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu, bahwa hubungan guru dan murid bagaikan hubungan antara bapak dengan anak. Perasaan hormat dan kepatuhan murid kepada gurunya berlaku seumur hidup. Melupakan ikatan dengan guru dianggap sebagai suatu aib besar, di samping akan menghilangkan *barakah* guru. Karena rasa hormat yang mutlak itu, pengalihan ilmu tidak hanya pada aspek kognisi semata, tetapi meliputi aspek sikap dan perilaku, sehingga kealiman, kesalihan, dan ketulusan merupakan sosok guru yang menjadi panutan; (3) tampak adanya suatu wujud komunitas yang begitu kohesif di kalangan mereka, yang menempatkan pesantren dan madrasah sebagai pusat orientasi kultural mereka. Komunitas itu menciptakan suatu hubungan yang begitu erat dikalangan mereka, baik dalam urusan mereka sendiri, maupun urusan kemasyarakatan yang lebih luas. Kenyataan seperti itu sudah tentu sangat menguntungkan dan merupakan modal utama bagi berhasilnya tujuan pembangunan. Di samping itu, komunitas ulama menumbuhkan penghargaan yang tinggi di kalangan masyarakat, terhadap ilmu agama. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan di kalangan masyarakat kecamatan Cikancung yang mempunyai kecenderungan pemilihan jenis sekolah yang hampir seimbang antara mereka yang memilih sekolah umum dan agama, sebagaimana telah dikemukakan (lihat Tabel 3 dan Tabel 4).

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh responden, maka dapat diasumsikan bahwa ulama di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, cukup mempunyai bekal semangat ilmu dan pengetahuan yang memadai

bagi melaksanakan peranannya sebagai pemimpin informal dalam pembangunan masyarakat desa.

3) Pekerjaan

Status pekerjaan responden sebagian besar (60%) adalah petani, kemudian sebagai pegawai negeri sipil (36%), dan sisanya (4%) berstatus sebagai pedagang. Mereka yang bekerja sebagai petani, umumnya melakukan kegiatan usaha tani padi di sawah, ada juga yang melakukan usaha tani di kebun, khususnya kebun sayur-mayur seperti kentang, ada juga khusus berkebun pohon usar (akar wangi). Di antaranya juga ada yang mengusahakan kolam pembibitan ikan, peternakan domba rakyat dan peternakan susu sapi, sebagai usaha lain disamping sebagai petani. Dua orang diantara responden yang berstatus pedagang merupakan pedagang sayur mayur ke pasar induk Caringin Bandung. Pada kenyataannya, mereka juga merupakan petani sayur yang merangkap sebagai pedagang. Taraf hidup mereka cukup beragam, umumnya berkecukupan (termasuk golongan masyarakat mampu) untuk ukuran pedesaan, bahkan ada diantaranya yang termasuk kelompok orang kaya di desanya.

Mereka yang menjadi pegawai negeri umumnya adalah guru agama. Empat orang diantaranya menduduki jabatan sebagai penilik pendidikan agama, tujuh orang masing-masing sebagai kepala madrasah (ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah), dua orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, masing-masing sebagai kepala dana wakil kepala KUA kecamatan Cikancung. Masa kerja mereka sebagai pegawai negeri sipil paling rendah selama 20 tahun dan yang paling tinggi selama 35 tahun. Mereka pada umumnya melakukan kegiatan usaha tani sebagai pencaharian tambahan. Salah seorang diantaranya diberi kepercayaan sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Cikancung. Menurut salah seorang tokoh kecamatan Cikancung, dipilihnya yang bersangkutan sebagai ketua, karena kejujurannya, terbuka dan sebagai panutan masyarakat, dengan demikian diharapkan mampu merekrut anggota lebih banyak lagi dan lancar dalam mengelola kegiatan sehari-hari. Taraf hidup mereka relatif berkecukupan. Rumah mereka umumnya cukup baik dan terawat, sebagian dari mereka memiliki kendaraan bermotor dan bahkan mampu menunaikan ibadah haji. Keadaan mereka yang rata-rata cukup mampu itu, memperkuat posisi mereka dalam melaksanakan perannya sebagai ulama di lingkungan masyarakat pada umumnya.

4.1.2 Ulama Sebagai Pemimpin

Ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat atau pemimpin informal dalam sebutan umum sering juga disebut pemimpin agama atau pemuka agama. Istilah lain disebut pemimpin agama atau pemuka agama.

Istilah lain yang juga biasa digunakan ialah pejabat agama. Karena itu ulama disamping diakui sebagai pemimpin simbolik yang mengabdikan sebagai fungsionaris agama (Hirokoshi, 1987: 36), dengan tugas mengajarkan seperangkat keyakinan agama, sistem nilai dan amal nyata kepada pemeluk agama Islam (Hirokoshi, 1987: 149). Juga dikenal sebagai pemimpin administratif bagi mereka yang mengisi pos-pos birokrasi yang berhubungan dengan ikhwal keagamaan.

Munculnya ulama sebagai pemimpin agama, tidak bisa lepas dari mekanisme kepemimpinan yang selalu ada dalam interaksi kelompok sosial. Karena itu bobot kepemimpinan ulama sangat ditentukan oleh situasi serta perilaku-prilaku: (1) bisa mengerahkan kegiatan pengikutnya; (2) memiliki kemampuan yang bisa diikuti; dan (3) cara kerjanya efektif (Gibb, dalam Hadipranata, 1982). Untuk perilaku pertama faktor kepribadian sangat menentukan dalam mengendalikan pengarahannya kegiatan anggota masyarakat; perilaku kedua mencerminkan kekuatan sosial seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengendalikan masyarakatnya, sedangkan untuk perilaku ketiga tercermin pada kemampuan pemimpin dalam merancang dan menjabarkan “program kerjanya” sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Semua perilaku itu (sebagai karakteristik pribadi), ditunjang kadar lebih dalam segi pengetahuan agama, dipunyai oleh ulama. Mereka menjadi tempat bertanya mengenai agama dan hidup beragama. Mereka adalah guru agama dengan beragam panggilan dan gelar kehormatan. Di kecamatan Cikancung, seperti juga di daerah Jawa Barat umumnya, mereka biasanya dipanggil *kyai* atau *ajengan*. Mereka biasanya merupakan “pemilik”, pemimpin, dan guru pesantren atau madrasah. Panggilan itu juga diberikan kepada para pemimpin dan pengajar agama di kelompok-kelompok pengajian (majlis ta’lim). Karena itu, peran mereka lebih menghujam ke dalam sistem sosial dan struktur masyarakat desa secara khas. Tidaklah berlebihan kalau Hirokoshi (1987) menyebut ulama sebagai pemangku mesjid dan madrasah, sebagai pengajar dan pendidik, serta sebagai ahli dan penguasa hukum Islam.

Panggilan *kyai* atau *ajengan* tidak hanya didasarkan pada pekerjaan pokok atau pekerjaan tambahan mereka sebagai pengajar agama, tetapi berkaitan dengan kepemimpinan mereka dalam pengelolaan dan kegiatan keagamaan. Mereka menempati kedudukan yang sentral, baik pada satuan jemaah mesjid maupun jemaah yang lebih kecil, seperti musholla. Panggilan ulama bukan karena mereka dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama, dan tidak pula diperoleh karena hasil pendidikan. Gelar ini diperoleh atas dasar penguasaan masyarakat, karena kealiman mereka, dan karena pelayanan serta pengaruhnya yang menguasai masyarakat. Pribadinya pandai menyesuaikan diri (adjusted), lebih dominan, lebih berorientasi ke luar (extrovert), dan memiliki kepekaan yang tinggi (high sensitivity)

dibandingkan dengan pemimpin yang ada dalam perangkat yang lebih rendah (Krench, 1992).

Secara umum gambaran itu tercermin dalam kegiatan mereka sehari-hari yang selalu berada di lingkungan masyarakat, baik sebagai pengajar agama, memimpin kegiatan peribadatan, memimpin upacara selamatan, memberi ceramah keagamaan, memberi bimbingan keagamaan dan bahkan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Disela-sela kegiatan mereka, baik sebagai pegawai negeri, petani, maupun pedagang, mereka umumnya mengajar agama di pelbagai kelompok pengajian yang diselenggarakan di mesjid, musholla, dan majlis ta'lim yang tersebar di pelbagai pelosok desa tempat tinggal mereka, di desa sekitarnya, bahkan di desa luar kecamatan Cikancung.

Pengajian, seperti telah dikemukakan, dilakukannya secara rutin yang dilaksanakan siang hari setelah shalat zhuhur atau malam hari setelah shalat isya. Lima orang di antara responden merupakan pendiri, pemimpin, dan guru pesantren. Hampir setiap waktu, mereka mengajar membekali santrinya dengan berbagai ilmu agama seperti tafsir al-Qur'an, hadis, tauhid, fiqh, dan akhlak yang umumnya bersumber dari "kitab kuning" (kitab berbahasa Arab tanpa syakal dan dicetak biasanya berwarna kuning). Selain itu seperti responden lainnya, mereka juga menyelenggarakan pengajian rutin bagi masyarakat sekitarnya.

Tersebarannya mereka ke pelbagai tempat pengajian secara rutin itu, memperkuat posisi mereka sebagai "guru" dan "panutan" bagi para pengikutnya. Menurut salah seorang responden, yang dilingkungannya cukup berpengaruh, kegiatan itu dilakukan sebagai penunaian kewajiban kolektif (*fard kifayah*) bagi ulama, yang memberikan jalan untuk penunaian kewajiban perseorangan (*fard 'ain*) bagi seluruh warga masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa, mengajak kepada kebaikan itu (*da'wa ila alkayr*) wajib hukumnya bagi kaum muslimin, seperti wajibnya menuntut ilmu sejak dari buaian sampai saatnya ajal tiba.

Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengajak kepada kebaikan dan kewajiban menuntut ilmu merupakan rujukan ulama di lingkungan kecamatan Cikancung dalam melakukan peranannya sebagai pengajar agama. Selain itu, dalam konteks kehidupan masyarakat, kegiatan pengajaran agama yang dilakukan melalui saluran madrasah, pesantren, dan majlis ta'lim, merupakan usaha sosialisasi ajaran agama Islam di masyarakat. Hal itu merupakan komponen penting di dalam satuan jamaah yang menjadi basis masyarakat Islam. Dengan perkataan lain madrasah, pesantren, dan majlis ta'lim, yang "diasuh" oleh ulama itu, merupakan pilar-pilar yang berdiri tegak di dalam pembangunan masyarakat Islam di kecamatan itu.

Dalam berbagai upacara peribadatan, ulama di kecamatan Cikancung itu juga tampil sebagai pemimpin, baik di lingkungan jamaah mesjid,

musholla ataupun langgar-langgar di sekitarnya, seperti dalam pelaksanaan shalat lima waktu. Mereka secara bergilir menjadi imam dan khatib dalam penunaian shalat jum'at. Namun demikian, tidak setiap ulama (terutama mereka yang masih muda) mendapat kesempatan yang sama dalam memimpin upacara peribadatan, terutama dalam lingkungan mesjid jami', karena cenderung dipegang ulama senior yang dianggap lebih relevan, lebih berbobot dan berkemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula untuk shalat *tarawih* (shalat malam yang dilakukan hanya pada bulan Ramadhan), dan shalat "idayn" (dua hari raya, yaitu 'idul fitri dan shalat 'idul adha) umumnya cenderung dilakukan ulama yang lebih senior. Data lapangan menunjukkan bahwa ulama yang menjadi imam shalat lima waktu dan atau shalat lainnya menurut kelompok umur adalah 30-39 tahun (37,5%), 40-49 tahun (63,7%), dan 50 tahun keatas (100%).

Ulama juga berperan sebagai pemimpin dalam berbagai upacara selamatan, di lingkungan masyarakat kecamatan Cikancung lebih dikenal dengan istilah *syukuran*, baik yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan jamaah, upacara syukuran itu umumnya diselenggarakan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, muludan, dan rajaban (peringatan maulid dan isra mi'raj nabi Muhammad S.A.W.) dan lainnya. Berperannya ulama dalam berbagai upacara itu lebih memperteguh kedudukan mereka sebagai pelindung dan sumber moral bagi masyarakatnya.

Pada umumnya (78%) ulama (responden) selalu melakukan pembinaan keagamaan dengan ceramah-ceramah keagamaan, yang lazim disebut *tabligh* dan *da'wah*. Ceramah itu umumnya berisi penyampaian dan ajakan kepada masyarakat untuk hidup beramal shaleh (melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat (balarea), dan bangsa, memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan titah-Nya. Kegiatan itu umumnya dilakukan berkenaan dengan peringatan hari-hari besar Islam seperti maulid dan isra mi'raj, pada milad (ulang tahun) majlis ta'lim atau institusi lainnya dan juga pada perayaan perkawinan (walimat al-nikah) serta perayaan khitanan (walimat al-khitan).

Ceramah keagamaan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pokok para ulama. Menurut beberapa orang diantara responden, kegiatan itu merupakan kewajiban kolektif (9 fard kifayah) yang harus ditunaikan. Hal itu antara lain didasarkan pada ajaran yang bersumber dari hadis nabi, yang menyatakan bahwa "sampaikanlah oleh kamu sekalian ajaran dari aku walaupun hanya satu ayat" (*ballighu 'anni wa law ayah*). Undangan ceramah tidak hanya datang dari masyarakat desa dimana mereka berada, namun juga datang dari masyarakat desa lainnya baik desa yang berada di kecamatan Cikancung maupun dari luar kecamatan itu. Kenyataan itu menunjukkan bahwa mereka umumnya mampu menembus "pasar" di luar wilayah desa

dan atau kecamatan mereka. Kegiatan lain yang juga biasa dilakukan ulama, terutama mereka yang dikategorikan ulama senior adalah memberikan bimbingan keagamaan (bimbingan hikmah), yang dilakukan secara sukarela, terutama menyangkut pemecahan masalah kesulitan hidup dan kehidupan, seperti masalah waris, masalah kesulitan rumah tangga, masalah persengketaan atau pertengkaran. Hala ini yang juga dikonsultasikan adalah menyangkut pemahaman dan pengamalan agama.

Hal lain yang tidak lepas dari kesaharian ulama adalah kiprahnya dalam memimpin berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pesantren, madrasah, majlis ta'lim, dewan keluarga mesjid, badan amal zakat, infaq dan sadaqoh, dan lain-lain. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, lembaga atau organisasi keagamaan itu merupakan satuan pengelola pembangunan terutama dalam sektor keagamaan dan pendidikan, yang memperkokoh kedudukan ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat desa yang mapan. Dalam organisasi kemasyarakatan, walaupun tampak belum merata, diantara mereka ada yang berkiprah dalam majlis ta'rif (semacam yayasan swadiri yang khusus mengelola "urusan" anak yatim), memimpin Koperasi Unit Desa (KUD), memimpin kontak tani, mengembangkan peternakan dan perikanan, terlibat langsung dalam pembangunan sarana ibadah, komunikasi antar desa (jalan) kantor desa dan kemandirian, dan seorang diantaranya berkiprah sebagai tokoh pemimpin pemuda.

4.2 Pemikiran Ulama Mengenai Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Masyarakat Desa

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana pemikiran ulama (responden) tentang pembangunan. Penulis menganggap perlu untuk mengetahui hal itu secara lebih mendasar, mengingat pemikiran itu merupakan pedoman atau patokan penilaian dalam melakukan perannya sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. Pemikiran itu juga berhubungan dengan pengalaman serta harapan mereka di dalam pergaulan hidup bersama; karena itu, apa yang diperbuat mereka sehari-hari merupakan gambaran nyata dari pemikirannya yang diyakini "wajib" untuk dilaksanakan baik oleh dirinya maupun masyarakat umumnya.

Ada dua aspek yang utama dalam pembangunan itu, yaitu (1) partisipasi atau dinamisme para pelaku; (2) pedoman nilai, dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Aspek pertama, menyangkut potensi dan kondisi manusia dalam menghadapi hidupnya. Dengan kata lain aspek ini bertalian dengan sikap pokok manusia terhadap diri mereka sendiri dan terhadap dunia sekeliling mereka, sebagaimana yang terpancar dari hidup dan kehidupannya. Ini yang oleh Geertz (1981) dinamakan sebagai etos atau

semangat. Aspek kedua, pada dasarnya berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia diliputi oleh keinginan atau nafsu yang sulit dikuasai tetapi perlu dikendalikan. Karena itu, maka setiap usaha meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketentraman hidup masyarakat, memerlukan sistem nilai sosial. Etika dan nilai baik-buruk ini amat sentral dalam menentukan arah tujuan, dan bahkan memberi batas terhadap gerak dalam masyarakat sehingga usaha tersebut tidak terjadi tanpa batas dan tanpa kendali. Ini yang oleh Goulet (1977) dinamakan sebagai etika atau moral pembangunan.

Dua aspek itu, etos kerja dan moral pembangunan di dalam sistem nilai ajaran agama Islam merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan saling memberi warna.

Konsep pembangunan dalam agama Islam bersifat menyeluruh dan utuh (ka'ffah). Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Islam, lebih menyentuk ke dalam, menghujam pada pokok persoalan yang hakiki.

“Bagi Islam, pembangunan yang dilakukan oleh manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama yaitu kesejahteraan umat”. Demikian kata salah seorang (responden), berumur sekitar setengah abad dan pernah mengeyam pendidikan tinggi, mengawali pembicaraannya tentang pemikiran mereka mengenai pembangunan. Karena itu beliau melanjutkan pembicaraannya “paling tidak ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan yaitu: (1) *Tauhid*, ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. (2) *Rubbiyyah*, ajaran ini merupakan ketentuan Allah mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian hidup bersama. (3) *Khilafah*, (fungsi manusia sebagai khalifah di bumi) ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai pengemban jabatan-jabatan khalifah itu. (4) *Tazkiyah*, (penyucian dan pengembangan), artinya tugas manusia adalah penyucian dan pengembangan dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, sesama masyarakat serta wilayah negaranya. Dengan landasan itu, maka tujuan utama pembangunan mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang. Dinamika pembangunan menurut konsep Islam mengarah kepada kesadaran, bahwa pembangunan akan berhasil bila melibatkan keyakinan dan keikutsertaan seluruh ummat (masyarakat), yang menjadi tujuan dan sekaligus pelaku dalam pembangunan”.

Pendapat *ajengan* itu paling tidak mewakili gambaran ulama di kecamatan Cikancung tentang bagaimana pemikiran mereka tentang pembangunan, dan bagaimana pembangunan itu harus dilakukan, dan bagaimana kedudukan manusia di dalam pembangunan itu. Pemikiran itu

menunjukkan bahwa ajaran agama Islam memberikan kondisi spiritual (psychological dynamics) (Muhaimin, 1988) kepada masyarakat untuk melakukan aktifitas keduniawian yang bermakna, dan bahwa agama merupakan sumber aktifitas untuk berlangsungnya transformasi struktural dan memberikan bentuk kepada sistem anggota masyarakat yang berkaitan dengan fenomena pembangunan.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, pemikiran tokoh ulama itu umumnya sejalan dengan pendapat responden lainnya terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa agama sebagai aspek normatif pada dasarnya merupakan acuan untuk dijadikan patokan penilaian dalam memandang dan melakukan peran dalam pembangunan. Dengan acuan itu, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa ulama merupakan kelompok elite di dalam masyarakat, yang berkewajiban untuk mengajak pada kebaikan (*da'wa ila al-khayr*) dan memelihara kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Terhadap pernyataan itu salah seorang di antara mereka menegaskan, “tugas ulama adalah menyampaikan perintah dan larangan Allah”. Sambil mengutip hadis nabi yang menyatakan “sampaikan dari aku walaupun satu ayat” (*balligu'anni wa law ayah*), ia mengatakan bahwa “penyampaian” itu hendaknya disertai “ajakan” pada kebaikan (*ngajak kana kasaeen*) yang harus dilakukan dengan kesabaran. Kewajiban itu harus dilaksanakan sepanjang hayat selama “berkemampuan”. Pemikiran itu menunjukkan bahwa tugas ulama, sebagai kelompok masyarakat yang berilmu, adalah menyampaikan ajaran agama dan mengajak untuk mengamalkannya. Hal itu didukung oleh oleh sangat setuju dan setujunya sebagian besar dari mereka terhadap pernyataan, bahwa agama memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah, terhadap sesama anggota masyarakat, dan terhadap lingkungan, secara selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian, pembangunan itu pada dasarnya merupakan pengamalan nilai-nilai maupun norma-norma yang bersumber dari ajaran agama (Islam) yang dijabarkan dalam berbagai aktifitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dan utuh (*ka'ffah*). Dengan kata lain pembangunan itu merupakan ikhtiar manusia manusia mengadakan perubahan, perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan, dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan menyeluruh (*kaffah*). Selanjutnya mayoritas dari responden juga sangat setuju dan setuju akan pernyataan bahwa kewajiban ulama adalah menyebarluaskan dan menterjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyiaran, pengajaran, bimbingan dan penyuluhan keagamaan, dan pengabdian.

Memperkokoh pernyataan tersebut, salah seorang responden lainnya berpendapat bahwa: “kewajiban ulama pada prinsipnya mengajak masyarakat untuk berbuat *ma'ruf* dan *mencegah* munkar sebagaimana dalam al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama dengan fihak lain terutama mereka yang memiliki kelebihan dalam hal harta dan kewenangan atas kekuasaan”.

Mengenai hubungan antara agama sebagai sumber aktifitas dengan pembangunan masyarakat, dikemukakan ulama senior yang telah disebutkan terdahulu bahwa “agama Islam mencakup berbagai segi kehidupan manusia, yang secara garis besar meliputi bidang-bidang ibadah, *mu'amalah* (kemasyarakatan), *munakahah* (perkawinan), dan *jinayah* (kepidanaan). Penerapannya di dalam kehidupan masyarakat, baru di bidang ibadah, dan munakahah saja”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa, “ulama berkewajiban menjelaskan bidang mu'amalah dan jinayah kepada masyarakat, agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”. Pemikiran itu menunjukkan bahwa pembangunan merupakan usaha penerapan ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seperti juga responden lainnya, tokoh senior itu mengatakan bahwa usaha penerapan ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat harus dilaksanakan bersama-sama, karenanya diperlukan kerja sama di antara berbagai unsur yang ada di lingkungan masyarakat. “Kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan umat manusia ditegakkan oleh empat unsur, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis nabi: yaitu (1) dengan ilmu para ulama; (2) dengan keadilan pemerintah (umara); (3) dengan kedermawanan orang-orang kaya (aghniya); dan (4) dengan do'a orang-orang fakir (fuqara)”. Lebih jauh dikemukakan bahwa, “keempat unsur itu saling saling bergantung satu sama lain. Karena itu jangan mengabaikan orang-orang fakir, sebab pada mereka terdapat kekuatan. Dalam bentuk nyata kekuatan mereka adalah pada do'a dan dukungannya. Mereka adalah orang-orang yang mudah diajak”.

Pemikiran itu menunjukkan dengan jelas bahwa kelompok masyarakat yang berkewajiban untuk memelopori pembangunan adalah mereka yang memiliki kelebihan. Mereka adalah ulama yang memiliki kelebihan ilmu, pemerintah (umara) yang melebihi kekuasaan, dan orang-orang kaya (aghniya) yang memiliki kelebihan harta, ditunjang oleh kaum kafir (fuqara) dengan dukungannya dalam perbuatan nyata.

Keharusan adanya kerja sama dalam pembangunan oleh responden lainnya, dicontohkan seperti dalam kehidupan sosial keagamaan, seperti pengorganisasian zakat, ulama sebagai orang yang memahami dan menguasai aturan-aturan agama, berkewajiban untuk memprakarsainya, didukung oleh pemerintah. Tetapi dalam usaha peningkatan hasil pertanian, usaha perbaikan saluran air untuk kepentingan pertanian, yang merupakan

sumber zakat, merupakan tugas pemerintah yang harus didukung ulama”.

Hal itu dikemukakannya sebagai penjelasan tentang perwujudan kerja sama sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur’an, surat Al-Maidah, ayat 2.⁵³ Selanjutnya disimpulkan bahwa “jadi semua kegiatan yang memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat seperti kedua kegiatan itu merupakan kewajiban semua orang (sarerea), harus dikerjakan secara gotong royong dan bertanggung jawab”.

Pemikiran serupa dikemukakan responden lainnya, ketika menjelaskan mengenai usaha mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejelekan, menurutnya, “mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan merupakan kewajiban setiap orang (fardh ‘ayn). Tetapi dalam masalah tertentu yang memerlukan keahlian dan kewenangan kewajiban itu dapat dibagi pada berbagai tugas yang berbeda-beda (fardh kifayah)”. Ia contohkan, misalnya dalam penyelesaian kasus pencurian merupakan tugas polisi dan penegak hukum lainnya, bukan tugas ulama.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi mereka ajaran Islam telah memberi landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan kata lain, Prinsip pembangunan dalam Islam sebenarnya merupakan konsep ekonomi-politik yang menyangkut secara total interaksi antara kegiatan ekonomi dengan non-ekonomi, dan juga beraspek interaksi antara dimensi universal dengan dimensi individual dari ajaran Islam (Tjiptoherijanto, 1988: 58). Bagaimana pendapat ulama (responden) itu tentang “pemikiran keagamaan mengenai pembangunan” secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12: Pendapat responden Tentang Pemikiran Keagamaan Mengenai Pembangunan

| No. | Nomor Urut Pernyataan | SS (%) | S (%) | N (%) | TS (%) | STS (%) | JML (%) |
|-----|-----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 | 28 | 27 (54) | 23 (46) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (100) |
| 2 | 29 | 25 (50) | 21 (42) | 4 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (100) |
| 3 | 30 | 29 (58) | 19 (38) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (100) |
| 4 | 31 | 18 (36) | 29 (58) | 3 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (100) |
| 5 | 32 | 32 (64) | 15 (30) | 2 (4) | 1 (2) | 0 (0) | 50 (100) |
| 6 | 33 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 50 |

⁵³ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|-----|-----|-------|
| | | (46) | (44) | (10) | (0) | (0) | (100) |
|--|--|------|------|------|-----|-----|-------|

Terhadap pernyataan yang diajukan tentang tujuan pembangunan, pemikiran ulama pada dasarnya sama, walaupun terdapat perbedaan nuansa. Sebagian besar ulama (responden) sependapat bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk mengembangkan potensi pribadi manusia sehingga mampu meningkatkan amaliah dalam hidupnya untuk kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Karena itu pembangunan masyarakat sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan keimanan warga masyarakat, karena peningkatan keimanan akan menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai kewajiban kemasyarakatan. Demikian kata mereka.

Menanggapi pernyataan itu, salah seorang ulama (responden) menyatakan bahwa “memang peningkatan iman dan amal keagamaan merupakan hal yang mendasar. Karenanya peningkatan kegiatan majlis ta’lim misalnya, adalah suatu hal yang mutlak, sebab melalui kegiatan itu masyarakat diberi penjelasan tentang tuntunan agama untuk kehidupan sehari-hari”. Ia juga berpendapat bahwa “dengan memasyarakatkan tuntunan agama untuk kehidupan sehari-hari akan timbul tanggung jawab dan disiplin pada diri dan lingkungannya. Tanggung jawab dan disiplin itu merupakan tiang utama etos kerja, etos pembangunan. Kalau tanggung jawab dan disiplin sudah tumbuh, dengan sendirinya akan mendorong kreativitas dan prakarsa yang merupakan pangkal tumbuhnya etos kerja produktif untuk menciptakan hari esok yang lebih baik”.

Bertolak dari tujuan itu, telah diajukan pula pernyataan mengenai arah pembangunan yang dianggap tepat, penilaian atas dasar ma’ruf dan munkar, bidang yang perlu diprioritaskan, serta gagasan apa yang merekagariskan untuk pembangunan masyarakat. Untuk itu diajukan sebelas pertanyaan.

Mayoritas dari mereka sependapat bahwa sesuai dengan konsep Islam, dinamika pembangunan akan berhasil bila melibatkan keyakinan dan keikutsertaan ummat (masyarakat) yang menjadi tujuan sekaligus pelaku pembangunan. Selain itu arah pembangunan sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam arti memiliki keimanan yang kuat, ilmu yang tinggi, dan khlak yang luhur, karena semua itu akan menciptakan kondisi umum yang mendorong pembangunan. Pembangunan sebagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam arti kebutuhan material dan kebutuhan spiritual harus merupakan bagian dari amal ibadah kepada Allah SWT. Bertolak dari pemikiran itu, maka pembangunan masyarakat sebaiknya tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya.

Terhadap penilaian yang seperti itu, umumnya mereka sependapat

bahwa menurut ajaran Islam konsep keseimbangan, merupakan hal yang fundamental; komitmen seorang muslim kepada kewajibannya terhadap Allah sama esensialnya dengan komitmen kepada kewajibannya terhadap masyarakat.

Tanggapan lebih jauh terhadap pernyataan yang diajukan itu, seorang diantara mereka yang dikenal juga sebagai seorang pengurus Majelis Ulama Kecamatan dan juga sebagai anggota pengurus Majelis Ulama Kabupaten Bandung, menyatakan:

“Sebagai usaha aktualisasi Islami di dalam masyarakat ada dua macam etos kerja (pembangunan) dan motivasi agama sebagai arah pembangunan yang perlu dipelihara (1) merupakan *built in mechanism* ketaatan dan ketaqwaan beragama; dan (2) menyediakan sarana dan lingkungan agamis masyarakat, serta menjaga homogenitas kehidupan bermasyarakat mereka, yang dapat direalisasikan dalam *policy* yang terpadu, bersifat lokal maupun nasional”.

Lebih jauh ia mengatakan:

“Pada prinsipnya dinamisme potensi pembangunan terletak pada kemampuan jalinan struktural dalam memacu potensi jiwa-kewiraswastaan sebagai modal dasar yang telah mereka miliki. Dengan demikian maka untuk perkembangan masyarakat yang dinamis, seluruh potensi dan kekuatan jiwa kewiraswastaan yang ada harus secara gradual namun ajeg diarahkan kepada kondisi yang independen, sehingga dapat dicegah terjadinya pencemaran terhadap (sistem) nilai agama yang telah dipunyai masyarakat, sebab kalau tidak dicegah berarti akan merusak motivasi keagamaan mereka dalam kegiatan pembangunan pada umumnya”. Selanjutnya dikatakan, “Apabila pencemaran dimaksud berlangsung misalnya akibat motif politik, maka akan terjadi ketidakstabilan masyarakat. Hal itu akan membawa konsekuensi politik (timbulnya frustrasi) yang mendalam dan berkepanjangan yang bisa berdampak negatif terhadap usaha pembangunan secara keseluruhan”.

Tanggapan lain dikemukakan oleh ajengan lainnya yang dikenal sebagai guru aliyah dan guru ngaji serta salah seorang pengurus majlis Ta’lim. Menurutnya pembangunan sebaiknya diarahkan agar masyarakat, terutama generasi muda, memperoleh peluang untuk mendapatkan pendidikan secara leluasa. “Kunci keberhasilan pembangunan terletak pada manusia terpelajar. Mereka lebih mudah untuk memahami dan diajak membangun. Karena itu kegiatan pendidikan dan pengajaran harus mendapat prioritas”.

Pemikiran itu tampaknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Tidak heran kalau ia merupakan salah seorang dari 46 responden (92%) yang mengatakan sangat setuju atau setuju terhadap pernyataan bahwa:

Keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan

manusianya secara pribadi yang didasari ajaran agama, karena itu pembangunan manusia untuk membangun harus diutamakan atau diprioritaskan. Mengapa ia sangat setuju dengan pernyataan itu? Untuk itu ia mengatakan: “Karena menurut Islam, dalam pembangunan, manusia harus diletakan pada posisi yang sangat penting. Peranan manusia sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pembangunan. Itulah sebabnya pembangunan manusia sebagai Khalifah Allah dimuka bumi yang dapat berfungsi sebagai: umat yang berlaku adil di tengah-tengah ketidakadilan merupakan terminal terminal terakhir dalam perjalanan ini”. Selain sangat setuju terhadap pernyataan itu, ia juga merupakan salah seorang dari 43 responden (86%) yang sependapat bahwa: Pembangunan manusia lebih diartikan untuk meningkatkan akhlak masyarakat, agar memiliki akhlak yang luhur (*al-akhlak al-karimah*), karena akhlak yang luhur merupakan modal dasar utama bagi keberhasilan pembangunan.

Mengomentari terhadap pernyataan itu, ajengan lain yang juga dikenal sebagai ketua Koperasi Unit Desa (KUD) desa Cikancung berpendapat:

“Sesuai dengan tujuan pembangunan (menurut Islam) yang mengarah kepada kemakmuran dan kebahagiaan bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak, kedudukan manusia jelas merupakan pusat segala-galanya. Karena itu, dalam hubungan dengan usaha manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia, harus selalu diingat nilai-nilai syukur dan adil. Karena dengan mensyukuri rahmat Allah, keadialn akan terbina. Sementara sifat *kufr* atau pengingkaran terhadap Allah dan segala rahmat-Nya, yang dapat menumbuhkan sikap ketidakadilan harus dilenyapkan. Landasan tauhid akan meluruskan sifat-sifat yang kurang baik dan kurang menopang usaha-usaha pembangunan tersebut. Itulah sebabnya saya sangat setuju bahwa akhlak yang luhur harus ditumbuh kembangkan di lingkungan masyarakat karena memang merupakan modal dasar utama bagi keberhasilan pembangunan”.

Secara panjang lebar ia juga mengatakan bahwa:

“Islam selalu mengajak umatnya untuk mempunyai keyakinan dan optimisme terhadap masa depan. Keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Optimisme untuk mencapai keyakinan tersebut”.

Lebih jauh lagi ia mengatakan:

“Tidak sedikit dari ajaran Islam yang mendorong, memberi motivasi, menganjurkan, dan bahkan memerintahkan umatnya untuk berikhtiar, berusaha, berinisiatif, bekerja dan bersikap kreatif. Tidak kurang dari ayat-ayat Al-Qur’an sendiri seperti surat Al-Qashash, ayat 77⁵⁴ yang menyuruh

⁵⁴ “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duni dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan

umat Islam untuk tekun bekerja demi kebahagiaan dunia, tanpa melupakan persiapan bagi kebahagiaan di akhirat. Juga ayat-ayat yang menyatakan bekerja amat penting untuk kesejahteraan hari esok, agar kelanjutan kehidupan diri dan keluarga terpelihara, seperti surat Al-Hasyr, ayat 18⁵⁵

Pemikiran ajengan itu ditimpali oleh ajengan lain yang sehari-hari bekerja sebagai penilik pendidikan agama, dan secara rutin terlibat langsung dalam pembinaan keagamaan masyarakat melalui pengajian-pengajian. Ia mengatakan: “Semua tuntutan untuk rajin bekerja, berdisiplin, kreatif serta serta produktif harus dilandasi oleh keinginan berbuat baik”. Dalam hubungan ini ia mengutip salah satu hadis nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Muslim yang menjelaskan bahwa: “Orang yang menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik tersebut”

Dari pemikiran-pemikiran yang diajukan sebagai ajengan (ulama) tersebut cukup jelas betapa kedudukan manusia sebagai “*person* yang berkepribadian” merupakan sasaran utama yang harus dibina terlebih dahulu sebagai modal dasar awal bagi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan. Sasaran itu jelas cukup strategis, karena dengan itu berarti akan terbentuk “norma sosial” yang diharapkan, (harapan masyarakat tentang bagaimana seseorang anggota masyarakat harus bertindak) yang pada gilirannya akan membentuk “nilai” (keteguhan pendirian seseorang tentang bagaimana ia harus bertindak dan memperjuangkan cita-cita atau tujuannya) pada setiap individu masyarakat. Dengan terbentuknya “nilai” yang sejalan dengan “norma sosial” yang diharapkan, sudah tentu akan membentuk kelompok masyarakat yang mempunyai kohesi yang tinggi, integritas dan integrasinya baik, serta efisien, yang sudah tentu akan menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan.

Kesadaran akan itu semua tampaknya begitu melekat pada setiap insan ulama (ajengan) yang ada di kecamatan Cikancung. Mereka seolah-olah merasakan bahwa masyarakat yang dinamis dan mempunyai nilai serta norma sosial yang berlandaskan agamalah yang mempunyai “nilai interaksi personal” (interpersonal values)⁵⁶ yang memadai yang dibutuhkan bagi

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

⁵⁵ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁵⁶ Masyarakat yang mempunyai kohesi tinggi, integritas dan integrasinya baik serta efisien, memiliki enam nilai interaksi personal: (1) Support; suka memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan orang lain; (2) Comformity; suka mematuhi peraturan dan tata tertib serta suka memilih jalan tengah; (3) Recognition: suka mengambil perhatian dan suka menjaga nama diri maupun nama kelompoknya; (4) Independence: suka

kelangsungan pembangunan. Mereka juga tampaknya menyadari bahwa efektifitas suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan ditentukan oleh karakteristik individual tiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peranan manusia sebagai person berpribadi sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pembangunan.

Berangkat dari pemikiran mereka mengenai pembangunan, kepada mereka diajukan pula persyaratan-persyaratan yang menyangkut bagaimana gagasan mereka khususnya yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Mereka hampir semuanya (86%) sependapat bahwa: sesuai dengan perintah agama, bahwa segala kegiatan manusia ditujukan ke satu arah yaitu mendapatkan ridha Allah, karena itu gagasan pembangunan yang tepat untuk ditempuh harus berlandaskan pada *tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah), *rububiyyah* (ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan segala pemberian-Nya), *khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah di bumi) dan *tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Di samping itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka pembangunan masyarakat harus bersifat menyeluruh dan utuh (*kaffah*). Terdapat keseimbangan antara pembinaan aspek ibadah yang bersifat personal dengan aspek keduniawian yang lebih banyak bersifat universal.

Menanggapi pernyataan itu umumnya mereka berpendapat bahwa bertolak dari *taqwa* yang merupakan dasar dari etos kerja dalam Islam, maka *tauhid* merupakan sendi utama pembangunan. Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Tauhid akan menunjukkan batasan-batasan, disamping arah yang harus dituju bagi proses pembangunan yang sedang berlangsung, menurut mereka tanpa sikap tauhid, usaha pembangunan yang dilakukan tidak akan ada artinya. Karena usaha itu akan berakhir pada pemujaan terhadap materi. Karenanya landasan khilafah sangat penting untuk disadari, sehingga masyarakat mengerti akan tanggung jawab yang dipikul dipundaknya, selain hanya menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Ajaran ini jelas menetapkan kedudukan dan peranan manusia pada tempat yang tertinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kalau hal itu sudah disadari, maka pemanfaatan alam semesta dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian hidup bersama bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah tentang hak itu (*rububiyyah*). Dengan demikian

kebebasan karena kebenaran dan suka membebaskan orang lain karena kemampuannya; (5) Benevolence; suka bekerja dan menolong orang lain yang memerlukannya; (6) Leadership: suka memecahkan persoalan orang lain dengan penuh kemampuan serta kewibawaan. (Lihat, Hadipranata, 1976).

penyucian dan pengembangan (*tazkiyah*) atau segala hubungannya dengan Allah, hubungan dan pergaulannya dengan sesama manusia, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta wilayah negaranya bisa dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh rasa *syukur*. Bagaimana arah pembangunan, penilaian, prioritas serta gagasan apa yang mereka gariskan secara keseluruhan dapat dilihat Tabel 13.

Tabel 13: Pendapat Responden Tentang Tujuan, Arah, prioritas, dan gagasan Mengenai Pembangunan.

| No. | Nomor Urut Pernyataan | SS (%) | S (%) | N (%) | TS (%) | STS (%) | JML (%) |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| 1 | 33 | 18 (36) | 21 (42) | 7 (14) | 1 (2) | 3 (6) | 50 (100) |
| 2 | 34 | 16 (32) | 27 (54) | 6 (12) | 1 (2) | - (0) | 50 (100) |
| 3 | 35 | 11 (22) | 33 (66) | 4 (8) | 1 (2) | - (0) | 50 (100) |
| 4 | 36 | 16 (32) | 32 (64) | 2 (4) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 5 | 37 | 19 (38) | 25 (50) | 6 (12) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 6 | 38 | 23 (46) | 23 (46) | 4 (8) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 7 | 39 | 12 (24) | 32 (64) | 4 (8) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 8 | 40 | 12 (24) | 33 (66) | 4 (8) | 1 (2) | - (0) | 50 (100) |
| 9 | 41 | 17 (34) | 31 (62) | 2 (4) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 10 | 42 | 18 (36) | 28 (56) | 2 (4) | 2 (4) | - (0) | 50 (100) |
| 11 | 43 | 20 (40) | 23 (46) | 5 (10) | 2 (4) | - (0) | 50 (100) |
| 12 | 44 | 18 (36) | 28 (56) | 2 (4) | 2 (4) | - (0) | 50 (100) |
| 13 | 45 | 23 (46) | 20 (40) | 7 (14) | - (0) | - (0) | 50 (100) |
| 14 | 46 | 13 (26) | 24 (48) | 13 (26) | - (0) | - (0) | 50 (100) |

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ulama (ajengan) kecamatan Cikancung mengenai pembangunan masyarakat desa tercermin dalam kegiatan keseharian mereka, yang menjadi ciri pribadi mereka. Pembangunan, menurut mereka, merupakan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam peningkatan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan manusianya secara pribadi yang didasri ajaran agama.

Mrereka yakin bahwa ajaran agama Islam telah memberi landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Mereka juga memperhitungkan, betapa faktor kelembagaan, teknologi, kependudukan, dan lingkungan fisik berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Apakah pemikiran mereka berpengaruh terhadap pemilihan prioritas bidang pembangunan masyarakat desa?

Dilihat dari frekwensi peristiwa, alokasi biaya, dan keberagaman satuan pengelola, sebagaimana telah diuraikan Pada bab III khususnya tentang kegiatan pembangunan (bagian 3.3) menunjukkan bahwa pembangunan di kecamatan Cikancung diprioritaskan pada sektor sosial budaya, terutama sektor keagamaan, hal itu lebih jelas lagi dalam pembangunan jalur bawah (lihat tabel 8), yang menunjukkan jumlah atau frekwensi pembangunan bidang keagamaan begitu besar. Dengan kata lain, bahwa pembangunan di desa-desa kecamatan Cikancung lebih diarahkan pada usaha penerapan ajaran Islam dalam kehidupan terutama dimensi ritual, moral, intelektual, dan sosial. Usaha tersebut erat hubungannya dengan peranan ulama di dalam masyarakat, karena sebagian dari mereka terlibat langsung sebagai pemimpin berbagai peristiwa pembangunan.

Bagi ulama pemilihan prioritas pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi mereka sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat, yang berkewajiban mengajak pada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar. Mereka memprakarsai dan mengelola penyediaan sarana keagamaan baik fisik maupun pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian mereka bisa mengerahkan kegiatan masyarakatnya. Bagi mereka, organisasi keagamaan merupakan saluran utama. Untuk melakukan kegiatan dan aktualisasi kepemimpinannya. Mereka tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kemampuan berpikir abstrak yang rata-rata cukup baik, mereka tampak lebih arif bijaksana daripada yang dipimpinnya. Selain itu mereka rata-rata memiliki kestabilan emosi, yang sangat diperlukan bagi kepekaan dan ketenangan serta ketekunan bertindak, sehingga mampu bekerja efektif. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan yang bisa diikuti (kekuatan sosial) yang memadai. Karena itu ulama di kecamatan Cikancung cukup berhasil "menawarkan" gagasan dan usaha mereka di dalam masyarakat.

Keberhasilan ulama kecamatan Cikancung dalam "menawarkan" gagasan, memprakarsai, mengelola pembangunan, dan pengorganisasian masyarakat, selain karena hal-hal tersebut di atas, didukung oleh beberapa faktor: pertama, setiap gagasan dan usaha mereka di dasarkan pada ajaran agama yang dipikir sakral; dan memiliki daya ikat yang kuat. Agama ... seperti yang telah dijelaskan ... telah diterima sebagai bagian dari norma-norma sosial dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Pembangunan

sarana peribadatan, seperti mesjid dan musholla, memberi peluang kepada masyarakat, baik secara perseorangan maupun kolektif, untuk mengekspresikan keyakinan dan perasaan keagamaan mereka, serta memberi identitas kepada mereka sebagai manusia dan masyarakat beragama. Pembangunan sarana pendidikan agama, seperti madrasah dan pesantren, memberi peluang kepada masyarakat untuk menyatakan apresiasi mereka terhadap dunia pendidikan yang menjadi pilar masyarakat Islam di desa mereka masing-masing, dan dapat dijadikan sarana mobilitas sosial bagi kaum remaja. Melalui sarana peribadatan maupun sarana pendidikan, mereka telah mampu memunculkan institusi sosial yang khas yang antara lain berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang diharapkan.

Kedua, pembangunan keagamaan dipandang sebagai salah satu wujud pengabdian (ibadah) kepada Allah, dengan mengharapkan pahala dan ridhanya. Di antara mereka, terutama yang cukup berperan dalam pembangunan desa, selalu mengajak masyarakat untuk menginfakan harta di jalan Allah. Mereka mengingatkan bahwa harta yang dimiliki hakikatnya adalah titipan dari Allah, berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya (min 'i-lah ila 'i-lah). Pemikiran tersebut tercermin dalam wujud keikhlasan yang tak kenal lelah dari mereka untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi pembangunan keagamaan khususnya, pembangunan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, gagasan ulama itu ditunjang oleh kepemimpinan mereka dan kerja sama yang dijalin dengan berbagai pihak. Mereka memiliki pengaruh yang cukup mendalam di kalangan masyarakatnya, terutama dalam lingkungan jama'ah, yang selalu berkomunikasi tatap muka hampir setiap hari. Hal itu jelas membantu dan memperlancar penyampaian dan penerimaan gagasan pembangunan. Selain itu di kecamatan Cikancung selalu melakukan kerja sama dengan para pemimpin masyarakat lainnya, baik dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta (pengusaha dan petani kaya).

Keempat, pengelolaan pembangunan (terutama dalam pengelolaan keuangan) yang dipimpin oleh ulama dilakukan secara terbuka. Misalnya, dalam pembangunan dan pemugaran mesjid ja'mi kota kecamatan Cikancung, perincian mengenai pemasukan dan pengeluaran biaya dihitung pada pertemuan rutin panitia pembangunan tiap menjelang hari Jum'at. Selanjutnya, menjelang Jum'at diumumkan kepada para jama'ah. Cara seperti itu merupakan pengawasan keuangan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ulama sebagai pengelola pembangunan. Mereka lakukan secara sadar sebagai salah satu usaha sosialisasi sikap dan tindakan sosial di kalangan pengikut (masyarakat) sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima sebagai bagian dari norma-norma sosial atau sistem nilai budaya masyarakat.

Kelima, gagasan ulama di kecamatan Cikancung disalurkan melalui satuan-satuan sosial yang mapan, seperti jama'ah mesjid, musholla, dan majlis ta'lim yang memiliki anggota tetap dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Melalui saluran ini ulama dapat menyakinkan jamaah (pengikut) tentang gagasan-gagasannya mengenai pembangunan secara efektif. Mereka ترجمahkan pragmatisme ilmu pengetahuan ke bahasa kultural yang bisa dipahami semua lapisan masyarakat yang ada.

4.3. Peranan Pemikiran Ulama Dalam pembangunan

Pada bagian 4.2. telah diuraikan bagaimana pemikiran ulama mengenai pembangunan masyarakat desa, yang pada dasarnya tidak lepas dari cerminan kegiatan keseharian mereka dari ciri pribadi mereka sebagai "guru" dan "panutan". Pembangunan menurut mereka pada prinsipnya merupakan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam peningkatan iman, ilmu, dan akhlak mulia, karena keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan manusianya. Mereka berpendapat ajaran agama Islam telah memberikan landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Bagaimana semua itu bisa direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, sudah tentu tidak bisa lepas dari peranan mereka sebagai pemimpin.

Sebagai warasat al anbiya (pewaris nabi), penyampai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, sebagai pelaku amal ma'ruf nahi munkar, singkatnya sesuai dengan fungsi tugas dalam kedudukannya sebagai salah satu golongan pemimpin masyarakat, disamping "menawarkan" gagasan atau pemikirannya, mereka juga memprakarsai bahkan dipercaya memimpin dan mengelola berbagai peristiwa pembangunan. Sebagai tokoh pemuka masyarakat, pengaruh mereka cukup menonjol serta memiliki saluran kepemimpinan yang jelas dan mapan (lihat bab III bag. 3.2.2), mereka mampu berperan dengan baik, baik sebagai: (1) da'i, dalam arti *bil-lisan* maupun *bil-hal*; (2) Demokratisator, seperti selalu melakukan musyawarah dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat; (3) Modernisator, seperti mengajarkan "tulis-baca" dan sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, secara luas di masyarakat. Ketiga peran itu merupakan realisasi dari kinerja mereka, berupa iman, amal, dan dakwah yang dilakukan dengan penuh kesabaran.

Sebagaimana telah dikemukakan (lihat bab III bag. 3.3.2.) bahwa sebagian besar (91,4%) kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung adalah pembangunan jalur bawah, dengan satuan-satuan pengelola yang cukup beragam mulai pemerintah desa, pengurus RW, pengurus DKM, pengurus Majelis ta'lim, dan pimpinan pesantren serta madrasah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan pembangunan di desa-desa wilayah kecamatan Cikancung dikelola oleh pemimpin pemerintahan, dan

pemimpin organisasi keagamaan yang pada umumnya diketuai ulama yang cukup dikenal di masyarakat.

Keterlibatan ulama dalam kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa cukup menonjol. Sebagai warga negara biasa dan sebagai tokoh masyarakat, mereka selalu dilibatkan dalam musyawarah bersama tokoh-tokoh tingkat kecamatan, demikian pula dalam pelaksanaannya, misalnya dalam pembangunan sarana jalan desa yang dilakukan di beberapa desa. Kegiatan ini menarik keterlibatan pelbagai kelompok dan lapisan masyarakat, karena kegiatan ini berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Wujud peran serta mereka juga beragam, yaitu berupa tenaga dalam kegiatan gotong royong, dan bentuk material lainnya.

Dalam peristiwa pembangunan itu, ulama terlibat dalam usaha pengerahan tenaga dan biaya sesuai dengan kemampuannya, bahkan "pengorbanan" lahan pertanian milik mereka yang terkena pelebaran jalan. Khusus mengenai kegiatan gotong-royong, dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman masing-masing. Bagi ulama, keterlibatannya dalam kegiatan itu merupakan panggilan tugas sebagai pemimpin masyarakat, disamping merupakan reputasi kepemimpinan mereka. Di lain pihak, kegiatan ini merupakan "investasi" yang akan membantu peningkatan usaha (ekonomi) masyarakat. Karena itu, perhatian mereka terhadap kegiatan seperti ini begitu penuh, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang wajib didukung dengan penuh tanggung jawab dan keihlasan.

Kegiatan lain misalnya, dalam usaha pengembangan "domba rakyat". Melihat potensi yang cukup besar salah seorang ulama dari desa Srirahayu, menyarankan pengembangan "domba rakyat" secara intensif sebagai domba sayur untuk kebutuhan pangsa pasar. Prakarsa itu disambut dengan penuh harapan, khususnya bagi mereka yang memang hidup sebagai peternak, demikian pula pemerintah yang lebih atas memberikan dukungan bahkan bantuan berupa bibit domba unggul dan tuntunan pemeliharaan dombayang baik melalui dinas Peternakan kabupaten Bandung secara rutin. Bantuan ternak juga diterima dari Badan Koordinasi kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), Kementerian sosial. Bantuan diberikan kepada Keluarga Binaan Sosila (KBS) yang ada di desa Ciluluk, Cihanyir, dan Cikuncung, masing-masing sebanyak 30 ekor domba. Perlu diketahui BP3S merupakan partner pemerintah dalam "Usaha Kesejahteraan Sosial" (UKS) yang bergerak dalam usaha pengentasan kemiskinan terutama di pedesaan. Bagi peternak dan pemilik domba, kegiatan ini merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang akan menunjang perbaikan sosial ekonomi mereka.

Telah dijelaskan bahwa pembangunan sektor keagamaan menempati posisi sentral, baik dalam frekuensi kegiatan maupun penyediaan dana. Pembangunan sektor ini hampir seluruhnya (85,12%) merupakan hasil swadaya murni masyarakat setempat, dan hampir seluruhnya dikelola oleh

organisasi-organisasi keagamaan yang ada. Organisasi-organisasi itu merupakan saluran utama bagi para ulama untuk melakukan kegiatan dan aktualisasi kepemimpinan mereka di dalam satuan-satuan jamaah dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa peranan mereka begitu dominan. Dalam berbagai peristiwa pembangunan, umumnya mereka adalah pemrakarsa dan pengelola pembangunan. Seperti pembangunan atau pemugaran mesjid agung kota kecamatan Cikancung, diprakarsai dan dikelola oleh satuan pengelola (panitia pembangunan) yang terdiri dari para ulama, ditambah beberapa orang aparat pemerintahan, mereka antara lain berfungsi sebagai “penyedia” sarana fisik yang dibutuhkan, pencari dana, dan pengerah tenaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, mesjid jami itu dapat diselesaikan dengan baik.

Peristiwa lain yang cukup menarik, ialah pada tiga kegiatan pembangunan dan perluasan mesjid, masing-masing di desa Mandalasari, Hegarmanah, dan Cikasungka. Pembangunan mesjid itu ketiganya dilengkapi dengan tempat mandi dan cuci umum dilakukan dalam satuan sosial yang relatif kecil dan terbatas, namun dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Kerja sama di kalangan masyarakat sebagai anggota jamaah yang diprakarsai unsur ulama, bekerja sama dengan para ketua RW (*umara*) dana para petani kaya (*agniya*) sangat kohesif, karena interaksi di antara mereka dilakukan secara kerap dan intensif. Dalam ketiga kegiatan pembangunan mesjid itu menunjukkan bahwa ulama (antara lain sebagai DKM) melakukan peranan yang sangat penting, dan menjadi penanggung jawab dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Peristiwa lainnya yang menunjukkan bagaimana ulama melakukan kerja sama dan mengorganisasi potensi yang ada di sekitarnya yaitu pada waktu pembentukan Madrasah Tsanawiyah “Al-Hidayah” di pangauban, desa Cikancung. Kegiatan itu merupakan salah satu usaha penyediaan perangkat lunak pendidikan agama tingkat menengah, untuk memperluas kesempatan belajar bagi lulusan pendidikan dasar dan ibtidaiyah. Gagasan pembangunan madrasah itu, menurut salah seorang ulama setempat, telah dilontarkan sekitar awal tahun 2010. Proses pembangunannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2011. Mengingat kebutuhan yang begitu mendesak, pembangunan dilakukan secara “marathon” selama lima sampai enam bulan, yang melibatkan berbagai unsur di lingkungan setempat, yaitu ulama, tokoh-tokoh pendidikan aparat pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Pembiayaannya diperoleh dari para pemimpin kegiatan, dana zakat, infaq, zariah, sodaqoh, dan sumbangan lainnya baik dari masyarakat setempat maupun dari luar. salah seorang ulama setempat ditunjuk untuk menjadi pemimpin kegiatan itu, dibantu oleh seorang kepala MI dan ketua RT setempat. Untuk selanjutnya, salah seorang ulama lainnya ditunjuk sebagai

kepala madrasah, dibantu guru-guru SD dan Ibtidaiyah swasta sebagai guru tidak tetap, dua orang diantaranya berpredikat tokoh agama (*ulama*) lingkungan desa Cikancung.

Dari kegiatan itu tampak begitu dominan peranan ulama di desa itu, mulai dari memprakarsai sampai mengelola pembangunan bahkan memimpin kelangsungan dari Madrasah Tsanawiyah tersebut. Semua itu mereka lakukan, menurut salah seorang diantara mereka, karena penerahan pemikiran dan tenaga bagi keberhasilan pembangunan masyarakat merupakan wujud pengabdian (*ibadah*) kepada Allah SWT, yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Contoh lain, dalam pengorganisasian zakat fitrah. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun, mulai dari pertengahan sampai akhir bulan Ramadhan. Secara resmi kegiatan pengelolaan zakat fitrah dimulai dari tingkat Rukun warga (RW) yang dikelola Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) tingkat RW, yang dalam pelaksanaannya ketua Rukun warga (selaku ketua BAZIS tingkat RW) selalu bekerja sama dengan DKM setempat, bahkan DKM-lah yang mengelola langsung masalah zakat ini. Dalam kegiatan itu semua ulama (responden) selalu menjadi'amilin (panitia), yang bertugas mengumpulkan benda zakat (beras dan uang) dari para wajib zakat (*muzakki*), dan membagikannya kepada yang berhak menerima (*mustahik*).

Kegiatan pengorganisasian zakat fitrah itu merupakan usaha perbaikan pelaksanaan zakat fitrah yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan hukum (material) agama dan ketentuan hukum ((prosedural) pemerintah daerah⁵⁷. Di dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah tampaknya mengandung pertentangan tersembunyi di kalangan ulama tertentu. Di satu pihak pelaksanaan pengorganisasian sesuai dengan ketentuan BAZIS mampu menampung zakat fitrah dari hampir seluruh muzakki di dalam satuan-satuan jama'ah mesjid dan memberi peluang pembagiannya secara merata kepada para mustahik. Di pihak lain pengorganisasian pembagian zakat dengan ketentuan BAZIS itu, berarti mengurangi "pendapatan" ulama tertentu, yang secara tradisional menerima zakat fitrah dari para pengikutnya tanpa melalui panitia BAZIS. Pertentangan itu tidak pernah muncul ke permukaan, baik dalam bentuk perdebatan maupun dalam bentuk lainnya. Gejala yang muncul adalah penerimaan zakat fitrah secara diam-diam, yang mendapatkan kritikan dari panitia. Dampak dari keadaan seperti itu, dari benda zakat terkumpul hanya mampu disetorkan ke BAZIS tingkat kabupaten.

⁵⁷ Sebelum ini pengorganisaian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Jawa barat nomor 352 tahun 1974. Berdasarkan SK Kementerian Agama RI no. 154 tahun 1993 pengorganisasian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) dengan pembagian sebagai berikut: 50% untuk mustahik tingkat desa, 8,5% untuk amilin desa, 15% untuk sabilillah desa, 2% untuk amilin kecamatan, 5% untuk sabilillah kecamatan, disetor ke BAZIS kabupaten 21,5%.

Pengorganisasian qurban hewan merupakan kegiatan lain yang diprakarsai dan dikelola ulama. Kegiatan qurban hewan ini umumnya dilaksanakan secara kolektif. Semula kegiatan itu mengalami hambatan karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama setempat mengenai kedudukan hukum qurban hewan. Di satu pihak berpendapat bahwa qurban hewan harus dilaksanakan secara individual, dengan kadar pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Di lain pihak berpendapat bahwa qurban hewan itu dilaksanakan untuk pemerataan pembagian kepada yang berhak menerimanya. Tanpa mengurangi kadar pembagian yang telah ditentukan, dan untuk meringankan beban bagi yang melaksanakan qurban. Perbedaan itu tercetus secara terbuka dalam musyawarah untuk menentukan pelaksanaan qurban kolektif itu.

Perbedaan pendapat itu, suatu hal yang sering terjadi di kalangan ulama, mencerminkan perbedaan cara penerapan norma agama, dalam hal ini hukum qurban, di dalam kehidupan masyarakat. Ulama yang mendukung gagasan pelaksanaan qurban hewan secara kolektif lebih mempertimbangkan kemaslahatan umum, yaitu: (1) untuk meringankan beban dan menghindarkan monopoli pembagian daging qurban di kalangan yang berhak menerimanya. Mereka tampak menerima “inovasi” dari masyarakat kota, terutama dari anggota organisasi sosial keagamaan yang sudah biasa melakukan qurban hewan secara kolektif.

Ulama yang tidak mendukung gagasan qurban hewan secara kolektif memikirkan bahwa qurban hewan secara kolektif itu tidak didasarkan kepada ketentuan hukum yang otentik. Mereka mengkhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan mengada-ada (*bid'ah*), padahal qurban itu merupakan ibadah yang telah ditentukan tata caranya.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu menggambarkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pengorganisasian qurban hewan, terjadi pertukaran pikiran yang terbuka. Hal itu kadang-kadang membingungkan orang kebanyakan (*'awam*). Namun pada akhirnya musyawarah memutuskan pelaksanaan qurban hewan bisa dilaksanakan secara kolektif, namun tidak akan menghalangi bagi mereka yang akan melaksanakannya secara individual. Keputusan itu mendapat dukungan dari aparat pemerintah kecamatan dan desa, yang turut memperkarsai musyawarah itu.

Kegiatan pengorganisasian qurban hewan itu ditangani oleh pengurus DKM yang dipimpin oleh sebagian ulama bersama unsur masyarakat lainnya, terutama aparat pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya para ketua RW berperan penting. Sebagaimana dalam pengorganisasian zakat fitrah, karena mereka memiliki daftar mustahik dan jadi pelaksana pembagian daging qurban kepada para mustahik tersebut. Jumlah qurban hewan yang terdapat pada idul adha tahun 1433 H/2012, dapat dilihat pada tabel 14.

Pembangunan lainnya adalah penyantunan anak yatim yang dikelola oleh ibu-ibu yang tergabung dalam majlis ta'lim. Kegiatan ini belum merata di setiap desa, namun kegiatan ini merupakan satu-satunya kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan kaum wanita, bahkan boleh dikatakan didominasi mereka. Kegiatan utamanya antara lain adalah usaha pengumpulan dana berupa beras perelek dan sumbangan uang tunai, yang dikumpulkan dari dan oleh peserta atau anggota majlis ta'lim dimaksud. Dana yang terkumpul dibagikan secara merata kepada anak-anak yatim, setiap menjelang Idul Fitri dan setiap tanggal 10 Muharram (hari kelahiran Nabi Muhammad SAW). Kegiatan ini tampaknya seperti terlepas dari koordinasi dan pengawasan pengurus DKM, meskipun kegiatan itu diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan jemaah mesjid. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam satuan jamaah mesjid ada "pembagian tugas" berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 14: Jumlah Hewan Qurban pada Idul Adha Tahun 1433 H/2012 M Wilayah Kecamatan Cikancung

| No. | Desa | Jumlah dan Jenis Hewan Qurban | | |
|--------|--------------|-------------------------------|--------|---------|
| | | Sapi | Kerbau | Kambing |
| 1 | Cikancung | 4 | - | 20 |
| 2 | Mandalasari | 9 | 1 | 29 |
| 3 | Hegarmanah | 4 | - | 8 |
| 4 | Cikasungka | 8 | - | 30 |
| 5 | Tanjunglaya | 5 | - | 32 |
| 6 | Cihanyir | 4 | 1 | 29 |
| 7 | Ciluluk | 6 | - | 15 |
| 8 | Mekarlaksana | 10 | - | 16 |
| 9 | Srirahayu | 4 | - | 25 |
| Jumlah | | 54 | 2 | 204 |

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2012

Dari kegiatan pembangunan tersebut terdapat beberapa hal spesifik: (1) partisipasi ulama begitu besar, mereka berperan serta dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam satuan jamaah yang dijadikan saluran kepemimpinan mereka; (2) pembangunan sektor keagamaan merupakan hasil kerja sama berbagai unsur di masyarakat. Kerja sama antara ulama dengan aparat pemerintahan desa cukup menonjol, seperti tampak dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah dan qurban hewan. Ulama memberikan "legitimasi" terhadap kepemimpinan aparat pemerintahan desa, di dalam satuan jamaah, bila memiliki loyalitas dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan aparat pemerintah desa memberikan "legalisasi" bagi kegiatan yang dikelola ulama; (3) kegiatan pembangunan itu merupakan hasil interaksi dengan pihak 'atas

desa”, yaitu pemerintahan dan non pemerintah. Hal itu tampak seperti dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah dan qurban hewan, yang menerapkan cara dan pendekatan “baru” yang lazim dilakukan dalam tradisi besar yang bercorak perkotaan.

Keterlibatan ulama dalam pembangunan jalur atas tampak dalam berbagai peristiwa pembangunan. Dalam usaha penyediaan (pembangunan) gedung Kemantren Cijapati misalnya, ulama terlibat secara langsung, walaupun pembangunan itu merupakan tanggung jawab penuh Camat (pemerintah kecamatan). Pada kenyataannya, pembangunan itu dilakukan secara swadaya, dikerjakan oleh Badan Pelaksana Pembangunan yang diketua oleh kepala desa setempat (Desa Srirahayu). Tanggung jawab ulama dalam pembangunan gedung kemantren ini cukup berat, mengingat “diberi” tugas untuk menyediakan tenaga dan dana di luar dana yang disediakan pemerintah. Namun demikian dengan dipelopori ulama senior setempat, akhirnya terkumpul dana, serta pengerahan secara rutin, sehingga bangunan seluas 90m² itu dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat.

Peran serta ulama lainnya adalah dalam usaha mensukseskan program “sepuluh jurus pertanian” dari Kementrian Pertanian antara lain dalam “memperkenalkan” bibit unggul, pemupukkan yang tepat waktu, jenis pupuk, sistem pola tanam yang terprogram dengan baik, pemberantasan hama secara terpadu, pemberian zat pengatur tubuh yang tepat, dan yang lainnya. Dalam perannya itu, misalnya, salah seorang tokoh ulama dari desa Mekaraksana yang sehari-hari sebagai pemimpin pesantren, merupakan salah seorang ketua Kelompok Tani “Sayuran dataran Tinggi” (seperti kentang, kubis) bergerak secara aktif dalam mengkoordinasi anggota kelompoknya dan kelompok lainnya dalam usaha penyelenggaraan “Pendidikan dan Praktek Pertanian” untuk memperaktekkan teknologi pertanian, rencana kerja, pengenalan administrasi keuangan, dan yang lainnya yang berkaitan langsung dengan usaha pertanian. Biaya untuk kegiatan itu berasal dari pribadi ulama tersebut (terutama untuk penanaman dan pengolahan), dan biaya kelompok yang dipungut melalui iuran, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok (satu kelompok terdiri dari 20 orang petani). Sedangkan bantuan pemerintah berupa “tenaga ahli” dari Dinas Pertanian. Peristiwa pembangunan lainnya yang perlu dikemukakan disini adalah usaha pembangunan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Di kecamatan Cikancung, kolam ikan cukup luas, berdasarkan data monografi kecamatan ada 95,5 hektar, dan hasil panen pertahun rata-rata sebanyak 157.500 kg. Ikan yang dikembangkan antara lain jenis ikan mas, nila, nilem, dan lele dumbo. Disamping itu dikembangkan pula proyek percontohan pembibitan ikan mas; antara lain dipusatkan di tiga pesantren yang masing-masing ada di desa Cihanyir, Hegarmanah dan Ciluluk. Usaha

itu tampak cukup berhasil, bahkan pada saat sekarang ini, ketiga pesantren itu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga kerja Wilayah Propinsi Jawa Barat yang ada di kecamatan Cikancung, untuk memanfaatkan kolam-kolam pembibitan yang ada di ketiga pesantren itu sebagai tempat latihan kerja para pemuda yang bergabung dalam “Karang Taruna” yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan di Balai Latihan Kerja itu. Kali ini yang bertindak sebagai nara sumber adalah ulama pengasuh pesantren, bukan tenaga ahli dari Dinas Perikanan. Kasus itu menunjukkan bahwa bagi pesantren (ulama) pemilik kolam, kegiatan ini merupakan investasi untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, tampaknya disamping merupakan suatu kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang telah didapat, motivasi untuk memperoleh keuntungan cukup menonjol. Dengan kata lain, peranan yang dilakukan mereka juga mempunyai tujuan ekonomi yang bersifat kalkulatif.

Peristiwa lain adalah kegiatan pelebaran dan pembuatan (pembukaan) jalan baru: (1) Pembukaan jalan Bihbul, desa Cikancung sepanjang 1,2 km; (2) pelebaran jalan desa Cikancung juga, dari lebar 2 meter menjadi 4 meter, sepanjang 3,5 km; (3) pelebaran jalan Cikamuning di desa Mandasari sepanjang 7,5 km; (4) pelebaran dan pengaspalan jalan di Cikalage desa Hegarmanah sepanjang 1,25 km, dan (5) pelebaran jalan di desa Cikasungka sepanjang 1,7 km. Walaupun proyek ini merupakan proyek jalur atas, namun bobot keterlibatan dan “pengorbanan” masyarakat cukup besar dan lengkap, artinya disamping mereka telah merelakan lahan untuk pelebaran jalan (umumnya lahan pertanian) mereka juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dalam wujud tenaga (pengorganisasian masyarakat). Mereka juga hadir secara fisik dalam waktu-waktu kegiatan sedang berlangsung.

Di kecamatan Cikancung, ulama juga dilibatkan dalam usaha menyukseskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bentuk arahan mereka pada acara-acara pengajian berpengaruh positif terhadap pemungutan PBB yang umumnya berjalan lancar dan cukup berhasil, bahkan ada beberapa desa mampu mengumpulkan PBB melampaui target yang telah ditentukan. Pembangunan lain yang termasuk katagori pembangunan jalur atas adalah pembangunan sektor pendidikan. Pada saat penelitian dilakukan, ada tujuh proyek rehabilitasi gedung SD (Sekolah Dasar). Kegiatan itu, yang lebih terkenal dengan proyek Inpres SD, dikelola sendiri oleh pemerintah kabupaten melalui badan pengelola yang telah ditentukan. Dalam proyek itu Camat dan pejabat lainnya pada tingkat kecamatan (Kepala Dinas Diknas, Kepala Kantor Kemendiknas, dan petugas lapangan PU) ditunjuk sebagai pengawas pelaksana. Sedangkan kepala desa setempat ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. Berbeda dengan kegiatan pembangunan lainnya, tampaknya karena peluang untuk berperan serta terbatas, karena itu menimbulkan persepsi di kalangan

masyarakat bahwa pembangunan gedung SD merupakan urusan pemerintah. Mereka merasa tidak dituntut untuk berperan serta, karena biaya pembangunan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan dan tenaga profesional (dalam hal ini pemborong) dapat didatangkan dari luar. Dalam pembangunan seperti ulama tidak dapat berbuat banyak, mereka tidak bisa langsung melibatkan diri. Yang bisa dilakukan hanya bisa memberikan saran atau pikiran dari jauh, dengan bertolak dari kenyataan hasil pekerjaan pemborong, yang sering kurang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan *plafon* yang telah ditentukan. Terhadap model pembangunan seperti itu terkesan adanya kontrol sosial yang sangat longgar. Hal ini membawa pengaruh negatif yang lebih jauh, yaitu: (1) pengelolaan pembangunan tertutup, bahkan di antara aparat pemerintah sendiri; dan (2) menimbulkan sikap masa bodoh di kalangan masyarakat terhadap usaha dan pemeliharaan hasil pembangunan. Kenyataan seperti itu membuktikan bahwa politik pembangunan yang bersifat *top down* atau *governmental* membawa implikasi adanya birokratisme dan otoritarian dalam kebudayaan pembangunan, sehingga menghambat timbulnya partisipasi dan proses demokratisasi⁵⁸.

Kegiatan pembangunan jalur atas yang diusahakan menarik partisipasi masyarakat secara massal adalah program Keluarga Berencana nasional (KBN). Kegiatan operasional KB Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan terus menerus, tidak terputus dan merupakan siklus yang teratur. Dimulai dari perencanaan untuk menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran yang dituju, lokasi dan pelaksana kegiatan, target yang ingin dicapai, serta dukungan baik berupa tenaga, dana maupun sarana. Dari perencanaan inilah maka dilaksanakan kegiatan yang diikuti dengan monitoring, pembinaan dan evaluasi. Hasil evaluasi kegiatan selanjutnya menjadi titik tolak perencanaan berikutnya. Siklus kegiatan inilah yang merupakan mekanisme operasional KB Nasional di kecamatan Cikancung. Pelaku dalam penggarapan program KB Nasional di tingkat kecamatan (desa-des) itu terdiri dari berbagai unsur sebagai pengelola yang sangat menentukan berjalannya mekanisme operasional program. Unsur-unsur itu terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat. Di antara tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam operasional program adalah ulama.

Keberadaan ulama dalam satuan tugas (satgas) KB Nasional, menurut Camat setempat, diharapkan dukungan kesepakatan dan dukungan untuk menggerakkan masyarakat. Keberhasilan dukungan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ulama, merupakan faktor pendukung yang sangat besar terhadap kelancaran mekanisme kegiatan, dan sebaliknya akan menggagalkan atau setidak-tidaknya menyebabkan pelaksanaan program tersendat-sendat. Pada

⁵⁸ Kartodirdjo, Kompas, 25 Agustus 1993

awal-awal pengenalan program KB Nasional kepada masyarakat, hanya dua orang ulama yang berperan serta dalam kegiatan penyuluhan KB. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian besar ulama, yang berada di wilayah kecamatan Cikancung terlibat dalam satuan tugas KB Nasional di daerah masing-masing. Peran serta mereka terutama dalam memberikan motivasi dan penggerakkan (pengorganisasian) masyarakat. Mereka memberikan penjelasan mengenai manfaat KB. Mereka juga memberikan penjelasan kedudukan hukum KB adalah mubah, asal dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika akan dilaksanakan (diperkenalkan) pelayanan kontrasepsi dengan cara seterilisasi (baca: vasektomi atau tubektomi), mereka berkeberatan dan menentang, karena cara itu dipandang haram (bertentangan dengan hukum Islam). Pemikiran itu diacu dari fatwa MUI pusat yang dikeluarkan berkenaan dengan musyawarah nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan⁵⁹. Keberatan mereka terhadap pelayanan kontrasepsi dengan cara sterilisasi itu dikemukakan dalam temu muka (rapat koordinasi) unsur-unsur pengelola program KB Nasional tingkat kecamatan. Dalam pertemuan itu diambil kesepakatan bahwa pelayanan kontrasepsi dengan cara seterilisasi tidak akan dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat.

Dengan terlibatnya ulama secara penuh, memberikan hasil program yang lebih baik. Tingkat pencapaian program dari waktu ke waktu makin tinggi. Kenyataan ini menunjukkan ulama mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat. Dari berbagai contoh dan gambaran kegiatan di atas, dapat diketahui adanya peran spesifik yang dilakukan ulama dalam berbagai kegiatan pembangunan: (1) peranan mereka cukup besar dan beragam, baik berupa pikiran, tenaga, maupun harta; (2) tahapan peran dilihat dari prinsip keterlibatan dalam proses pembangunan disamping ada yang terlibat secara penuh, juga ada yang dilakukan secara parsial; (3) dilihat dari segi prinsip keterlibatan, cakupan keterlibatan mereka umumnya tidak terbatas dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di sekitar tempat pemukiman (desa) mereka saja, tetapi juga terlibat dalam pembangunan di luar desanya.

Telah dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian pembangunan nasional. Pembangunan di kecamatan Cikancung terutama pada saat penelitian dilakukan memiliki ciri-ciri: (1) ia mencakup berbagai segi kehidupan. Kegiatan pembangunan di kecamatan itu secara rinci meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perhubungan, keagamaan,

⁵⁹ Menurut keputusan musyawarah Nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan (20 Oktober 1983), bahwa melakukan vasektomi dan tubektomi adalah haram, kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak yang lahir.

pendidikan, kesehatan/KB, kesejahteraan keluarga, dan keamanan; (2) dilihat dari segi frekwensi kegiatan dan biaya, pembangunan sektor keagamaan menempati prioritas pembangunan utama, berbeda dengan prioritas pembangunan secara nasional yang lebih memprioritaskan sektor pertanian; (3) kegiatan pembangunan terbagi pada pembangunan jalur atas dan jalur bawah. Pembangunan jalur atas berskala besar dan lebih diorientasikan pada penerapan program pembangunan dan integrasi nasional, sedangkan pembangunan jalur bawah berskala kecil dan diorientasikan pada usaha pengembangan potensi dan integrasi masyarakat setempat (lokal); (4) dilihat dari segi frekwensi kegiatan, pembiayaan, serta keterlibatan masyarakat, pembangunan jalur bawah lebih besar dari pada pembangunan jalur atas; (5) terdapat beragam satuan pengelola pembangunan sebagai saluran kepemimpinan pembangunan para elit desa. Di antara elit desa yang menyalurkan kepemimpinannya dalam kegiatan pembangunan adalah mereka yang memiliki ilmu agama yaitu ulama; (6) sebagai pemimpin masyarakat, ulama memiliki saluran kepemimpinan yang beragam walaupun umumnya terbatas pada sektor keagamaan. Dengan kata lain, aktualisasi kepemimpinan pembangunan di kalangan ulama boleh dikatakan sempit bergerak dalam satuan-satuan kecil dan otonom, namun menghujam di dalam struktur masyarakat desa. Selain itu interaksi mereka dengan masyarakat desa sebagai partisipan pembangunan dilakukan secara kontinu dan mendalam. Semua itu dimungkinkan karena ulama merupakan potensi pembangunan masyarakat desa yang kuat berakar di dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Semua agama, apapun nama dan bentuk agamanya, berasal dari Tuhan. seluruh agama adalah ekspresi Tuhan dalam jalan yang berbeda untuk menyelamatkan manusia. Dalam Hindu, penyelamatan manusia ini dikenal adanya konsep *upaya*. Kata “upaya” berasal dari bahasa Sanskerta, artinya strategi Ilahi menyelamatkan manusia sebanyak mungkin. Seperti di sebuah kapal, ada tiga orang akan tenggelam, lalu kita melemparkan tiga tali untuk menyelamatkan mereka. Posisi tenggelam setiap orang berbeda, karena itu talinya juga berbeda, sebab kakau talinya sama, maka tidak akan bisa menyelamatkan secara maksimal. Itu *upaya*, sebuah strategi Ilahi dalam rangka menyelamatkan manusia sebanyak mungkin. Agama adalah ibarat tali itu, alat penyelamat manusia. Setiap orang, secara substansial, memiliki tali (agama) yang berbeda, bergantung pada tingkat kesadaran sebab derajat kesadaran setiap orang tidak bisa disamakan. Tali itu harus terhubung pada tiap orang supaya mereka selamat dalam bahaya duniawi dan kegelapan. Itulah *upaya*, menyelamatkan sebanyak mungkin. Di dalam al-Qur’an, konsep *upaya* ini dikenal dengan *rahmatan lil-alamin*, rahmat bagi seluruh alam.

Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk percaya pada ajaran agama yang dibawa para nabi sebelumnya, misalnya kita harus meyakini kitab yang empat, yaitu Zabur, Injil, Taurat dan Qur’an. Tetapi, terkadang betapa sulit kita percaya dan meyakini ajaran yang ada di dalam tiga kitab sebelumnya. Berarti keimanan kita belum total dan utuh. Ibarat cerita kehidupan, jika al-Qur’an adalah Kitab atau Buku Agama yang terakhir, berarti yang awal dan tengah sangat penting, karena ia pasti menceritakan tentang kitab dan agama sebelumnya. Jika membaca hanya bab terakhir sebuah buku, tentu kita tidak akan mampu memahami isi buku secara keseluruhan. Islam, adalah agama terakhir, berarti ia merangkum agama sebelumnya meskipun tidak sedetail sebagai sebenarnya. Berarti, ada kesinambungan ajaran sebelumnya dengan Islam yang sekarang. Para Nabi terdahulu menceritakan akan kedatangan Nabi Muhammad saw, dan beliau juga menceritakan pada Nabi yang sebelumnya, agar kita selalu terhubung dengan seluruh cerita kehidupan manusia baik antara yang lampau, sekarang maupun dengan yang akan datang.

Karena itu, agama sebenarnya datang untuk menyelamatkan manusia sebanyak mungkin, sebab Tuhan menyelamatkan setiap orang. Berarti Tuhan akan mengekspresikan Diri-Nya dalam berbagai bentuk, supaya jiwa yang

beragam itu dapat terhubung dengan-Nya. Setiap jiwa manusia berbeda antara satu dengan lainnya, baik dari segi karakter maupun kapasitas. Karena itu, tali yang dilemparkan atau agama yang diturunkan untuk menyelamatkan manusia juga berbeda. Ada yang secara kolektif punya karakter yang sama, sesama Muslim misalnya, ada “tali” untuk Muslim. Ada tali untuk Kristen, untuk Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Titik pusat menyelamatkan semua orang. Maka dengan demikian, setiap orang disarankan untuk berpegang teguh pada talinya masing-masing agar bisa diselamatkan dari kehidupan duniawi yang penuh dengan penderitaan ini.

Pemikiran agama atau *thought of religion*, atau pemikiran tentang agama adalah suatu pandangan kaum ulama sebagai cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa agama memiliki aspek perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terdapat dalam level bentuk agama itu sendiri sedangkan dalam substansi agama hanya ada satu yakni agama Universal yang memancar dalam ruang dan waktu berupa perwujudan lahiriah yang banyak itu. Kesatuan itu hanya bisa dicapai melalui pencerahan intelektual dan perjalanan spiritual sejati.

Kritik yang perlu diajukan sejauh yang penulis pahami adalah sulit untuk membedakan batasan-batasan antara wilayah eksoteris dan wilayah esoteris, sebab tidak semua yang nampak itu bersifat eksoteris dan tidak semua yang tersembunyi itu dapat dikatakan wilayah esoteris. Tetapi, meskipun demikian, perspektif dalam berguna sekali dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama, agar terhindar dari konflik-konflik yang mengerikan. Dalam tataran praktis, memang ada kesulitan untuk mengimplementasikan gagasan Schuon ini, tapi kepentingannya adalah merubah sikap dari fanatisme dan klaim kebenaran yang berlebihan menjadi kesadaran spiritual yang penuh dengan kedamaian dan kepasrahan.

Wallâhu a 'lâm bil-shawâb

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal Bakhtiar. 2009. *Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Emanuel Wora. 2006. *Perennialisme, Kritik atas Modernisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta : Kanisius
- Frithjof Schuon. 1994. Mencari Titik Temu Agama-Agama. (terj. Transendent Unity of Religions). Jakarta : Pustaka Firdaus.
- , 1993. *Islam dan Filsafat Perennial*, dari “*Islam and the Perennial Philosophy*”, terjemahan oleh Rahmani Astuti. Bandung: Mizan
- , 2002. *Transfigurasi Manusia* terj. *The Transfiguration of Man* oleh Fakhruddin Faiz. Yogyakarta : Penerbit Qalam.
- , Songs Without Names. @2010 World Wisdom, Inc. Twelfth Collection, CXIX.
- J.Dwi Narwowko dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks pengantar & terapan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Karen Armstrong. 2001. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, Yahudi*, terj. Satrio W, M.Helmi, Abdullah Ali. Bandung: Mizan.
- Kautsar Azhari Noer. 1995. *Ibn Al-Arabi, Wahdat Al-Wujud dalam Perdebatan*. Jakarta: Paramadina.
- Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus, (ed). 1998. *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- , Ahmad Gaus, (ed). 1998. *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Louis Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*, edisi terjemahan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mehdi Hairi Yazdi. 1994. *Ilmu Hudhuri* (terj.) Bandung: Mizan.
- Michael Oren Fitzgerald. Frithjof Schuon, *Messenger of the Perennial Philosophy*. @2010 World Wisdom
- M. Wahyuni Nafis dan Komaruddin Hidayat. 1995. *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta : Paramadina.

- Nurcholish Madjid. 2003. *Islam, Agama Kemanusiaan, membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*. Jakarta : Paramadina.
- Seyyed Hossein Nasr. 1989. *Knowledge and the Sacred*. State University of New York Press.
- , 1997. *Pengetahuan dan Kesucian*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Irfan Hanida. 2007. *Konsep Esoterisme dalam Pemikiran Frithjof Schuon* (Skripsi, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati: Bandung
- Muhammad Bagir dalam kajian di Yayasan Paramadina dengan tema ilmu Filsafat dan Tasawuf.
- <http://www.worldwisdom.com/public/authors/Frithjof-Schuon.aspx>,